



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT KERJA KOMISI VI DPR RI
DENGAN MENTERI BUMN DAN PT BIO FARMA (PERSERO)**

- Tahun Sidang : 2020-2021
- Masa Persidangan : III
- Rapat Ke- : 1 (satu)
- Jenis Rapat : Rapat Kerja
- Sifat Rapat : Terbuka
- Hari, Tanggal : Rabu, 20 Januari 2021
- Waktu : 13.36 WIB s.d. 17.37 WIB
- Tempat : Ruang Rapat Komisi VI DPR Republik Indonesia
Gedung Nusantara I Lt, Jl. Jenderal Gatot Soebroto,
Jakarta 10270
- Ketua Rapat : Faisol Riza, S.S., Ketua Komisi VI DPRRI
- Acara : Membahas Mengenai Pelaksanaan Pembelian
Vaksin Covid-19
- Sekretaris Rapat : Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabag Sekretariat Komisi
VI DPRRI
- Hadir : A. Anggota DPR RI:
43 dari 53 orang Anggota dengan rincian :
1. FRAKSI PDI-PERJUANGAN (F-PDIP)
11 dari 12 orang Anggota
 1. Aria Bima.
 2. Adisatrya Surya Sulisto
 3. Darmadi Durianto
 4. Rieke Diah Pitaloka
 5. ST. Ananta Wahana, S.H.
 6. Sonny T. Danaparamita
 7. I Nyoman Parta, S.H.
 8. Ir. Deddy Yevri Hanteru Sitorus,
M.A.
 9. Dr. Evita Nursanty, M.Sc.
 10. Sondang Tiar Debora Tampubolon

11. dr. H. Mufti A. N. Anam.
2. FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG)
7 dari 8 orang Anggota
 1. Gde Sumarjaya Linggih, S.E., M.A.P.
 2. Drs. Mukhtarudin
 3. Ir. H.M. Idris Laena, M.H.
 4. Lamhot Sinaga
 5. H. Singgih Januratmoko, S.K.H., M.M.
 6. Doni Akbar, S.E.
 7. Nusron Wahid
3. FRAKSI PARTAI GERINDRA (F-GERINDRA)
4 dari 7 orang Anggota
 1. Andre Rosiade
 2. Khilmi
 3. Ir. H. La Tinro La Tunrung
 4. Hendrik Lewerissa, S.H., L.L.M
4. FRAKSI PARTAI NASDEM (F-NASDEM)
4 dari 5 orang Anggota
 1. Martin Manurung, S.E.,M.A.
 2. H. Subardi, S.H., M.H.
 3. Zuristyo Firmadata, S.E., M.M.
 4. Muhammad Rapsel Ali
5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)
6 dari 6 orang Anggota
 1. Faisol Riza, S.S.
 2. Ir. H. M. Nasim Khan
 3. Tommy Kurniawan
 4. Marwan Ja'far
 5. Drs. H. Mohammad Toha, S.Sos., M.Si.
 6. Siti Mukaromah, S.Ag.,M.A.P.
6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)
3 dari 5 orang Anggota
 1. DR. Ir. E. Herman Khaeron, M.Si.
 2. Hj. Melani Leimena Suharli
 3. Putu Supadma Rudana
7. FRAKSI PARTAI KEADILAN

SEJAHTERA (F-PKS)

3 dari 4 orang Anggota

1. Amin AK, M.M.
2. Hj. Nevi Zuarina
3. Mahfudz Abdurrahman, S.Sos.

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)

3 dari 5 orang Anggota

1. Abdul Hakim Bafagih
2. Primus Yustisio, S.E.
3. Daeng Muhammad, S.E.,M.Si.

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP)

2 dari 2 orang ANggota

1. H. Ach. Baidowi, S.Sos., M.Si
2. Elly Rachmat Yasin

B. MENTERI BUMN

C. PT BIO FARMA (PERSERO)

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (FAISOL RIZA, S.S. / F-PKB):

(rekaman tidak lengkap)

Para saudara Wakil Menteri BUMN II Bapak Kartika Wirjoatmodjo.

Saudara Direktur PT Bio Farma Persero Bapak Honesti Basyir beserta jajaran.

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Kuasa yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan Rapat Kerja Komisi VI DPRRI dengan Menteri BUMN dan Dirut Utama PT Bio Farma Persero pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat, mudah-mudahan kita semua terhindar dari wabah Covid-19. Aamiin.

Sehubungan dengan kondisi yang tidak kondusif saat ini terkait dengan penyebaran virus Covid-19, rapat-rapat yang dilakukan oleh Alat Kelengkapan Dewan dan Mitra Kerja Pemerintah dilakukan dengan ketentuan antara lain:

1. Berdasarkan Pasal 226 Ayat(3) Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib berbunyi: "Semua jenis rapat DPR dilakukan di Gedung DPR kecuali ditentukan lain, rapat dapat dilakukan di luar Gedung DPR atas persetujuan Pimpinan DPR, maka pelaksanaan rapat dapat dilakukan secara tatap muka dan atau secara virtual."

2. Peliputan pelaksanaan Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dilakukan *live streaming* oleh TV Parlemen, Media Cetak, dan Media Elektronik lainnya mendapatkan sumber berita dari TV Parlemen.
3. Berdasarkan Pasal 249 Ayat (1) Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib menyebutkan bahwa untuk kepentingan administrasi setiap anggota menandatangani daftar hadir sebelum menghadiri rapat. Dikarenakan kondisi tidak kondusif maka daftar hadir anggota dapat dilakukan secara elektronik.
4. Rapat dihadiri paling banyak 20% dari jumlah anggota komisi serta mitra kerja dengan komposisi sebagai berikut:
 - Pendamping Mitra Kerja maksimal 5 orang yang ditempatkan di balkon ruang rapat komisi;
 - Pendamping mitra kerja yang tidak berhubungan langsung dengan rapat dan tidak tertampung di balkon untuk meninggalkan gedung DPRRI;
 - Pendamping dari mitra kerja yang tidak tertampung di dalam rapat maupun balkon dapat mengikuti rapat secara virtual;
 - Pendamping dari anggota, tenaga ahli, staff administrasi anggota tidak mendampingi anggotanya di komisi.

Selanjutnya surat dari Ketua DPR Nomor: PW/10736/DPR RI/IX/2020, tanggal 11 September 2020 tentang Pembatasan Kehadiran Fisik pada Rapat-rapat, kami meminta kesepakatan mengenai tata cara rapat yang dilakukan sebagai berikut:

1. Kegiatan rapat dilaksanakan dengan protokol kesehatan secara ketat.
2. Lamanya rapat sepakati pada saat pembukaan rapat agar lebih efisien dan efektif maksimal 2,5 jam, jadi turun ya kalau kemarin 3 jam ini 2,5 jam.
3. Alur rapat sebagai berikut:
 - a. pembukaan;
 - b. presentasi singkat;
 - c. pertanyaan Anggota;
 - d. tanggapan;
 - e. tanggapan balik; dan
 - f. penutup atau kesimpulan.
4. Presentasi awal diberikan waktu 5 menit, tanggapan 10 menit, tanggapan akhir 10 menit;
5. Anggota diberikan waktu menyampaikan pertanyaan selama 3 menit, tanggapan balik sebanyak 3 menit;
6. Lalu lintas rapat diatur oleh admin yang membantu pimpinan rapat terutama dalam menghidupkan dan mematikan *microphone* masing-masing peserta, jadi kalau 3 menit lewat dimatikan.

Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan,

Menurut rapat menurut laporan dari Sekretariat Komisi VI DPRRI Rapat Kerja hari ini dihadiri oleh 32 orang Anggota, berapa virtualnya? 16 orang virtual dari 53 Anggota Komisi VI yang terdiri dari 9 fraksi, dengan demikian kuorum telah terpenuhi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 281 Ayat(1) Peraturan DPR tahun 2020 tentang tata tertib. Maka perkenankan

kami membuka Rapat Kerja hari ini dan saya nyatakan Rapat Kerja terbuka untuk umum. Setuju?

(RAPAT DIBUKA PUKUL 13.41 WIB)

Terima kasih kami ucapkan kepada saudara Menteri BUMN dan Direktur Utama PT Bio Farma Persero atas kesediaan waktunya menghadiri Rapat Kerja pada hari ini guna membahas tentang Realisasi Anggaran Tahun 2020, Rencana Kegiatan Kementerian BUMN Tahun 2021, dan pelaksanaan pemberian vaksin Covid-19. Untuk itu kami ingin mendapatkan persetujuan apakah rapat ini bisa kita akhiri pada pukul 16.00 WIB? bisa ya.

(RAPAT:SETUJU)

Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan,

WHO telah menyatakan Corona Virus Disease tahun 2019 atau Covid-19 sebagai pandemi. Penyebaran Covid-19 di Indonesia saat ini sudah semakin meluas lintas wilayah dan lintas negara yang diiringi dengan peningkatan jumlah kasus dan atau jumlah kematian. Situasi ini kian berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan serta kesejahteraan masyarakat sehingga diperlukan strategi dan upaya yang komprehensif dalam percepatan penanganan Covid-19.

Penanggulangan Covid-19 ini membutuhkan peran serta dari semua pihak baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pihak swasta maupun semua elemen masyarakat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menteri BUMN selaku Ketua Pelaksana Komite Percepatan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional memiliki tugas dalam mengkoordinasikan dan mengintegrasikan pelaksanaan kebijakan strategis terkait penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut kami ingin mendapatkan penjelasan detail terkait mengenai:

1. Realisasi Anggaran Tahun 2020 dan Rencana Kegiatan Tahun 2021;
2. Peran BUMN dalam memonitor pengawasan, pelaksanaan proses pengadaan, dan distribusi vaksin yang dilakukan oleh PT Bio Farma;
3. Kesiapan fasilitas produksi PT Bio Farma dalam mengembangkan vaksin produk sendiri dan upaya percepatan distribusi jenis dan jumlah vaksin di seluruh provinsi; dan juga
4. *Timeline* Kementerian BUMN dan PT Bio Farma dalam upaya memenuhi target kebutuhan vaksin Covid-19 bagi seluruh rakyat Indonesia.

Saya kira kita membutuhkan hal-hal tersebut, mungkin juga akan ditambah dengan misalnya polemik yang berkembang di masyarakat mengenai kemungkinan ada vaksin mandiri, kapan pelaksanaannya, terus dilaksanakan oleh siapa, di mana tempatnya, apakah ini tidak bertubrukan dengan rencana pemerintah untuk pembagian vaksin gratis di masyarakat yang hari ini sudah berjalan.

Saya kira waktu kita berikan kepada Menteri BUMN dan dilanjutkan oleh Dirut PT Bio Farma, namun sebelumnya barangkali perlu diperkenalkan Pak Menteri, Wamen yang baru, kami semua belum kenal jadi terutama Bu Evita.

Saya kira begitu kita kasih kesempatan 5-10 menit kepada Bapak Menteri, silakan Pak Menteri.

MENTERI BUMN (ERICK THOHIR) :

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera.

Shalom.

Om Swastiastu.

Namo buddhaya.

Salam kebaikan.

Yang terima kasih Pimpinan Komisi VI yang hadir hari ini ada Pak Faisol Riza Pak Demer, Pak Martin, Pak Aria Bima, dan tentu para wakil rakyat yang ada di Komisi VI yang juga berkenan dalam hari ini, juga bisa terus mengawasi dan juga mengkritisi daripada kinerja yang kami lakukan dan terima kasih atas *support*-nya di tahun 2020 kepada Kementerian BUMN.

Tentu hari ini saya juga nanti akan memberi kesempatan kepada Wakil Menteri I yang baru dan saya yakin para Pimpinan dan para Anggota Komisi VI sudah kenal *track record* beliau, dan tentu *alhamdulillah* saya sangat terhormat beliau bisa membantu kami karena memang kalau kita lihat *problem* daripada BUMN yang sedang kita hadapi ini sekarang kan ada 3.

Satu dengan kondisi Covid-19, suka tidak suka tentu kinerja kita sangat terganggu karena 90% terdampak, karena kinerjanya terganggu ya kita harus melakukan berbagai cara apakah mengurangi *Capex* yang seperti sudah terjadi di PLN sampai 25% ataupun kita merestrukturisasi daripada hutang-hutang, dan terus juga meningkatkan tentu kinerja pada intinya. Kalau kita lihat juga *alhamdulillah* walaupun saya sudah sampaikan di awal 2020 pada saat itu kita cukup optimis tapi karena Covid waktu itu, nah Insya Allah juga deviden yang akan diberikan BUMN di tahun ini Insya Allah bisa tercapai sesuai dengan target yang di-inginkan oleh Menteri Keuangan di mana sebenarnya kalau kita lihat 90% BUMN terdampak tetapi devidennya Insya Allah masih bisa 50% daripada dibandingkan tahun sebelumnya, jadi ini kan sesuatu hal yang terima kasih atas pendampingan dari Komisi VI.

Tentu yang kedua yang tidak kalah pentingnya yaitu bagaimana kita menempatkan manajemen yang terbaik yang ada di Indonesia dalam menangani, tentu Covid ataupun penanganan ekonomi pada khususnya korporasi yang ada di BUMN, jadi penempatan orang menjadi sangat penting.

Yang ketiga juga diharapkan pimpinan-pimpinan yang ada di BUMN terus bekerja keras di mana salah satunya Wamen menjadi poin penting apalagi di bawah Wamen 1 itu sendiri ada beberapa hal yang sangat tentu hubungan langsung ke masyarakat, apakah yang namanya energi, apa yang namanya pangan, pupuk, dan lain-lainnya.

Mungkin sebelum saya menjelaskan mengenai realisasi penyerapan Kementerian BUMN bila Pimpinan berkenan dan Anggota berkenan mungkin Pak Pahala bisa memperkenalkan diri 3 menit silakan Pak Pahala.

WAMEN BUMN I (PAHALA MANSURY):

Baik terima kasih Pak Menteri.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat siang.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Shalom.

Om Swastiastu.

Namo buddhaya.

Pertama-tama tentu kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak-bapak pimpinan Komisi VI DPRRI dan juga seluruh Anggota Komisi VI DPRRI yang sudah memberikan dukungan kepada kami selama kami juga ditugaskan oleh Pak Menteri sebelumnya di beberapa BUMN lainnya. Sebelum bergabung dan diberikan kepercayaan oleh Pak Erick untuk menjadi Wakil Menteri I BUMN, kami menjabat sebagai Direktur Utama di Bank BTN dan tentunya dalam penugasan tersebut sudah cukup banyak berinteraksi tentunya dengan Bapak-bapak di Komisi VI.

Sebelum itu juga sebagai Direktur Keuangan di Pertamina dan sebelum itu juga sebagai Dirut di Garuda Indonesia. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri BUMN atas kepercayaannya mudah-mudahan dalam hal penugasan sebagai Wamen I ini nanti kami bisa betul-betul menjalankan apa yang diamanahkan oleh beliau ada enam klaster utama yang menjadi supervisi kami yaitu di bidang energi dan migas, kemudian juga pupuk perkebunan, kemudian juga di perhutanan kehutanan, kemudian juga pangan, selain itu juga industri pertahanan, industri survei dan ini juga tentunya industri-industri ini tentunya merupakan industri yang cukup strategis bagi Indonesia.

Mudah-mudahan dalam waktu ke depan kami akan bisa menjalankan perbaikan dan juga transformasi di industri-industri tersebut sambil juga tentunya memastikan bahwa masing-masing perusahaan dan klaster tersebut bisa memberikan kontribusi yang maksimal kepada APBN melalui pembayaran dividen.

Mungkin demikian Pak Menteri.

Terima kasih atas kesempatannya.

MENTERI BUMN (ERICK THOHIR):

Terima kasih Pak Wamen.

Para Pimpinan Komisi VI dan Anggota Komisi VI yang hadir.

Saya sampaikan ada *slide* yang sudah siap. Kami laporkan untuk penyerapan anggaran di Kementerian BUMN tahun 2020, *next slide*, *alhamdulillah* terserap 97,74% di mana anggarannya itu *dua ratus enam*

puluh enam kami sudah bisa melaksanakan Rp260 Miliar. Adapun kalau kita detailkan dari pada Rp260 Miliar ini untuk apa saja.

Next slide.

Di situ jelas ada tiga kelompok realisasi berdasarkan jenis belanja. Ada belanja pegawai yang terserap 99,42%, lalu juga ada belanja modal yang terserap 99,57%, adapun belanja barang yang memang terserap 94,92 %. Nah kalau kita lihat tentu dari *slide* berikutnya kami sendiri sudah coba mensinkronisasi dengan Kementerian Keuangan.

Next slide.

Bahwa untuk anggaran tahun ini memang kami diminta mengurangi dari anggaran tahun kemarin yang dari *dua ratus enam puluh enam* itu kurang lebih sebenarnya ajuan kami *dua ratus empat puluh empat*, tetapi sepertinya kisaran angka di *dua ratus dua puluh delapan*. Jadi kita menurun cukup banyak hampir kurang lebih Rp40 miliaran, memang berat tapi ya memang kita mengerti kondisi keuangan negara hari ini masih dalam keadaan prihatin, makanya kami kalau memang nantinya angkanya di *dua ratus dua puluh delapan*, maka rencana untuk program dukungan manajemen itu *seratus lima puluh tiga* dan program pengembangan dan pengawasan *tujuh puluh empat koma tujuh*. Kalau dilihat juga pecahan daripada anggaran tersebut ya kita bisa lihat belanja barang 63,8, belanja pegawai 27,6, belanja modal yang jadinya 8,6%.

Adapun program-program yang bisa kita sampaikan secara *highlight* saja.

Next slide.

Slide berikutnya ada? Oh oke. Mungkin di sini mungkin ada 4 program besar ya bahwa satu pembinaan dan pengawasan BUMN yang terus kita tingkatkan profesionalismenya, di sini ada 4, tetapi mungkin salah satunya yang saya garis bawah adalah peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi ya karena kita tahu bahwa kita terus dituntut sekarang dengan keadaan Covid-19 ini banyak sekali percepatan-percepatan yang harus terjadi, tidak hanya di segi digital tapi juga market, market-nya berubah total.

Nah karena itu adalah bagaimana kita meningkatkan akuntabiliti daripada kinerja organisasi kami menjadi sangat penting, kalau dulu saya sudah sampaikan lima pilar sebelumnya, mungkin tidak perlu dijabarkan lagi itulah salah satu kita mengejar hal ini.

Mewujudkan kemandirian dan korporatisasi daripada BUMN yang bisa berdaya saing. Nah, di sini juga ada beberapa program ada 9 program, mungkin ada 3 *highlight*-nya tadi saya sudah sampaikan restrukturisasi hutang ya BUMN yang memang kita lihat tentu kalau bisa dilihat juga tentu di karya-karya yang sekarang ini memang suka tidak suka pembangunannya memerlukan dana yang sangat besar tapi karena situasi Covid penurunannya sangat signifikan, bisa kita lihat di kereta api saja hari ini masih tetap kurang lebih di 15% penumpang. Nah, hal ini tentu akibatnya ada perusahaan-perusahaan yang sejak awal mempunyai hutang yang cukup tinggi. Nah ini menjadi juga harus direstrukturisasi.

Alhamdulillah, kita punya *track record* yang baik ketika kita mencoba merestrukturisasi Krakatau Steel. Nah, tentu sekarang *challenge* yang kita hadapi ini ada 3. Satu salah satunya PTPN yang mempunyai nilai hutang cukup besar yaitu Rp40 triliun lebih ya dan juga di karya-karya yang memang masih berjalan dan tentu di berapa hal lain di industri yang memang pada saat ini kondisinya harus kita hadapi seperti pariwisata ini ini memang realita yang harus kita lakukan.

Tetapi kami juga terus mencari penguatan pendanaan BUMN apakah melalui PMN. Apakah melalui *right issue* ataupun apa ini yang kita terus juga di 2021 ini *corporate action* kita harus lakukan. Salah satunya misalnya kita memperkuat bagaimana *merger* Bank-bank Syariah, nah ini ini salah satu kita memperkuat daripada bagaimana industri syariah kita menjadi punya bank yang sangat besar dan masuk ke *Top 10* dan di situ pun kita lihat pasti keberpihakan kepada UMKM akan mulai membesar, tentu awalnya masih pada status seperti ini tapi ke depan pasti akan membesar.

Atau juga penggabungan Ultra Mikro, bagaimana kita memastikan pengusaha kecil bisa naik kelas yang tadinya PNM saya saksikan sendiri rata-rata itu mereka mendapatkan pinjaman 1 sampai 3 juta di mana kurang lebih *median*-nya itu Rp1,6 juta tanpa agunan, nah kemarin bagaimana para usaha mikro ini dibantu oleh pemerintah tetapi juga memastikan dia bisa naik kelas melalui penggadaian ataupun naik nantinya juga masuk ke perbankan di BRI. BRI sendiri kita sudah restrukturisasi di mana BRI untuk korporasinya sekarang sangat kecil 20%, tetapi 80%-nya harus ke Ultra Mikro dan UMKM. Nah, hal-hal ini yang memang tidak lain bagaimana kita memetatarsis daripada tadi pemfokusan daripada masing-masing BUMN.

Tentu juga kita manajemen risiko, manajemen risiko tidak kalah pentingnya karena memang kalau kita lihat kebijakan masing-masing negara di dunia sekarang sendiri agak proteksi ya dan akhirnya mengakibatkan tentu ketika terjadi kebijakan sesuatu di negara tersebut bisa aja terdampak dengan bisnis di kita ya. Kita misalnya kita sudah bisa mulai produksi Paracetamol ya tetapi kan bahan bakunya masih impor, nah ini kebijakan-kebijakan dari negara lain ini yang mungkin juga manajemen risiko harus mulai melihat secara detail adakah hal-hal yang kita perlu antisipasi ke depannya.

Lalu memaksimalkan juga kontribusi BUMN yang tidak lain tadi saya sudah jelaskan apakah dukungan BUMN terhadap UMKM melalui program kemitraan yang kemarin kita sudah paparkan PaDi UMKM Alhamdulillah mestinya tahun ini kita bisa Capex kurang lebih Rp 1 triliun untuk UMKM karena memang ini menjadi tekanan kepada kami kami BUMN harus bisa juga membentuklah pengusaha-pengusaha yang ada di daerah dan tentu menjaga UMKM tersebut.

Lalu juga tidak lain bagaimana kapitalisasi pasar BUMN karena *value* BUMN sendiri, suka tidak suka ada 27 yang sudah *go public* Alhamdulillah kemarin saham-saham BUMN sendiri sangat positif di bursa yang tidak lain karena ada dua hal. Satu *Good Corporate Governance*-nya yang sangat terbuka, tetapi kedua kita melakukan *project-project* masa depan seperti *EV Battery*. Kita tahu *EV Battery* itu akan juga terdampak dengan bisnis Pertamina seperti pombensin karena pombensin sendiri 20 tahun yang akan datang ketika semua memakai mobil listrik yang harganya jauh lebih lebih

murah itu tentu orang banyak *charging* di rumah tidak lagi di pom bensin, nah 80% itu akan melakukan itu mau tidak mau pombensin sendiri akan terdampak.

Nah inilah yang kenapa kita melakukan juga strategi jangka panjang untuk masing-masing BUMN, terbukti akhirnya orang percaya Antam sebagai penyuplai nikel ini salah satunya tentu menjadi saham yang baik. Ataupun di lain pihak seperti yang tadi saya sempat sampaikan misalnya di bank-bank yang memang pada saat ini sedang mendapat sinergisitas ultra mikro ataupun syariah sahamnya sangat dipercaya dan ini pertama kali saham BUMN lebih tinggi dari saham LQ-45 ini hal-hal yang saya rasa positif apresiasi dari pasar secara langsung.

Tentu akhirnya peningkatan profitabilitas. Kita pasti mendapat *challenge* di tahun 2022 mungkin tidak dividen kita bisa kembali seperti sebelum Covid-19, nah hari ini kita hanya memberanikan diri kalau tahun ini kita bisa 50% tahun depan 75%, tetapi ini yang kita coba untuk profitabilitas BUMN bisa terjadi.

Pak Ketua, jadi laporan untuk yang pertama untuk TA sendiri dengan kegiatannya yaitu kita mendapatkan kurang lebih *dua ratus dua puluh delapan* ada penurunan di tahun kemarin karena pemerintah melakukan efisiensi, tetapi dengan angka *dua ratus dua puluh delapan* kita coba tadi dengan program-program yang sudah dipaparkan nanti *slide*-nya juga ada bisa kita lihat bagaimana kita bisa menghitung daripada target-target yang disesuaikan. Apakah saya bisa berlanjut kepada vaksin?

Untuk vaksin sendiri para Pimpinan dan para Anggota, nah memang sejak awal kami ditugaskan untuk membantu daripada kondisi Covid-19 ini. Kalau kita ingat bagaimana kita bahu-membahu bersama Menteri PUPR bersama TNI-Polri kita menanggulangi langkah awal itu dengan membangun Wisma Atlet pada saat itu, lalu juga kita lakukan operasi masker yang waktu itu masker sempat tinggi tapi kita coba dengan jaringan Kimia Farma kita menjual masker tetap di harga 2500 perak dan hanya boleh 5 orang yang beli waktu itu Alhamdulillah setelah kondisi normal ya masker sekarang menjadi stabilitas baru dan inilah salah satu fungsi dari pada BUMN.

Kami juga waktu itu melakukan juga bagaimana inovasi daripada penemuan alat kesehatan yang lokal apakah itu ventilator, apakah hal lain-lainnya kita coba penetrasi hari itu tentu ya berterima kasih juga dengan kementerian lain atau para swasta yang akhirnya sekarang juga terjadi daripada pembelian alat kesehatan lokal yang seperti sekarang sudah diumumkan misalnya *GeNose* sekarang sudah menjadi kerja keras dari Menteri BRIN bisa terlaksana. Ataupun kemarin ketika kita kesulitan bahan-bahan obat di mana kita waktu itu sekarang bisa memproduksi sendiri Favipiravir ya di mana sekarang Favipiravir itu adalah obat pertama yang masuk ketika kita positif Covid tentu ada obat-obat berikutnya tetapi obat pertama ini sekarang sudah menjadi standarisasi ketika dalam kondisi tertentu Favipiravir masuk dan ini sudah jadi standarisasi, nah ini hal-hal yang ini yang kita harapkan bisa terlaksana.

Nah, tentunya terakhir kami diminta lagi untuk coba melangkah untuk melakukan peninjauan kepada vaksin dan tentu awalnya memang saya

ditugaskan bersama Ibu Menlu untuk coba melakukan penjajakan untuk vaksin. Nah, kenapa juga dua negara tujuan saat itu yaitu UAE dan Cina karena memang sejak awal ketika kita mengontak para pembuat vaksin dari negara Eropa dan Amerika responnya sangat rendah itu ada bukti *black and white* yang kita bisa paparkan. Nah, karena itu kita melihat hubungan dagang kita dengan Cina dan UAE cukup bagus di mana kunjungan Bapak Presiden di bulan November ke UAE salah satunya bagaimana kerja sama yang waktu itu PLN bersama Masdar yang kita membangun energi terbarukan di Cirata, ataupun hubungan dagang dengan Cina pada saat itu ya terbukti bagaimana sekarang Cina sendiri membantu beberapa ekspor Indonesia masuk ke Cina, ataupun kerja sama lainnya. Nah, hal itu kita jajaki tentu sebagai BUMN, BUMN bertemu dengan BUMN Cina, BUMN bertemu dengan BUMN yang ada di UAE tapi pada kesempatan itu juga diberikan juga kita ketemu swasta-swasta di Cina dan UAE. Nah, dari penjajakan itulah kami ya kembali ditugaskan Bio Farma untuk melakukan penjajakan vaksin dan Bio Farma adalah memang perusahaan yang sudah melakukan vaksinasi atau memproduksi vaksin sejak dulu dan merupakan peran partner daripada Menteri Kesehatan, jadi bukan sesuatu yang yang baru.

Nah, tentu ada catatan lain salah satunya di kapasitas produksi. Nah, ketika bulan Maret dan April kita juga menemui Bio Farma pada saat itu kapasitas produksi Bio Farma Rp1 miliar tanpa vaksin Covid, itu kapasitas vaksin yang Bio Farma. Jadi kalau nanti ada Covid waktu itu kami memberanikan diri menambah kapasitas, Alhamdulillah keputusan di bulan April itu akhirnya di bulan Desember dibuktikan bahwa 250 juta kapasitas ini sudah bisa jadi.

Nah, ini memang risiko-risiko yang kita hadapi tetapi ya kembali kalau kita bersama-sama bekerja sama antara Pemerintah dan Komisi VI saya yakini semuanya transparan risiko itu kita ambil. Alhamdulillah 250 juta terjadi akhirnya waktu itu juga ada *due diligence* dari COVAX dan GAVI ya untuk melihat apakah daripada produksi Bio Farma ini sudah standar internasional untuk Covid-19, alhamdulillah juga lulus. Nah, karena itu juga kita tingkatkan kapabilitas Bio Farma yang terima kasih dari Komisi VI kemarin salah satunya PMN di Bio Farma kita meningkatkan juga teknologi yang ada di Bio Farma yang tadinya hanya bisa *inactivated virus* dan protein rekombinan sekarang kita juga bisa melakukan teknologi yang lebih tinggi apakah yang namanya *Viral Vector* atau mRNA ini sekarang teknologi sedang diterapkan, tetapi kita juga tidak menutup mata kerja sama dengan BP POM apapun produksi yang kita lakukan harus juga standar Indonesia.

Alhamdulillah kita sudah mendapatkan sertifikasi dari BPOM ya untuk 100 juta pertama seperti yang di *slide*, untuk 150 juta berikutnya kita harapkan nanti di kloter ke Maret 2021 kita mendapatkan sertifikat tambahan dari BP POM sehingga 250 juta kapasitas untuk vaksin yang diproduksi Bio Farma sudah mempunyai sertifikat.

Dan tentu pada saat ini saya ingin menambahkan nanti penjelasannya tentu lebih detail dari Pak Dirut Bio Farma yang hari ini hadir. Saya ingin menambahkan mengenai vaksinasi bahwa Presiden ya sudah mengambil kebijakan yang luar biasa yaitu bagaimana rakyat yang membutuhkan diberikan vaksin gratis seperti tenaga kesehatan yang sekarang sudah

berjalan, TNI-Polri, dan semua rakyat yang memang memerlukan. Nah tentu vaksin mandiri bukan prioritas vaksin gratis adalah prioritas yang diutamakan, tetapi kita tidak bisa menutup mata juga kenapa vaksin mandiri ini juga diperlukan karena itu kita juga membuka pembicaraan secara langsung kepada Pimpinan baik yang ada di DPR ataupun yang di ada kementerian lain dan tentu tupoksinya ini di Kementerian Kesehatan kami hanya ditugasi.

Dan kalau sampai nanti pun kita ditugasin vaksin mandiri tentu seperti arahan daripada Pimpinan dan Komisi VI sendiri, ada beberapa catatan. Satu, vaksinnya berbeda jenis, jadi supaya yang gratis dan mandiri tidak tercampur jadi merk vaksinnya berbeda. Yang kedua juga utamakan vaksin gratis, jadi vaksin gratis harus berjalan 1, 2 bulan ke depan baru nanti kalau ada untuk yang mandiri setelah itu, itu yang kami dapatkan dari diskusi-diskusi kemarin. Nah, kalau memang ini menjadi keputusan secara payung hukumnya jelas, tetapi sebenarnya di dalam keputusan Kemenkes sudah ada waktu itu antara gratis dan mandiri kami tinggal menerapkan saja apakah memang ditugaskan nanti vaksin mandiri bisa berjalan atau tidak tetapi dengan catatan-catatan tadi yang sudah disampaikan.

Kalau memang vaksin mandiri ini kami lakukan ya kami siap melaksanakan karena itu kemarin juga dalam pendistribusian 1,2 juta vaksin pertama kita menggunakan sistem *barcode* ya, jadi bukan vaksinnya di dalamnya ada *chip* dimasukin ke badan kita ya tapi ini *barcode* ya ya itu *barcode* di botol vaksinnya ketika masuk ke dalam kotak vaksin kotak *file*-nya itu juga jelas. Oh bahwa *file* ini ada di kotak nomor sekian, jadi kalau di dalam kotak itu ada 10 botol diambil 1 ketahuan. Nah, kotak ini masuk ke kotak yang lebih besar lalu dimasukkan ke dalam pendingin yang dikirim melalui truk, nah truk-nya itu juga terlihat ya bawa dari Bandung ke Aceh melalui apa itu kelihatan jalannya karena sekarang teknologi *handphone* sendiri GPRS sudah ada.

Jadi kita tahu berapa jam dari Jakarta ke sana dan termometer-nya terukur, Oh ketika sampai Aceh, ketika sampai Sumatera Barat, ketika sampai Jabar yaitu di temperatur 3-5 tadi kemarin yang saya lihatin itu 5,2. Nah, setelah dibuka itu juga terdeksi. Oh itu terbuka udah diambil karena tugasnya kami kan sampai ke gubernuran, nah sampai gubernur itu itulah kenapa kemarin kita meminta dengan hormat para Pimpinan Daerah menjaga 2-8. Nah, memang *challenge* ke depannya ketika vaksin yang diadakan Pemerintah nantinya tidak vaksin yang 2 sampai 8 derajat seperti AstraZeneca ataupun Sinovac, Pfizer sendiri dan Moderna tingkat daripada penahanan suhunya 75 *minus* dan satunya – 20, nah itu ada hal-hal yang harus kita jaga.

Nah, karena itu saya ingin melaporkan dua hal 250 juta yang sudah produk yang disiapkan produksinya di Bio Farma kita nyatakan siap dan sertifikasinya sudah ada, tinggal menunggu di bulan Maret. Terima kasih atas dukungan, yang 150 juta, yang 100 juta sudah ada, tambahan sertifikatnya. Nah tentu ini terima kasih atas dukungan Komisi VI. Bukan, kapasitas produksinya. Kan nanti kapasitasnya baru bahan bakunya, nah iya iya. Jadi kalau 250 juta buat 125 juta orang kalau dua kali, nah dan tadi teknologinya sudah ditingkatkan yang tadinya teknologi hanya virus yang dimatikan

sekarang juga 3 teknologi baru sudah bisa dilakukan secara bertahap di Bio Farma.

Nah saya ingin memberi memberi kesempatan kepada Dirut Bio Farma untuk menyampaikan yang lebih detail daripada penugasan yang diberikan dan sampai mana kerja sama yang sudah dikasih oleh Menteri Kesehatan kepada kami.

Silakan.

KETUA RAPAT:

Penjelasannya mesti jujur Pak Honesti.

DIRUT PT BIO FARMA:

Siap Pak.

Terima kasih Pak Menteri.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat siang.

Salam sejahtera buat kita semua semoga sehat selalu.

Yang saya hormati Bapak Pimpinan Komisi VI DPR RI dan juga Bapak Ibu Anggota Komisi VI.

Pak Menteri BUMN serta Pak Wamen I dan Wamen II, dan peserta RDP pada siang ini.

Menyambung tadi yang disampaikan oleh Pak Menteri Pak Erick. Bio Farma memang mendapatkan penugasan dari Pemerintah dalam ini Kementerian Kesehatan, ada dua penugasan yang diberikan kepada kami. Yang pertama adalah pengadaan vaksin itu sendiri, pengadaan vaksin ini ada dua mekanisme, ada yang kita impor vaksin jadi, dan ada yang kita impor bahan baku kemudian kita produksi di fasilitas produksi Bio Farma yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri BUMN.

Nah mungkin *next slide*.

Kami akan mencoba menjelaskan sedikit lebih rinci nanti presentasi kami mohon izin Bapak Pimpinan ada dua bagian, satu yang ber-*slide*, yang kedua ada video 5 menit untuk menjelaskan lebih gamblang terkait masalah distribusi vaksin.

Jadi kalau dari keputusan Menteri Kesehatan yang ini sudah dilaporkan juga di ke Pak Presiden bahwa untuk mencapai *Herd Immunity* 70% dari masyarakat Indonesia, itu kita harus melakukan vaksinasi terhadap 181 juta orang. Nah, untuk itu karena vaksinasi ini 2 dosis artinya untuk 181 juta itu dibutuhkan 362 juta dosis, tapi karena memang dalam pelaksanaan biasanya ada vaksin yang rusak karena masih semacam itu kita diberikan semacam *allowance* sebesar 15% sehingga total kebutuhan vaksin itu seperti di *slide* itu adalah 426 juta dosis. Dari kebutuhan 426 juta dosis itu kita sudah berproses

tentunya dengan dukungan dari Kementerian BUMN juga dan dari Kementerian Kesehatan, ada beberapa jenis vaksin yang sampai hari ini kita sudah melakukan *agreement supply, supply agreement*-nya.

Yang pertama dengan Sinovac, ini ada dua mekanisme yang tadi disampaikan di awal, ada impor vaksin jadi sebesar 3 juta dosis ini sudah sampai semuanya di Indonesia dan sebagian besar 1,2 juta hampir itu udah kita diskusikan sampai ke level provinsi. Kemudian juga ada sebesar 140 juta dosis bahan baku yang secara bertahap akan masuk ke Indonesia dan nantinya akan kita proses di proses produksi Bio Farma untuk menjadi vaksin jadi.

Kemudian kita juga udah ada kontrak dengan Novavax yaitu adalah sebesar 50 juta dosis, tapi kita memiliki opsi 80 juta dosis ini juga nanti bergantung ada opsi yang bisa kita eksekusi tapi *subject to* nanti berapa total *supply* yang kita bisa dapatkan dari COVAX ataupun GAVI. COVAX, oh baik Bu, baik Bu Bu Evita. Sinovac itu adalah perusahaan vaksin Cina ya dari ya yang ada di Beijing pusat produksinya. Novavax itu adalah perusahaan US Canada Bu. Sinovac menggunakan *platform inactivated* dan Novavax ini menggunakan *platform* protein rekombinan. Di samping itu ini yang bilateral.

Kita yang nomor 3 itu adalah yang multilateral. Ada satu lembaga yang ada di bawah koordinasi WHO COVAX ataupun GAVI, tugas mereka tuh memang melakukan alokasi distribusi vaksin untuk negara-negara yang dari *Low to Medium Income Countries* karena memang kalau tidak ada lembaga seperti ini kecenderungannya negara-negara besar negara-negara kaya raya mereka melakukan borong *supply* vaksin. Seperti contoh, Amerika itu dia melakukan pembelian sebesar lebih dari tiga kali populasinya mereka, Inggris juga melakukan hal yang sama.

Kalau tidak ada lembaga seperti ini kemungkinan negara-negara dengan *Low to Medium Income Countries* ini mereka tidak akan mendapatkan *supply* vaksin sehingga memang ini satu lembaga dan mereka memberikan vaksin ini gratis untuk lembaga negara yang sudah ikut dalam COVAX *Facility* tersebut. Nah, dari COVAX ataupun GAVI ini kita sudah mendapatkan komitmen untuk *supply* vaksin sebesar 54 juta dosis, tapi kita juga memiliki opsi kalau seandainya mereka memiliki lebih *supply* kita bisa mendapatkan *another* 54 juta dosis lagi. Artinya memang kalau 108 juta dosis kalau memungkinkan atau lebih kurang 20% dari total populasi yang berhak untuk mendapatkan vaksin.

Nah di samping ini kita juga ada kerja sama yang sudah kita sepakati dengan AstraZeneca ini adalah perusahaan Eropa Inggris, basis teknologi mereka adalah Adenovirus ataupun *viral vector*. Kita juga sudah melakukan kesepakatan *supply* dengan mereka sebesar 50 juta dosis dan juga ada opsi 50 juta tergantung nanti apakah COVAX ataupun GAVI bisa melakukan *supply* kita untuk level maksimum, kalau seandainya COVAX memberikan kita sampai 108 juta dosis kemungkinan yang opsi ini tidak akan kita eksekusi.

Ada yang kita lagi berproses negosiasi dengan Pfizer ini adalah perusahaan Amerika dia bersama dengan perusahaan Jerman pemilik *platform*-nya BioNTech mRNA *platform*-nya tadi yang disampaikan Pak Menteri, ini adalah *platform* baru yang baru muncul teknologinya pada saat

Covid-19 ini. Nah, kita lagi proses negosiasi mudah-mudahan dalam minggu ini Pak Wamen I mendukung kita untuk melakukan proses negosiasi dengan Pfizer ini di mana komitmen yang nanti akan kita tawarkan adalah untuk bisa mensuplai sebesar 50 juta dosis.

Ada juga beberapa jenis vaksin lain yang sudah ada di keputusan Menteri Kesehatan, ada 7 jenis vaksin yang ada di KMK tersebut dan ada dua yang kita belum melakukan semacam negosiasi dengan mereka yaitu Moderna. Moderna ini mirip *platform*-nya dengan Pfizer ini perusahaan Amerika.

Dan satu lagi adalah perusahaan namanya Sinopharm tapi dalam hal ini kita kerjasamanya dengan G42 perusahaan dari Emirat Arab seperti tadi disampaikan oleh Pak Menteri.

Jadi total jumlah dosis yang sudah ada dalam kesepakatan kita termasuk yang dalam proses negosiasi itu adalah sebesar 329 juta dosis. Kalau kita masukkan dengan yang lagi proses ataupun potensi itu ada sekitar 438 juta dosis tapi juga kalau seandainya kita mendapatkan *full supply* dari COVAX ataupun GAVI kemungkinan kita akan memiliki 663 juta dosis sementara kebutuhan adalah 426. Jadi kita berusaha program ini bisa berjalan *supply*-nya sehingga memang target dari Pemerintah Pak Presiden dalam hal ini untuk bisa menyelesaikan program vaksinasi dalam waktu setahun dengan *supply* yang bisa kita amankan mudah-mudahan bisa kita realisasikan bersama-sama.

Next slide.

Kemudian berapa progress yang mungkin sebagai tambahan dari *slide* pertama terkait vaksin Sinovac. Ini yang kita impor jadi 3 juta ini semuanya sudah datang, 1,2 juta itu sudah kita distribusikan ke provinsi, ada sebesar 1,8 juta lagi yang masih ada di *inventory* di gudangnya di *warehouse*-nya *cold storage*-nya Bio Farma dan kita menunggu instruksi dari Kementerian Kesehatan untuk distribusikan ke provinsi. Kemudian yang vaksin ini juga mendapatkan *Emergency Use Authorization* dari Badan POM dan juga sudah mendapatkan fatwa halal dari MUI dan Sertifikasi Halal dari BPJPH Kementerian Agama dan juga untuk vaksin ini sudah dilakukan penyuntikan perdana pada tanggal 13 Januari minggu lalu.

Di samping itu ada juga yang berbentuk *Bulk* ataupun bahan baku dari Sinovac ya dari total 140 juta dosis *supply* kita terhadap *Bulk* ini 15 juta dosis sudah datang tanggal 12 Januari yang lalu menggunakan Garuda dan kita sudah mulai melakukan proses produksinya dari tanggal 14 Januari. Jadi dalam seminggu itu ada tiga *batch* proses produksi kita dan satu *batch* itu kira-kira 1 juta dosis, sampai hari ini saya dapat laporan terakhir sudah ada 3 juta dosis yang sudah selesai diproduksi dan kita lagi proses *quality control* untuk nanti bisa kita kirimkan ke Badan POM untuk mendapatkan *lot release*, baru kita bisa distribusikan kalau seandainya sudah mendapatkan *lot release* dari Badan POM.

Terkait juga yang uji klinis yang ada di Bandung ini kita sudah menyelesaikan semua penyuntikan 2 dosis terhadap semua relawan 1620 dan kita masih melanjutkan periode *monitoring* karena memang total waktu yang dibutuhkan untuk uji klinis ini adalah 6 bulan, tapi dengan kebijakan

pandemic dari WHO dan juga dari Badan POM untuk mengeluarkan EUA *interim report* 3 bulanan bisa dijadikan dasar untuk mendapatkan *Emergency Use Authorization* dari Badan POM dan Alhamdulillah kita sudah mendapatkan EUA tersebut.

Kemudian *next slide*.

Novavax ini kita sudah tanda tangan tanggal 30 Desember yang lalu seperti sampaikan tadi di awal terkait kebutuhannya saya percepat saja.

Next slide.

Kemudian juga dengan AstraZeneca juga sudah ada kesepakatan dengan opsi. Kemudian dengan Pfizer BioNTech ini juga masih proses negosiasi.

Next slide.

Nah terkait masalah bahan baku ya yang yang kita juga dapatkan dari Sinovac dan kita segera proses produksi, ini adalah jadwal kedatangan bahan baku. Tahap pertama itu sudah datang 15 juta dengan *overflow* 10% artinya kita mendapatkan tambahan 10% jadi 16,5 juta dosis sudah datang, ini yang sekarang sedang lagi kita proses produksi. Kemudian rencana kedatangan berikutnya untuk 140 juta dosis kita lakukan dalam waktu satu semester, jadi kita lakukan percepatan. Rencana awalnya itu adalah selama 10 bulan dari total 140 juta dosis itu tapi kita bisa meyakinkan Sinovac untuk bisa mempercepat karena memang kebutuhan kita untuk program vaksinasi juga cukup tinggi.

Next slide.

Nah terkait kesiapan fasilitas produksi tadi Pak Menteri sudah menyampaikan kita memiliki dua fasilitas yang kita siapkan ya dengan total produksi 250 juta dosis dan juga ini yang untuk yang 100 juta dosis pertama kita sudah mendapatkan EUA dari Badan POM dan juga untuk produknya sendiri sudah mendapatkan sertifikasi halal dari BPJPH. Ini adalah jadwal produksi kami yang yang yang kolom kedua dari kiri itu total *output* kita untuk bulan Januari sampai ke Agustus 2021, kemudian yang kolom paling kanannya adalah total vaksin dalam itu yang nanti akan dikirimkan ke provinsi-provinsi di Indonesia.

Next slide.

Ini lebih detail tentang jadwal produksi untuk yang 15 juta jadi kita tiap minggu itu melakukan 3 *batch production* ya satu *batch*-nya adalah 1 juta jadi kita akan bisa melakukan dalam seminggu itu 3 juta dosis untuk semua produksinya. Kemudian selanjutnya terkait masalah kapasitas *storage* karena memang vaksin ini harus disimpan standarisasinya dalam suhu 2 sampai 8 kita juga harus memastikan bahwa standar kualitas dari vaksin ini memang disimpan dalam standarnya internasional karena kita tidak mau vaksin yang sebenarnya bagus tapi mengalami kerusakan karena memang tidak memiliki standarisasi dari sisi penyimpanannya. Kita menyiapkan ada 10 *coldroom* di di Bio Farma dan ini juga kapasitas sudah sangat cukup untuk bisa menyimpan semua vaksin ini sebelum kita kirimkan ke provinsi.

ANGGOTA:

Berapa lama Pak vaksin itu bisa disimpan Pak?

DIRUT PT BIO FARMA:

Kalau dalam suhu dalam suhu yang benar Pak 10 sampai 8 itu sampai setahun lebih Pak, satu sampai satu setengah tahun bisa kita simpan sebelum dia digunakan. Kemudian juga kita juga melakukan monitoring ya stabilitas dari suhu yang ada di itu dari secara teknologi.

Kemudian *next*.

Distribusi vaksin sendiri grup kami ya Bio Farma dengan anak perusahaannya Kimia Farma dan Indofarma kita juga sudah memiliki 48 cabang *warehouse* yang ada di seluruh Indonesia ini nanti juga seandainya ada ada konsep vaksin mandiri ini juga bisa kita optimalkan. Kemudian dari sisi teknologi yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi kita memang sudah menyiapkan *digital solution* yang bersifatnya *end-to-end* mulai dari pabrik kami proses produksi proses distribusi dan sampai nanti di titik serah. Kalau seandainya yang dikatakan pemerintah itu adalah di provinsi memang itu bisa di monitor *real-time* kemana saja dia dikirimkan, jumlah *file*-nya berapa, Siapa yang menerima, suhu selama penyimpanan, dan segala macamnya untuk memastikan bahwa semua vaksin ini memang disimpan didistribusikan dalam suhu yang sesuai dengan standar dan juga diterima di lokasi yang memang sudah disepakati dengan pemerintah.

Next slide.

Ini adalah skenario nanti ini nanti akan lebih bermanfaat pada saat kita melakukan proses vaksin mandiri.

Next slide.

Kemudian juga ini adalah gambaran dari skema IoT yang kami desain kami rancang kerja sama dengan Telkom untuk bisa memastikan proses produksi dan juga sampai *delivery* dari vaksin ini berjalan dengan baik.

Nah mungkin untuk penutup saya mohon izin Bapak Pimpinan ada video singkat nggak singkat juga sih 5 menit untuk menggambarkan lebih jelas tentang proses distribusi vaksin ini. Mungkin bisa ditayangkan.

(PENAYANGAN VIDEO)

Baik.

Untuk mempersingkat waktu. Kemudian juga mungkin kalau ada gangguan teknis kita kembali ke *slide* saja untuk. Di samping ada digitalisasi dalam proses distribusi ini kami juga menyiapkan semacam *dashboard-dashboards* yang ada di Bio Farma untuk sebagai alat *reporting* dan juga *monitoring* untuk pengawasan semua vaksin yang di distribusikan dan di *dashboard* yang kami desain tersebut memang kita bisa melakukan *real-time monitoring* kalau seandainya ada pengiriman dalam bentuk sekian banyak *file doc* vaksin pakai menggunakan jalur darat maupun jalur udara memang kita bisa memastikan bahwa semua itu di distribusikan mulai dari pabrik dia sudah sampai mana, dia berhenti di mana dan sampai ke tujuan. Nanti juga ada

serah terima yang langsung ke *record* dan juga *monitoring* dari apakah selama proses pengiriman itu dia berada pada suhu yang standar.

Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan sebagai tambahan tentang pengadaan dan juga distribusi vaksin.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

MENTERI BUMN (ERICK THOHIR):

Pak Ketua, saya sebagai penutup bahwa kami juga tidak hanya fokus di pengadaan atau produksi tetapi yang tidak kalah pentingnya kami terus memantau vaksin merah-putih. Kami di Bio Farma dan tentu kementerian sekarang terus melihat perkembangan vaksin merah-putih karena kita tahu ini kan hampir Rp70 triliun uang kita dibelanjakan dan vaksin ini tidak lain seperti flu yang di mana tetap kita harus taat prokes yaitu memakai masker, menjaga jarak, cuci tangan, tetapi setiap tahun sementara harus divaksin, jadi sayang sekali kalau Rp70 triliun itu harus terus mengalir keluar negeri.

Nah, karena itu vaksin merah-putih kami sangat serius dan karena itu Bio Farma saya minta terus memantau perkembangan vaksin merah-putih dan kita harus dan kita sudah bekerja sama dengan para universitas-universitas ada UI, ITB, Unair, UGM, Unpad. Dan kalau kita lihat UGM dan Unpad itu memakai sistem protein rekombinan yang di mana kemarin terima kasih Komisi VI kita bisa ada PMN meningkatkan teknologi daripada produksi kita yang tadinya hanya virus dimatikan sekarang ada lagi protein rekombinan.

Bahkan kalau Unair ini lebih kepada *viral vector* juga teknologinya kita sudah siapkan, jadi kalau sampai nanti yang nemuin ini kita juga bisa siapkan. Lalu juga ITB intinya sama dia ada dua percobaan protein rekombinan dan juga *viral vector*. Dan UI ini lebih tinggi lagi pakai mRNA seperti Pfizer, ini juga alhamdulillah dengan dukungan Komisi VI kemarin kita juga sudah tingkatkan kita punya teknologi.

Jadi vaksin merah-putih ya walaupun tahun ini kita fokus dari yang ada tetapi ya mudah-mudahan di tahun 2022 ataupun 2023 ya kita punyalah bismillah bisa vaksin merah-putih walaupun hari ini masih dalam langkah awal ya belum ada uji klinis 1, 2, 3 belum, kita juga belum nerima apa sit vaksinnnya belum ya tapi kita coba mendoronglah vaksin merah-putih ke depan kalau bisa kita bisa tidak tergantung dari negara lain gitu cuman kondisinya hari ini seperti itu.

Terima kasih.

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.) :

Jadi saya rasa juga masyarakat rakyat Indonesia juga awam. Bapak menyebutkan tadi MRA bisa apa kita tuh *nggak* ngerti itu tuh apa bedanya Protein apa protein apa segala. Tolong dijelaskan Pak sebenarnya apa yang lebih tinggi itu lebih tingginya tuh di mana gitu tolong dijelaskan Pak.

MENTERI BUMN (ERICK THOHIR) :

Saya menambahkan cuman biar Pak Hones ahlinya, saya juga bukan ahlinya. Tapi kami berprinsip seperti ini bahwa semua vaksin yang terdaftar di WHO itulah vaksin yang kita kerja samakan atau mau dikerjasamakan, jadi panduannya satu WHO. Jadi tidak ada vaksin di luar WHO kita kerja sama, kita kan itu menyalahi.

Yang kedua juga yang sudah melalui uji klinis 1, 2 dan sekarang sudah ada yang ketiga itu yang kita ambil. Jadi kita *nggak* bicara misalnya tiba-tiba kerjasama sama titik-titik *nggak* ada di *list* WHO, uji klinisnya tidak terbuka secara transparan apalagi jelas kalau yang akan dilakukan di Indonesia kita juga melakukan dua persyaratan yaitu BP POM dan tentu kehalalan. Nah kalau masalah detail vaksin saya juga takut salah karena saya bukan ahlinya tetapi yang jelas kalau *inactivated* virus adalah virus yang dimatikan di mana diambil lalu dijadikan vaksin yaitu ini teknologi di tahun 70 seperti polio atau meningitis atau kan itu. Yang Sinovac, Sinopharm ya sementara itu dua ya.

Lalu ada protein rekombinan itu sebenarnya virus mohon dikoreksi, virus hidup virus hidup kan? virus hidup *spike*-nya itunya cangkangnya apa diambil, nah itu sekarang sedang dilakukan apa Novavax seperti itu ataupun yang merah-putih tadi banyak yang melakukan itu yang tadi saya sebutkan. Viral vector itu seperti kayak kloning ya. Coba takut salah kalau yang ini udah terlalu. Silakan Pak.

DIRUT PT BIO FARMA:

Baik Pak Menteri.

KETUA RAPAT:

Singkat saja Pak ya biar kita masuk ke pertanyaan.

DIRUT PT BIO FARMA:

Iya. Jadi ada ada beberapa *platform* virus yang sudah dikembangkan tadi yang disampaikan oleh Pak Menteri *inactivated* adalah teknologi yang paling lama tapi paling *proven* secara jangka panjang itu adalah virus utuh dimatikan, diperbanyak, nanti dijadikan vaksin.

Kemudian yang kedua protein rekombinan, kalau Bapak Ibu lihat gambar virus itu ada yang ujung-ujung nah itu *spike*-nya itu yang diambil sebagai dasar untuk bikin *set vaksin*. Ada yang *DNA virus*, dia menggunakan *cell line* dari mamalia atau apa untuk mengembangbiakan virusnya untuk sebelum nanti dijadikan vaksin. Dan jadi ada mRNA, mRNA ini atau DNA dia mereplikasi RNA ya di replikasi nanti itulah yang dijadikan sebagai sumber dari vaksinnya. Nah yang mRNA-mRNA inilah yang vaksin yang terbaru ya teknologinya dan baru muncul pada saat pandemi ini lebih kurang begitu Bu. Yang Pfizer, Moderna, Pfizer, Moderna itu dia pakai mRNA, iya.

KETUA RAPAT:

Sudah ngerti Pak? sudah kita.

Baik.

Terima kasih kepada Saudara Menteri BUMN dan Direktur Utama PT Bio Farma Persero yang telah menyampaikan penjelasan.

Selanjutnya kita akan memberikan kesempatan kepada para Anggota untuk yang hadir untuk memberikan tanggapan atau masukan. Ada di meja Pimpinan ada 13, 13 dikali 3 lumayan ini. Saya mulai saja dari sebelah kiri Ibu Nevi Zuairina, silakan Bu Nevi.

F-PKS (Hj. NEVI ZUAIRINA):

Terima kasih Pimpinan atas kesempatan yang diberikan oleh Pimpinan dan Anggota Dewan Komisi VI.

Yang kami hormati dan mitra kerja yang kami hormati Pak Menteri dan Pak Dirut Bio Farma.

Segala hal yang akan saya sampaikan sudah dijawab semua oleh Pak Menteri dan Pak Dirut, jadi saya hanya memastikan saja berapa hal Pak Menteri. Pastikan vaksin di kita ini Pak Dirut aman, halal, berkhasiat, dan berkualitas, itu yang pertama.

Yang kedua tolong pastikan bahwa vaksin yang kita punya ini itu komersil setelah pandemi reda Pak, jadi istilahnya jangan sampai rakyat itu mendapatkan vaksin dengan susah seperti susahnya kita sekarang untuk dapatkan swab, PCR, Antigen, susah Pak sekarang kita artinya kita harus pergi ke rumah sakit ini susah. Jadi kita harapkan vaksin sangat mudah didapatkan oleh masyarakat dan gratis sehingga kita jangan sampai nanti keluar kata-kata dari rakyat negara ini berbisnis dengan rakyat Pak itu jangan sampai karena kalau ini kata-kata keluar dari rakyat tentu kita DPR jadi malu Pak karena kita adalah wakil rakyat sehingga pastikan komersil setelah pandemi ini reda. Terus Pak mungkin saya juga ingin bertanya tentang masalah efikasi Pak Dirut, efikasi Sinovac yang kita pakai 65%.

Itu saja, terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik.

Terima kasih Bu Nevi.

Silakan Pak Andre Rosiade.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Ini lengkap ini Dapil Sumbar II, Sumbar I lanjut.

Terima kasih Pimpinan.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih Pimpinan, Pak Menteri, Pak Wamen I, Pak Wamen II, Pak Dirut Bio Farma, lalu ada Pak Wamen III di pojok itu.

Pertama saya ingin bicara di luar vaksin dulu sebentar. Saya Pak Menteri terus terang kita tahu Pak Menteri lalu Presiden punya kebijakan akan melakukan pembangunan luar biasa tahun ini dan tahun depan pabrik Pupuk akan dibangun ya. Lalu ada 14 Project Pertamina yang akan dilelang segera ya bangun kilang, bangun lain-lain, pembangkit juga akan dilakukan. Nah Indonesia punya yang namanya Rekayasa Industri ya PT Rekind ya EPC yang kalau kita bangun lagi dari awal itu butuh \$500 juta sampai \$1 miliar karena mereka punya pengalaman, punya SDM yang luar biasa, bahkan banyak Dirut-dirut Pak Menteri itu adalah orang-orang Rekayasa Industri, Dirut Pertamina, Dirut apa namanya Dirut Pupuk Indonesia bahkan Menteri ESDM pun juga orang rekayasa industri.

Nah saya ingin mengusulkan kepada Pak Menteri saat ini rekayasa industri butuh \$100 juta Pak Menteri, saya usulkan Pak Menteri menerbitkan saham baru untuk rekayasa industri di mana \$25 juta ini nanti bisa *chip-in* dari Pertamina, \$25 juta yang kedua dari Pupuk Indonesia, \$25 juta yang ketiga dari PLN, dan \$25 juta yang keempat dari MMID sehingga uangnya betul-betul masuk ke *cash*-nya Rekayasa Industri. Sehingga Rekind bisa punya *cash flow*, punya likuiditas dan bisa ya menjadi EPC untuk membangun investasi maupun pabrik kilang atau apapun nanti yang akan kita bangun oleh BUMN nanti. Itu usulan saya Pak Menteri ya mudah-mudahan saya percaya Pak Menteri BUMN Pak Erick Thohir Patriot Insya Allah pasti akan menyelamatkan rekayasa industri, itu pertama.

Yang kedua soal vaksin. Urusan vaksin ini terus terang kalau kita mendengar keterangan Pak Menteri, Pak Dirut Bio Farma sebenarnya kita sudah melihat bahwa Pemerintah Republik Indonesia itu sangat serius bersungguh-sungguh tidak ada keinginan untuk mengorbankan rakyat Indonesia, tapi kan permasalahan kita sekali lagi soal vaksin ini kan soal informasi *hoax*, ini yang paling berat, ini yang paling besar masalah Covid ini informasi *hoax* bahkan istri saya sering dapat WA dokter spesialis rumah sakit ini menolak vaksin karena ini ini atau ahli virus ini tapi namanya *nggak* ada, tapi WA itu ke mana-mana.

Nah, harapan saya di Bio Farma dan Kementerian BUMN jauh lebih optimal untuk melakukan sosialisasi memerangi *hoax* ini ya kalau kita mendengar keterangan kita tidak usah ragu lagi bahwa vaksin Sinovac maupun vaksin-vaksin lain ya yang ada yang akan kita beli di 2021 ini Insya Allah memang inilah vaksin yang bisa menghadapi Covid-19 tinggal memang sekali lagi mau vaksin apapun juga kita sudah punya vaksin polio, vaksin apapun vaksin cacar pun kita divaksin kan kita kena cacar juga kan itu faktanya. Tapi vaksin ini adalah meningkatkan imunitas kita, imun kita membangun imun kita, kalau kita divaksin suatu saat kita kena mungkin kita hanya kenanya OTG atau gejala ringan. Nah, sekali lagi Bapak Pak Menteri, Pak Dirut Bio Farma tolong lawan *hoax* ini ya, sosialisasikan yang tepat karena sekali lagi vaksin ini bukan masalah ketidakmampuan vaksin kita, tapi soal vaksin Covid ini yang saya lihat adalah informasi *hoax* yang terlalu berlebihan ya dan membahayakan bangsa dan negara kita.

Mungkin itu saja, terima kasih, selamat bertugas Insya Allah Indonesia segera bebas dari Covid, Indonesia segera bangkit dan kita tidak krisis lagi.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pak Herman Khaeron ini habis bertemu Presiden Jokowi dadah.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih Pak Andre.

Silakan sebelah kiri Pak Khilmi.

F-P.GERINDRA (KHILMI):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang saya hormati Ketua Komisi VI beserta Anggota.

Yang saya hormati Bapak Menteri, Pak Wamen I, II, Pak Sesmen dan Pak Wamen III.

Jadi, ada di pojokanlah pasti, ada Wamen III itu di Komisi VI pasti aman. Jadi saya sangat mendukung sekali atas pengembangan vaksin-vaksin yang dilakukan di Indonesia ini dan semua perguruan tinggi juga udah mengembangkan. Tapi saya mohon Pak Menteri ini kan kadang-kadang riset-riset yang dilakukan oleh perguruan tinggi ini kan kadang-kadang menggunakan kan uang CSR, tapi setelah dia itu ada kegagalan dia di permasalahan masalah hukum seperti yang seperti mobil listrik dulu. Ini jangan sampai nanti dia diambil orang asing udah menghasilkan mobil listrik yang bagus, di Indonesia orang itu udah *nggak* di sini lagi kan gitu.

Jadi saya berharap banget ini saya juga pernah kunker di Thailand itu juga penemu-penemu buah-buah yang bagus itu juga orang-orang dari Indonesia dari IPB itu tapi dia tidak mau kembali ke Indonesia lagi. Jadi saya berharap ke depan ini penemu-penemu ini dihargailah walaupun ada kegagalan yang sedikit atau apa ada perbaikan itu jangan sampai nanti kejaksaan itu menjadikan dia tersangka gitu.

Jadi saya sangat mendukung Bio Farma untuk menghadapi Covid-19 ini biar cepat selesai dan saya berharap ini dari Kementerian BUMN ini kan banyak yang disampaikan program dari Pak Jokowi akan memperbesar investasi di 2021 ini kita ini sangat mendukung sekali Pak ya investasi yang dilakukan, tapi harus dipikirkan apakah keuangan kita ini mencukupi seperti kita membangun kilang yang besar-besaran padahal di tahun 2030 ya kemarin Pak Demer menyampaikan kita akan apa mobil dengan bahan bakar fosil ini akan berhenti atau pemakaiannya berkurang jadi ini kan harus dipikirkan sekali gitu supaya ekonomi kita ini nanti jangan sampai anjlok.

Dan saya berharap Pak Menteri yang ada sekarang ini seperti Pak Lutfi-lah itu baru jadi Menteri 3 hari menemukan harta karun Rp500 triliun saya baca Pak loh yang Rp500 triliun itu apa gitu loh eh *nggak* taunya burung walet padahal burung walet tadi saya kali kan sama Pak Amin ini saya *nggak*

tahu itungannya benar Pak Amin ini kalau segitu tuh Rp25 juta per kilo kali 1 ton mungkin Rp25 miliar. Kalau produksi di Indonesia Pak saya kan juga punya kecil-kecilan walet lah itu produksi di Indonesia itu cuma 75 ton setahun yang bagus yang harga Rp25 juta, yang harga jelek yang ada item-itemnya itu 35 ton jadi seluruhnya itu 107 ton. Jadi coba ini ke depan ini sama-sama bagus gitu loh mengharapkan 1 tahun dapat Rp500 triliun eh *nggak* tahunnya cuma Rp18 triliun setahunnya kan sangat jauh gitu loh itung-itungannya itu.

Jadi saya berharap kita ini bukan zaman pencitraan lagi ya kita ini mari kita membangun negara ini dengan baik pembangunan ini jalan dan saya berharap ini Pak Menteri lewat Pak Menteri BUMN ini bagaimana kita menyelamatkan industri yang ada sekarang ini industri-industri yang jalan ini loh, jangan kita berharap investasi besar-besaran tapi industri yang ada ini mati. Jadi dukungan Pemerintah ini tentang permodalan ini ya yang harus diselamatkan kan industri yang menyerap tenaga kerja sekarang ini ya alhamdulillah saya selama 2011 pernah mengajukan kredit itu di Bank Mandiri sampai pergantian Direksi itu berapa kali belum pernah dapet Pak sampai sekarang, tapi alhamdulillah 1500 karyawan itu terselamatkan dengan saya *nggak* punya duit gitu loh nah ini kan yang harus dilakukan gitu loh padahal saya minta kreditnya *nggak* banyak Rp10 miliar itu udah saya lakukan gitu loh.

Jadi saya berharap penyelamatan yang harus dilakukan negara kepada industri yang ada itu bagaimana ini sebetulnya bukan tugas Pak Menteri BUMN ya karena Pak Menteri ini dekat dengan Presiden supaya disampaikan, jangan sampai Menteri-menteri yang ada ini menyampaikan yang salah.

Itu aja dari saya Pak Menteri dan Ketua.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selanjutnya Pak Idris Laena silakan.

F-P.GOLKAR (Ir. H.M. IDRIS LAENA, M.H.):

Terima kasih Pimpinan.

Pak Menteri beserta jajaran.

Para Anggota Dewan yang saya banggakan.

Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan.

Saya mencoba memahami Pak penjelasan dari Pak Menteri maupun dari Pak Dirut Bio Farma. Jadi dari sini saya bisa mencoba mengambil satu kesimpulan awal buat saya pribadi gitu bahwa ternyata tepat sekali ternyata Presiden menunjuk Menteri Kesehatan yang notabene eks Wakil Menteri

BUMN untuk menjadi Menteri Kesehatan karena memang persoalan yang kita hadapi ternyata masalah pengadaan dan distribusi khususnya terkait masalah vaksin ini.

Tapi terus terang jadi penjelasan hari ini saya makin merasa perlu mendapatkan penjelasan lebih detail lagi Pak Dirut karena tadi sudah disampaikan dari ada 8 yang diberikan tanggung jawab untuk dari Bio Farma ini telah menunjuk kerja sama Sinovac, Novavax, Covax, AstraZeneca, kemudian Pfizer itu baru lima, saya kalau Moderna, Sinopharm, merah-putih kita *nggak* hitung karena memang belum ada komitmen apa-apa. Dari total 329.504.000 kemudian total *bending* yang sudah nego *bending* yang sudah di ini 663.504.000 kebutuhan kita 426.000 eh 200, 426.800.000 kebutuhan.

Saudara-saudara sekalian,

Realisasinya yang ternyata kita tonton di TV itu *finish* produk baru 1,2 juta + 1,8 juta, 3 juta itu yang kita tonton semua yang berharap bahwa sebetulnya persoalan vaksin ini bisa teratasi tidak Pak. Kalau dari 426.800.000 kebutuhannya yang *finish* produk yang ada sekarang yang datang 1,2 juta + 1,8 juta baru 3 juta distribusikan tanggal 3 sampai 6 Januari 2021 dan penyuntikan awal 13 Januari itu jumlahnya baru 3 juta, baru *nol koma nol sekian persen* dari total kebutuhan kita.

Bagaimana dengan yang lain? yang lain Novavax baru komitmen betul pak Dirut? AstraZeneca baru komitmen, betul? kemudian Pfizer komitmen, kemudian yang realisasi berikutnya adalah baru dan setengah setengah jadi yaitu produk setengah jadi 15 juta dari Sinovac yaitu akan didistribusikan Februari sampai Desember 2021. Jadi sebetulnya barang yang akan kita kelola yang akan dikelola oleh Bio Farma diadakan oleh Bio Farma ini baru sampai dengan Januari 2021, Februari 2021, Maret 2021, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September totalnya baru 122.504.000 dalam bentuk *bulk* artinya baru mau di setengah jadi tentu mau diproduksi kembali.

Sehingga Bapak Ibu sekalian menurut saya informasi ini harus sampai kepada masyarakat, jangan sampai masyarakat keliru beranggapan bahwa begitu disuntikkan Januari sampai April kemudian semuanya sudah bisa mendapatkan vaksin. Kita Anggota DPR sampai sekarang yang tiap hari berhadapan dengan konstituen kita juga belum, mencoba sabar, tetapi saya kira Bapak Ibu sekalian informasi ini Pak Dirut ini perlu disampaikan kepada masyarakat supaya masyarakat tahu.

Nah oleh karenanya Bapak Ibu sekalian. Hari ini tentu berbeda konteksnya antara Komisi VI dengan Komisi IX ketika berdiskusi atau melakukan Rapat Kerja atau Rapat Dengar Pendapat dengan Bio Farma. Kalau Komisi IX lebih kepada bagaimana penyuntikannya, bagaimana dosisnya, dan lain sebagainya, kalau kita tentu dilihat dari sisi korporasinya karena Komisi VI memang tugasnya mengawasi jalannya kebijakan korporasi dari masing-masing BUMN yang ada di mitra Komisi VI.

Saudara-saudara sekalian,

Pertanyaan berikut saya tadi ini mengenai apa yang saya uraikan mudah-mudahan salah mohon dikoreksi Pak Dirut, dijelaskan kembali. Betulkah apa yang saya sampaikan bahwa sampai dengan pada bulan September 2021 artinya penyuntikan itu baru bisa dilaksanakan tidak sampai

100 juta dari total kebutuhan 426.800.000, sebetulnya sampai kapankah pengadaan kita? ini baru bicara pengadaan Pak belum bicara penyuntikan, penyuntikan itu urusan Menteri Kesehatan.

Jadi ini panjang urusan ternyata, sementara kalau kita ditanya orang mentang-mentang Komisi VI, wah itu Pak Erick itu yang menjadi tanggung jawab Insya Allah bulan April selesai semua, ternyata *nggak* begitu Pak, betul Pak betul. Saya selalu keliru menjelaskan masyarakat insya Allah Januari sudah datang penyuntikan pertama dan sampai April kita sudah bisa selesai ternyata pengadaan saja sampai September 2021 baru 122 juta itu pun dalam bentuk dosis *bulk* artinya setengah jadi, itu pun masih perlu diproduksi.

Yang kedua pertanyaan kepada Bio Farma ini tadi kemarin sore saya rapat dengan Menteri Keuangan dan Dirjen Anggaran, jadi Pak betul Pak Erick menyampaikan bahwa kurang lebih anggaran yang disiapkan untuk vaksin ini Rp71 triliun artinya kalau Rp71 triliun ini bukan uang kecil Pak. Nah, pertanyaan saya posisi Bio Farma tentu sebagai BUMN korporasi yang dalam hal ini punya bagaimana sebetulnya aturan main Bapak dengan Menteri Kesehatan gitu, jadi apakah hanya menjalankan tugas? Nah, tentu beda misalkan kalau PSO yang diberikan kepada Pelni misalkan, Pelni itu menjual tiket hanya sekian padahal produksinya sekian ya sisanya *Public Service Obligation* di *supply* gitu, ini Bapak sebetulnya hanya kerja baktikah atau memang ada kelebihan.

Nah, saya dulu berpikir begini Pak Erick, kenapa kemudian saya menganggap bahwa kenapa Menteri BUMN yang diberikan tugas ini, saya berpikir bahwa akan ada vaksin mandiri oh wajar dong kalau BUMN menjual ya pantas dong karena memang BUMN, salah satu dari empat tugas BUMN itu mencari keuntungan sebesar-besarnya. Nah, tapi kemudian ketika Presiden mempidatkan menyampaikan bahwa semua digratiskan tentu menjadi pertanyaan saya Bio Farma terus dapat dari mana? Nah, ini tolong juga dijelaskan dari sisi korporasinya, ini kita kan Komisi VI Pak yang membahas tentang itu.

Saya kira itu sementara ini teman-teman, silakan di-elaborasi lagi barangkali banyak hal sebetulnya yang perlu kita tahu supaya masyarakat paham Pak Erick. Sekali lagi saya keliru, saya pikir bulan April selesai semua ternyata panjang ini urusan dalam 1, 2 tahun, 3 tahun ini selesai belum tentu bisa selesai.

Saya kira demikian Pak Menteri, Pak Dirut, Pak Ketua.

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dari sebelah kiri Pak Abdul Hakim Bafagih.

F-PAN (ABDUL HAKIM BAFAGIH):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Yang saya hormati Pimpinan dan juga Anggota Komisi VI baik yang hadir secara fisik maupun secara virtual.

Yang saya hormati Pak Menteri BUMN, Pak Wamen I, Wamen II, Pak Bio Farma dan juga Wamen III yang sering disebut.

Pertama saya ke Pak Menteri. Untuk penyerapan anggaran 2020 kami mengapresiasi Pak dengan apa tingkat penyerapannya luar biasa bagus dan dengan anggaran yang udah di-*refocusing* dan direalokasi kemarin itu pencapaiannya *panjenengan* luar biasa terbukti dari beberapa rata-rata kenaikan saham-saham BUMN yang *listing* di Bursa Efek itu sebesar 17,35% mudah-mudahan ke depannya nanti bisa bisa naik lebih tinggi lagi Pak Menteri.

Kemudian ada satu yang memang naiknya luar biasa itu di Antam Pak Menteri ya kalau lihat 3 bulan terakhir itu kenaikannya Antam itu 230% kalau 6 bulan 380%. Nah cuma Pak Menteri ini yang ingin saya tanyakan itu itu kejadian yang Antam digugat seperti bagaimana Pak ya karena yang kemarin digugat 1136 yang terakhir 43 kilo nah ini jangan sampai kepercayaan masyarakat terhadap BUMN itu menurun padahal sepanjang tahun ini kepercayaan masyarakat ke BUMN sudah bagus dan juga menjadi lokomotif pergerakan ekonomi di masa sulit apalagi ada SWF Pak ya atau LPI itu bahasa Indonesianya itu, itu kan diharapkan bisa menjadi motor nah di Antam ini seperti bagaimana itu Pak jangan sampai nanti ada yang indikasi-indikasi yang kurang baik.

Dan terkait *support panjenengan* ke UMKM itu saya apresiasi Pak dan mudah-mudahan nanti bisa ada instruksi dari Pak Menteri terkait GeNose Pak, jadi mungkin bisa nanti yang disediakan di Airport-airport itu di Angkasa Pura bukan lagi Antigen yang mungkin impor atau produksinya mahal tetapi GeNose atau di beberapa BUMN-BUMN yang kalau saya dengar ini kan kalau mau masuk di BUMN atau di kementeriannya sangat ketat harus di Swab Antigen atau PCR itu bisa menggunakan GeNose gitu Pak.

Kemudian untuk vaksin. Ada beberapa pertanyaan saya ke Pak Dirut Bio Farma, tadi namanya siapa Pak Ketua? Pak Honesti.

KETUA RAPAT:

Pak Honesti.

F-PAN (ABDUL HAKIM BAFAGIH):

Pak Kejujuran, *nggih*. Iya Pak, saya sama seperti tante Evita, Bu Evita pusing juga sebenarnya dengerin RNA ya kan, terus sub protein, kemudian ada inactive virus dan sebagainya dan sebagainya. Ada beberapa beberapa pertanyaan saya udah dijawab, cuma saya ingin menanyakan Pak, mekanisme pemberian vaksin ini pakai APBN atau pakai dari Bio Farma atau bagaimana mekanisme pembeliannya dan uangnya dari mana Pak, itu pertama.

Kemudian ini kan kaitan vaksin ini sangat sensitif Pak dan beberapa kejadian kemarin itu terkait terkait vaksinasi menurut saya ada *blunder*-nya juga, yang pertama peluncuran vaksin itu yang seremonialnya kayak kondangan, kemudian yang kedua soal *influencer* yang diundang ke istana, jadi saya melihat ada *gap* komunikasi publik ada *gap* komunikasi ke publik yang ini perlu perlu diatasi lebih baik lagi.

Termasuk juga termasuk juga mengapa memilih jenis vaksin A, B, C, dan E dan juga jumlahnya sedemikian-sedemikian, kenapa Sinovac lebih besar daripada Pfizer, kemudian lebih besar daripada Moderna atau mungkin ada faktor-faktor lain. Jadi biar tidak ada keraguan, nggak ada kegalauan di masyarakat di tengah tadi yang disampaikan sama Bang Andre juga ada hoax-hoax yang gampang disebar karena kalau melihat data ini kan efikasi atau efektivitas Pak? efikasi ya. Kalau saya lihat data itu kan efikasinya Sinovac itu lebih rendah daripada Pfizer dan Moderna, memang ada kelemahan di Pfizer dan Moderna yang itu membutuhkan suhu sangat dingin sekali. Nah keterangan-keterangan seperti itu, narasi-narasi mengapa memilih vaksin ini dan jumlahnya berapa itu harus disampaikan ke publik dengan jelas dengan transparan biar di bawah itu nggak umet biar di bawah itu nggak gaduh Pak, itu yang kedua.

Kemudian yang ketiga, kementerian dan lembaga mana saja yang ikut dalam pengadaan vaksin ini, bagaimana pengawasannya dan memang ada pengawasan dari BPK juga atau *nggak* Pak. Untuk merah-putih mudah-mudahan bisa maksimal Pak Erick Thohir karena memang kami juga berharap berharap di situ jadi biar apa anggarannya nggak nggak kebuang keluar terus kalau memang bisa diberikan ke BUMN memang bisa kita nikmati toh dividen juga kembali ke APBN kan nantinya itu Pak seperti itu.

Terakhir penutup dari kami. Pak Menteri prinsipnya fraksi kami selalu mendukung vaksinasi pemerintah program pemerintah ini kami dukung toh tujuannya juga untuk kebaikan, ini juga salah satu bentuk ikhtiar kita salah satu bentuk upaya kita untuk melewati masa-masa sulit ini dan mudah-mudahan ke depannya baik dari proses pengadaan, produksi, distribusi dan pelaksanaan vaksinasinya itu berjalan dengan lancar dan tidak ada kegaduhan-kegaduhan lagi.

Terima kasih Pimpinan kurang lebihnya saya mohon maaf.

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selanjutnya sebelah kanan Pak Marwan Jafar. Pak Marwan Jafar.

F-PKB (MARWAN JAFAR):

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pak Menteri beserta jajaran yang saya hormati.

Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi VI yang saya hormati.

Tadi sebetulnya saya udah *nggak* tanya karena sudah teman-teman yang tanya itu. Ada beberapa hal Pak Menteri yang ingin saya sampaikan, yang pertama adalah ini urusan sepele semua ini tapi penting.

Satu adalah saya mengapresiasi yang seluas-luasnya kepada Kementerian BUMN Pak Menteri dan jajarannya yang saya kira kerja luar biasa kanan-kiri luar negeri terus keliling tentu dalam rangka pengusahaan vaksin ini kita apresiasi. Yang kedua adalah bahwa pesantren Pak saya minta tolong ini ini banyak yang kena dan saya kira menjadi salah satu prioritas vaksinasi untuk untuk pesantren. Itu penting saya sampaikan karena memang ya seperti itulah di pesantren keadaannya tidak bisa seperti kita yang di sini karena yang pernah mondok pasti tahu satu kamar bisa 30-40 orang bisa sampai 100 orang, itu saya minta tolong itu, iya didahulukan maksudnya.

Kemudian yang kemarin nyoblos Jokowi semua itu. Kemudian yang kedua adalah bahwa saya minta diputuskan dalam rapat ini minimal menjadi konklusi adalah bahwa kalau melihat data yang disampaikan oleh kementerian dan Bio Farma tentu harus dibuka selebar-lebarnya dalam konteks vaksinasi mandiri karena banyak juga apa namanya dalam konteks ini sebetulnya orang banyak mau membantu tetapi ini kesannya yang saya nilai kesannya seolah-olah ini monopoli pemerintah.

Padahal kalau kita swab, rapid itu sampai sekarang juga harganya masih beda-beda meskipun Menteri Kesehatan yang dulu sudah mentargetkan berapa Rp900, tetapi faktanya adalah juga lebih juga bervariasi dan sampai hari ini juga bervariasi juga. Mestinya mestinya bukan Peraturan Menkes mestinya Perpres dinaikkan kalau sekedar Peraturan Menteri mohon maaf Pak ya memang masyarakat cenderung mengabaikan apalagi tidak ada *mandatory* secara hukum harus diapakan, saya kira dinaikkan menjadi Perpres dalam konteks ini sehingga punya punya daya dobraklah terhadap ini semua. Dan kenapa mandiri saya sampaikan tadi adalah bahwa supaya tidak terjadi wasangka yang tidak diinginkan kepada Kementerian BUMN maupun Kementerian Kesehatan atau pemerintahlah secara umum bahwa ini adalah demi rakyat kita semua.

Saya kira ada beberapa hal yang saya sampaikan itu dan terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih Pak Marwan.

Selanjutnya Pak Amin.

F-PKS (AMIN AK, M.M.):

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan dan Anggota Komisi VI yang saya hormati,

Bapak Menteri BUMN dan semua jajaran yang saya hormati,

Langsung saja Pak ini pertanyaan tapi lebih banyak sebetulnya aspirasi dari masyarakat, kebetulan tadi Pak Erick singgung semua ya.

Yang pertama terkait dengan *holding* Pak ya yang sekarang sedang berjalan mungkin BRI, PNM, dan Pegadaian. Ini luar biasa Pak perhatian konsen publik terhadap masalah ini media jurnalis dan juga para karyawan termasuk Serikat Pekerja yang menyampaikan aspirasi ke kami yang intinya adalah kekhawatiran Pak dari khususnya tentu ini induknya kan BRI berarti yang khawatir bukan BRI ya yang notabene mereka selama ini kinerjanya sudah bagus performanya udah bagus kok kami ini mau bahasa mereka bukan di *holding* Pak tapi mau diakuisisi begitu kalau diakuisisi ya kan lebur Pak nanti hilang ya jati diri mereka dan tentu dampak-dampak konsekuensi-konsekuensinya mereka apa akan merasa sangat dirugikan.

Oleh karena itu mohon maaf saya sendiri memang tidak merasa belum merasa tahu secara detil dan belum melihat tahapan-tahapan yang akan dicapai atau target-target di setiap tahapannya yang akan dicapai oleh dari Bapak ya dari Bapak kami merasa belum mendapatkan penjelasan secara detil itu sehingga kami pun meyakinkan bahwa *holding* ini akan sangat menguntungkan dan masing-masing meningkatkan daya saing dan performa dari masing-masing BUMN yang udah dan masing-masing tidak hilang tentunya jati diri mereka.

Nah yang tentu kami inginkan adalah Pak sosialisasi yang lebih serius ya lebih apa ya lebih masiflah ya khususnya ke pegadaian dan apa PNM karena mereka juga mempertanyakan ini BRI ini kan sahamnya *nggak* sepenuhnya punya pemerintah punya swasta bahkan ada swasta asing sementara pegadaian 100% punya pemerintah kok mau diakuisisi bahasa mereka tuh akuisisi Pak bukan *holding* ya tentu ini saya kira mungkin karena kurangnya sosialisasi, itu yang pertama Pak.

Kemudian yang kedua tadi juga Pak Erick singgung terkait dengan ke depan ya tentang energi kita terbarukan dengan penghematan energi dan selalu akan berganti ya ke energi minyak gas itu yang tentu akan diganti dengan energi listrik pelan-pelan yang tentu lebih hemat. Tapi pada saat yang bersamaan saat ini kan kita masih bangun juga kilang, kemudian TBBM-TBBM, dan juga tadi Pak Erick singgung tentang SPBU yang sekarang jumlahnya hampir 6000 ya hampir 6000 yang nilai asetnya kurang lebih *empat puluhan* triliun, lah *empat puluhan* triliun lebih ya, itu kebijakan dari Kementerian BUMN gimana Pak terhadap hal ini? Ya kebijakan jangka panjangnya bagaimana termasuk apa namanya mengfungsikan ya apa apa nanti kilang-kilang, kemudian TBBM, kemudian juga SPBU-SPBU itu. Ini juga memang sebagian pemilik SPBU kadang-kadang menyampaikan aspirasi masalah ini terkait dengan hal ini nasibnya *piye* nih pakai bahasa Jawa Pak mohon maaf 10 sampai 20 tahun yang akan datang ya itu yang kedua.

Kemudian yang ketiga terkait vaksinasi Pak. Ini ya mungkin selama ini yang beredar *hoax* ya dibilang *hoax* ya tapi memang kontroversinya sangat besar ya terkait vaksinasi ini dan bukan di level nasional saja tapi internasional dan yang menyampaikan masalahnya bukan bukan orang-orang sembarangan termasuk juga tenaga medis termasuk spesialis dokter-dokter spesialis dan itu bukan *hoax*.

Termasuk ketika mohon maaf nih Pak Jokowi divaksinasi itu kan ada yang mengkritisi Pak jarumnya itu yang mestinya diameter mestinya 3 ya 3 mm ini kok yang dipakai cuma 1 mm, itu nggak benar, kemudian sudutnya mestinya tentu 90 derajat ini kok miring dan itu menyampaikan dokter nah gimana kita-kita ini masyarakat yang mohon maaf untuk urusan kesehatan kita nih awam apalagi masyarakat awam beneran tentu ini menambah kontroversi di di lapangan ya ada kekhawatiran-kekhawatiran di lapangan.

Oleh karena itu penjelasan penjelasan seperti yang disampaikan Pak Erick tadi penting ya masalah *barcode* tadi saya terus terang aja baru paham sekarang, kalau melihat video yang beredar yang dari videonya Pak Erick itu dengan Najwa itu waduh kita ngeri juga karena cuma sepotong yang itu menambah kekhawatiran masyarakat Pak. Nah, belum lagi ini informasi ini yang disampaikan tentang penyediaan vaksin ini Pak, terkait dengan tanggal kedatangan ya vaksin Corona Sinovac 1,2 juta, 1,8 juta ini kedatangannya 6 Desember, 31 Desember distribusikan tanggal 3-6 Januari sementara mendapatkan EUA dari BP POM baru 11 Januari, kemudian sertifikasi halal baru diserahkan ke Bio Farma 11 Januari. Jadi pengadaannya itu mendahului dari proses ujinya gitu ya baik dari BPOM maupun dari MUI dan itu masyarakat juga tahu Pak dan itu mereka bertanya-tanya gitu loh, ini mereka menduga-duga nih jangan-jangan dipaksakan gitu. Mestinya kan ada *sampling* dulu kemudian uji coba dulu dari BPOM maupun uji dari MUI, nah kemudian baru pengadaan itu berlangsung, nah ini juga saya kira perlu penjelasan ke publik.

Kemudian yang terakhir Pak yang terakhir tentu saya sangat termasuk sangat bergembira bahagia tadi mendengar penjelasan Pak Erick tentang vaksin merah-putih, ini juga yang di lapangan juga ada kontroversi dan ada tuntutan-tuntutan dari publik. Sebetulnya masyarakat kita ya bangsa ini *nggak* kekurangan ahli, pakar-pakar di bidangnya dan tentu mampu melakukan itu membuat vaksin sendiri dari hulu sampai hilirnya dari A sampai Z-nya gitu loh. Oleh karena itu, ini harapan dan juga dorongan kepada Pak Menteri dengan semua jajaran agar kita bisa serius dan mempercepat ya proses ini produk sendiri vaksin Merah-Putih yang menjadi harapan saya kira sebagian besar dari anak bangsa kita.

Terima kasih Pak.

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam Warahmatullah Wabarakatuh.

Terima kasih Pak Amin.

Selanjutnya Pak Deddy, *nggak* ada ya. Lanjutkan ke Pak Achmad Baidowi, juga *nggak* ada. Pak Mukhtarudin *nggak* ada. Baik, selanjutnya Bu Evita.

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):

Terima kasih Bapak Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Bu Evita sudah nanya tadi di-korting waktunya.

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):

Kapan tanyanya Pak Ketua nih sama saya kok perhitungan banget deh. Terima kasih Bapak Pimpinan.

Bapak Menteri dan jajaran yang saya hormati,

Terima kasih Pak atas paparan yang diberikan *at least* memberi gambaran kepada kita ya kan sampai di mana sebenarnya proses vaksinasi nasional ini karena terus terang selama ini kita hanya mengikuti dari media saja. Pertama saya ingin menanyakan beberapa hal yang Bapak Menteri ungkapkan tadi, selain dari vaksin Pak Menteri juga mengungkapkan bahwa sekarang kita sudah bisa memproduksi Paracetamol. Namun demikian kita masih punya kendala di bahan baku ini *statement* Pak Menteri tadi kan, vaksin ini juga kita kan punya kendala di bahan baku, yang saya menjadi pertanyaan saya setahu saya Pak di Indonesia nih nggak ada yang nggak ada Pak. Kenapa kita selalu punya kesulitan di bahan baku? Apakah itu di industri, Apakah itu di apa namanya kesehatan itu sama saja selalu hal yang menjadi masalah itu di bahan baku ya kan, di mana permasalahan kita apa yang *nggak* ada di Indonesia sehingga kita harus impor.

Kemudian yang kedua vaksin mandiri. Saya saya mendukung penuh pengadaan vaksin mandiri ini karena terus terang saja tidak mungkin semuanya kita bebankan kepada keuangan negara, ada yang mampu ya kayak BPJS yang mensubsidi yang tidak mampu begitu kan dan juga Pak asuransi Bapak harus menjadikan instruksi kepada perusahaan asuransi untuk menjadi vaksinasi ini pertanggung jawaban dari asuransi Pak, kenapa? Kalau kita vaksin influenza ditanggung oleh asuransi, kita vaksin pneumonia ditanggung oleh asuransi. Kenapa vaksin Covid ini *nggak* ditanggung oleh asuransi? selalu mereka katakan aturannya belum jelas, segala yang berkaitan dengan Covid Asuransi tidak mau tanggung katanya kebijakannya belum jelas aturannya belum jelas, nah ini harus dicari Pak.

Sekarang ini saya kalau saya bilang yang kaya itu asuransi perusahaan asuransi sekarang ini semua Covid dibebankan kepada negara pembiayaannya, jadi dia lepas tangan benar asuransi ini sekarang. Nah ini yang saya minta dari asuransi ini juga mempunyai apa namanya pertanggungjawaban, tes Covid juga harusnya sudah menjadi tanggungan asuransi sekarang ini. Kita bayar premi *nggak* murah loh kepada asuransi tetapi apa-apa semuanya bebannya dibebankan kepada negara, nah ini harus menjadi pemikiran pemikiran kita juga Pak Menteri.

Kemudian mengenai vaksin mandiri ini kita juga harus apa membuat suatu sistem saya *nggak* mau nanti terjadi seperti yang namanya PCR *test*, ada yang harganya Rp900.000,- harganya Rp2.000.000,- ada yang harganya Rp4.000.000,- karena nggak ada HET-nya Pak ya kan harga tertingginya

nggak ada. Sementara itu rumah sakit menge-charge tinggi sekali, mereka mengimpor alat-alat itu di saat Covid di mana mereka *import tax*-nya *free* ya kan, tapi mereka masih menge-charge tinggi kepada rakyat kita berarti kan yang diuntungkan itu apa ya pengusaha lagi yang dirugikan ya rakyat lagi gitu Pak.

Untuk apa diberi mereka *free import* kemudahan A kemudahan B ketika harga yang datang itu ya harganya tetap tinggi PCR kit-nya kalau kita PCR test Reagen kek rapid test itu harganya masih tinggi, Siapa yang kaya? yang kaya yaitu orang-orang yang pengusaha-pengusaha itu lagi Pak, nah ini menurut saya harus dibuat suatu ini juga Pak suatu aturan dan sistemnya. Yang saya menjadi khawatir sebenarnya Pak di sini adalah distribusi dan penyimpanan. Kenapa? dengan Bapak katakan tadi di presentasi bahwa harus sekian derajat harus sekian derajat apakah di daerah ini siap, ini sebenarnya menjadi menjadi apa menjadi kekhawatiran saya juga Pak mengenai itu.

Kemudian mengenai tadi Bapak katakan apa obat utama Covid ini apa tadi apa namanya Pak? Nah susah banget sebutnya itu ya Pak ya saya melihat, salah satu terapi penyembuhan. Tetapi maaf Pak Menteri ini tidak tersosialisasikan ke masyarakat, orang lebih kenal *Linhua* sekarang ini iya kan lebih kenal itu obat Cina kalau ada yang kena Covid karena obat Covid ini *this is the truth the story* yang di lapangan seperti itu. Sosialisasi obat Cina itu *Linhua* itu begitu masif di masyarakat kita, tapi sosialisasi mengenai obat pengobatan Covid ini itu minim di masyarakat.

Kembali lagi saya rasa ini harus apa namanya kita nih orang awam obat apa sih yang harus kita siapkan di rumah sebenarnya iya kan itu harus ada dari situs resmi, jadi *nggak* kata WA, kata WA, kata WA, situs resmi harus memberi tahu kepada masyarakat ini loh yang harus disiapkan. Sekarang terus terang aja saya *Linhua* saja saya siapkan di rumah Pak karena memang *proven story*-nya tuh udah banyak banget yang saya baca yang saya denger lagi-lagi dari WA lagi-lagi dari teman tapi yang *real* informasi itu yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini Pak.

Kemudian saya membaca ada varian baru Covid ini di Afrika Selatan iya kan. Nah ini bagaimana Pak karena ini katanya varian baru inilah yang mempertebal apa meningkatkan gelombang 2. Apakah vaksin merah-putih kita ini yang kita akan buat ini ini masih berdasarkan apa namanya apa namanya varian yang lama apakah ini sudah menginikan varian yang baru, itu saya juga pengen tahu Pak ininya karena kalau memang sudah varian baru muncul kemudian kita masih memproduksi varian yang lama nah itu seperti apa gitu. Kemudian apakah yang *bulk* ini kualitasnya sama dengan barang impor Sinovac itu juga harus diberikan jaminan oleh pemerintah yang merah-putih yang akan dibangun ini kan dari yang diproduksi Bio Farma ini kan dari *bulk* jadi apa istilahnya tuh apa Pak cairannya itu yang kita datangkan kan kita kemasnya di sini itu harus ada jaminan bahwa efektivitasnya itu sama dengan Sinovac, itu udah harus mulai digaungkan Pak untuk apa namanya kepada masyarakat kita.

Kemudian mengenai satu Pak di luar Covid-covid ini saya ingin menyampaikan keluhan masyarakat Pak Menteri karena Pak Menteri juga menyinggung tadi mengenai mikro ekonomi, mengenai UMKM, dan lain-lain.

Ini banyak sekali keluhan dari masyarakat bantuan UMKM yang diberikan kepada masyarakat ini Pak itu sulit banget, sekarang gini orang punya hutang di BRI dia *nggak* punya *installment* lagi mendapatkan bantuan, sementara orang punya hutang lagi pandemi usahanya lagi bangkrut lagi susah iya kan hutangnya kan pasti tidak terbayar udahlah dia punya utang karena usahanya karena ada utang dia tidak bisa dapat bantuan, ini banyak sekali di daerah saya Pak di dapil saya keluhan dari masyarakat tuh seperti itu.

Kalau dia ada cicilan motor dia *nggak* dapet bantuan, loh yang namanya pedagang kecil yang naik motor itu sudah pastilah motornya dicicil kenapa dia *nggak* bisa dapat bantuan juga Pak? Jadi orang sudah jatuh tertimpa tangga lagi gitu, sementara orang yang baru usaha yang belum ada menemui kerugian belum mempunyai apa-apa itu mendapat bantuan dari pemerintah. Nah, saya rasa sistem daripada bantuan ini juga harus di apa namanya dievaluasi Pak Menteri iya kan ini keluhan banyak sekali loh, rakyat kita cicil motor terus udah tiba-tiba dicoret dari bantuan UMKM karena ada cicilan motor, rakyat kita punya hutang di BRI utangnya *nggak* besar tapi karena punya hutang di BRI dicoret dari daftar UMKM karena dia punya utang di di apa di BRI. Nah, hal-hal seperti ini Pak Menteri usulan apa namanya keluhan-keluhan masyarakat ini yang saya sampaikan kepada Pak Menteri mudah-mudahan ada evaluasi di dalam distribusi daripada bantuan dari UMKM ini.

Yang terakhir Pak Menteri, Pak Menteri tadi ada yang nyinggung Pupuk. Tolong deh Pak, UMKM diberi bantuan petani kita jangan lebih dipersulit Pak, Bapak di bawah Bapak soalnya pupuk ini iya kan. Boro-boro diberi bantuan Rp2,4 juta seperti UMKM diberi modal usaha wong apa pupuk bersubsidi aja langka sekarang di lapangan Pak ya kan apa, kenapa kita diskriminasi sekali antara UMKM dan para petani Pak iya kan. Jadi, ingat loh masyarakat kita ini terbesarnya dari petani dan Pak Jokowi menginginkan kita swasembada pangan tetapi kebijakan daripada pemerintah itu tidak mendukung sama sekali.

Saya rasa demikian Bapak Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Alhamdulillahirabbil'alamiin.

Baik selanjutnya Pak Deddy Sitorus. Iya bahannya tolong.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Terima kasih Pimpinan.

Saya kira tadi *nggak* disuruh nanya saya sudah mau pulang tadi.

Jadi saya mulai dari Pak Menteri BUMN soal realisasi saya kira anggaran tidak terlalu masalah karena di samping anggarannya kecil kerjanya pun konkret saya kira tidak perlu kita ini, malah jumlah yang dipotong dikit Pak kalau dibanding kementerian lain ini cuma Rp40 miliar

kalau yang lain ratusan Pak dipotong. Nah yang saya mau tanya kembali lagi karena ini awal tahun Pak *roadmap* BUMN kita Pak karena sampai hari ini kami itu lebih banyak orang yang cerita pada kami daripada kami dengar langsung nih dari kementerian *What is behind the mind of BUMN* gitu loh tiba-tiba di sana udah begini udah di sana udah begini perasaan kami belum mendapat penjelasan yang komprehensif.

Mungkin printilan-printilan sering disinggung sama Pak Menteri tapi karena ini adalah amanah kita bersama saya kira layaklah kiranya kita duduk bersama menceritakan seperti apa sih karena mungkin juga ada masukan dari kami Pak. Saya melihat misalnya soal apa itu apakah itu klasterisasi atau holdingisasi saya melihat ini tolong jangan dilihat hanya masalah *leveraging* pendanaan Pak, bisnis prosesnya kalau *nggak* benar mentalitasnya *nggak* benar, efisiensinya *nggak* adalah diapain juga *nggak* ada gunanya gitu loh Pak. Jadi mari jelaskan sama-sama kita diskusikan seperti apa sih *roadmap*-nya ke depan ini karena sudah setahun lebih.

Yang kedua soal Lembaga Pengelola Investasi Pak ya apa namanya nih *Sovereign Wealth Fund* ini, ini kami juga minta penjelasan karena kalau saya tidak salah Pak Menteri pernah bicara bahwa nanti BUMN minta tidak PMN lagi tapi kemari kan kira-kira gitu kalau saya tidak ingat kalau tidak salah pada waktu Bapak pernah bicarakan itu di sini gitu. Tapi kalau saya lihat dari apa yang ada di media tentang apa yang menjadi apa namanya tupoksi ya atau katakanlah sekelompok dari LPI ini *nggak* ada nyentuh itu. Makanya kami ingin penjelasan Pak seperti apa sih nanti apakah yang bisa mengakses dana itu memang adalah bagian dari strategi pemerintah agar tidak membebani apa namanya keuangan negara sehingga nanti BUMN mengakses dana itu, lalu pertanyaan selanjutnya swasta bagaimana kan begitu nih. Nah, ini yang perlu menjadi dan kemudian nanti pengawasan oleh DPR-nya bagaimana kan ini lagi turunannya nanti yang harus di apa namanya dibicarakan.

Nah, soal utang Pak memang syukur Bapak sudah meng-*knowledge* betapa parahnya kondisi keuangan di karya-karya kita Pak tapi dan itu saya kira perlu ini yang segera karena yang saya dengar dari pemerintah sih sudah sudah mulai mengalir dan banyak yang sudah tapi tagihan mereka ke swasta ini Pak termasuk BUMN yang susah Pak ini gimana caranya karena itu cukup besar juga dari karya-karya kita itu semua hutangnya ke sana.

Nah, itu saya kira untuk Pak Erick tadi disinggung oleh Bu Evita sebagai PEN juga mungkin Pak ya karena itu tadi penting sekali ya bagaimana perhatian kita terhadap petani dan juga tadi apa yang dikatakan oleh Bu Evita soal sasaran dari program BPUM-nya pemerintah itu kita juga bingung, kita diminta oleh Menteri Koperasi mengajukan nama itu semua dibantai habis-habisan dengan alasan itu tidak bisa karena sudah ada kredit gitu. Padahal kita tahu di sana mereka ditawari oleh bank dan bahkan perusahaan kredit *leasing*, nah ini kan aneh sekali ini tolong Pak bagaimana dirumuskan ulang kalau memang masih ada program itu pada tahun ini supaya benar-benar bisa karena kalau orang dia *nggak* hutang di bank berarti dia *nggak ngapa-ngapain* juga kalau menurut saya, jadi ini perlu diperhatikan.

Lalu soal vaksinasi ini. Saya terus terang bingung Pak dan belum dijelaskan juga pada kita kenapa sih begini banyak vaksin yang kita ambil apa

sih apakah karena kapasitas penyediaan pabrikannya yang membuat kita harus merambah begitu banyak merek atau ada alasan apa gitu karena yang saya tahu yang beredar di publik bahwa orang kalau udah disuntik Sinovac tidak mungkin lagi disuntik oleh apa namanya Pfizer misalnya ini kan kabar yang beredar.

Kita tidak tahu siapa yang harus mengklarifikasi itu sehingga menjadi membingungkan ketika begitu banyak apa namanya merk vaksin yang kita kita impor begitu, nah ini bagaimana penjelasannya dan saya kira juga harus dijelaskan pada kita ini daripada orang mengambilnya dari internet dan akhirnya kacau tadi seperti dikatakan oleh Andre *hoax* segala macam, ini juga kita tidak dijelaskan sehingga kita bisa menjawab konstituen kita. Kenapa sih Sinovac, kenapa Pfizer, kenapa yang lain-lain ini? Apa keuntungan kelebihanannya? ini kan tidak ada dijelaskan di sini ya sehingga kita juga bingung kalau ditanya orang kan banyak nih yang nolak nih karena isu Cina zaman Pilpres wah ini Cina lagi Cina lagi, emangnya bisa kita minta dari mana misalnya gitu ya ini kan harus dijelaskan sama masyarakat Pak sehingga kita tahu. Jadi kekurangan kelebihan dan apapun yang perlu disampaikan kepada masyarakat sehingga silang sengketa silang pendapat apalagi *hoax* itu bisa dijawab dengan dengan cepat.

Termasuk tadi soal *chip* di dalam vaksin itu gara-gara dulu katanya si Robert apa Bill Gates pernah bilang itu kan gitu nih ya ini kan kacau sekali yang kayak begini-begini. Lalu kemudian tadi Bapak sudah bilang juga bahwa ini adalah nanti jadinya *seasonal* seperti *seasonal* flu musiman, jadi setiap tahun akan akan terpaksa kita suntik dan seperti vaksin flu setiap tahun disuntik vaksin flu 4, 5 kali juga kena, nah ini bagaimana nanti juga BUMN termasuk apa namanya Bio Farma di sini nanti menjawab tantangan ini.

Oke tadi Bapak juga sudah menyinggung soal apa namanya vaksin mandiri. Kalau menurut saya ya kita juga pernah diskusikan ini Pak saya kira tidak ada salahnya kalau itu dilepas karena banyak orang yang bersedia membeli disuntik sendiri sepanjang itu tetap dalam pengawasan pemerintah artinya tidak semua rumah sakit, klinik bebas menyuntik itu ya, ini kan saya kira bisa saja dilepas. Kalau orang mau mandiri kenapa harus dibayari negara, apa alasannya harus negara yang tanggung semua, ini membingungkan juga buat kita gitu. Bahkan banyak orang yang bilang udahlah kita ke Singapura yuk suntik Pfizer di sana karena mereka takut dengan Sinovac, ini kan komunikasinya jadi nggak jelas Pak. Jadi tolong disampaikan padahal yang saya tahu yang saya dengar juga ini Sinovac eh Pfizer hanya mau yang ada bandaranya karena tidak mungkin membawa dia keluar dari area apa namanya lebih jauh dari bandara karena apa namanya butuh suhu yang sampai *minus* 70 derajat segala macam.

Nanti ini orang silang pendapat lagi Pak, ini diskriminasi nih yang dapat Pfizer hanya orang kota, orang desa dikasih Sinovac. Kan begini-begini nih yang harus segera mungkin bukan bukan tugas BUMN tapi tugas Kementerian Kesehatan, tapi kan Pak Erick juga sebagai sebagai PEN Pak ya sebagai Komite Pemulihan Ekonomi Nasional saya kira perlu didorong. Saya juga sudah berkali-kali di media menyampaikan perlunya komunikasi sosialisasi dan edukasi soal vaksin ini Pak termasuk *time table* yang ada.

Nah, lalu selanjutnya yang vaksin merah-putih nih apa memang perlu Pak, dalam artian perlukah mereka mengulang semua proses yang dilakukan Pfizer, Sinovac sampai bikin sendiri. Apa iya kita perlu gitu? Kalau iya kita perlu kenapa tidak dimobilisasi Pak sumberdaya ini. Katakanlah BUMN sebagai *lead sector*-nya itu Universitas yang bikin segala macam dikumpulkan Pak daripada semua masing-masing bikin sendiri buat apa? Ini kan hanya menurut saya sih *redundancy* yang *nggak* penting. Jadi coba mungkin mungkin inisiatif dari Kementerian BUMN bisa menyatukan apakah itu perguruan tinggi atau apa sehingga sumber dayanya bisa dipakai untuk tidak semua mengulang hal yang sama.

Lalu yang terakhir buat Bio Farma Pak. Di sini Bapak menyebutkan angka harga daripada vaksin itu hanya kepada vaksin apa ini yang kalau lihat di sini tadi yang 70 dolar ya, USD7 per *dose*, sementara vaksin yang lain *nggak* ada kenapa Pak, kenapa *nggak* disebutkan harganya di sini ya tolong itu dijelaskan. Dan juga dari beberapa hal matriks yang Bapak sampaikan kepada kami ini banyak yang *out of date*, misalnya di sini Bapak katakan akan dikirimkan *VRR part b indemnity* sebelum 8 Januari 2021 sekarang tanggal berapa Pak masa isinya masih begini *report*-nya mana nih, harusnya kan bukan ini lagi nya isinya Pak dan apa *postpone* atau gimana.

Termasuk misalnya ini apa namanya Pfizer minta tanda tangan langsung target *first week of Januari* sekarang udah minggu ke berapa Pak ya kan harusnya kan lebih lebih teliti kalau menurut saya. Termasuk ini Moderna akan mengirimkan penawaran *first week of Desember* oh sekarang sudah mau *first week of Januari* Pak statusnya gimana barang ini ya. Jadi tolong itu disampaikan kepada kita dan lagi saya juga agak ragu sekitar pesan sampai 400 juta, sebenarnya berapa sih yang mau disuntik? Saya pernah dengar 70 juta iya kan, saya pernah dengar berapa sih 120 juta apa *seratus lima puluh*, apa alasannya kita impor sampai segini misalnya ini juga harus disampaikan kepada kita Pak karena ini kan pertanggungjawaban yang cukup besar.

Dan yang terakhir Pak habis kerja ini menyambung apa yang dikatakan oleh Pak Idris Laena, jadi untung *nggak* Bio Farma Pak atau ini kerja rodi lagi? ini kan cukup besar nih duitnya mungkin dari Rp70 triliun Rp71 triliun tuh ya mungkin taruhlah berapa Rp10 triliun sih yang untuk beli obatnya, berapa triliun nih yang akan singgah di Bio Farma Pak, jangan sampai nanti tahun depan minta PMN lagi maksud saya gitu Pak harusnya kan ini kerja untung juga ya.

Dan yang paling terakhir izin Pimpinan saya sampai lupa tadi mau ngomong apa, nah ini. Tadi soal impor-impor Pak Erick saya setuju Pak nah saya berharap ini kan vaksinasi massal ini kan pasti membutuhkan banyak alat-alat pendukung, suntik, kapas, alkohol, *cooler box*, dan seterusnya jangan sampai kita impor lagi Pak, masa *nggak* bisa dari sekarang asosiasi dikumpulkan segala macam. Yuk silakan gitu loh, jangan sampai nah ini saya dengar disuntik dari mana *cooler box* dari India loh negara ini masa cuma nonton beli punya orang terus, apa iya kita *nggak* bisa. Jadi saya kira itu perlu Pak dipertimbangkan.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih Pak Deddy.
Selanjutnya Pak Tommy Kurniawan.

F-PKB (TOMMY KURNIAWAN):

Perasaan *nggak* daftar Ketua.

KETUA RAPAT:

Ada tulisannya disini.

F-PKB (TOMMY KURNIAWAN):

Karena di perintah jadi kita.

KETUA RAPAT:

Sudah? Mau tanya atau *nggak*?

F-PKB (TOMMY KURNIAWAN):

Boleh Ketua.

Terima kasih Ketua.

Yang saya hormati rekan-rekan Komisi VI.

Pak Menteri BUMN yang saya hormati.

Pak Wamen I, Wamen II, Dirut Bio Farma, dan juga seluruh jajaran yang saya hormati.

Terima kasih atas penjelasannya pada hari ini. *Alhamdulillah* dari berita-berita atau *hoax* yang beredar hari ini kita bertemu mendapatkan berbagai macam penjelasan Pak mengenai masalah vaksin. Tentu kalau masalah anggaran kita apresiasi atas penyerapan yang sangat tinggi Pak Menteri, tapi ini yang paling memenuhi tantangan adalah masalah vaksin.

Kita tahu sendiri bahwa dari waktu kita kunjungan kerja ke Bandung Bio Farma sudah menjelaskan bahwa membutuhkan anggaran sampai Rp80 triliun ya Pak untuk apa namanya memproduksi vaksin dengan jumlah yang ditentukan waktu itu berapa juta gitu dalam presentasi Bapak, nah ini kan tadi Pak Menteri mengatakan bahwa setiap tahunnya kita membutuhkan sekitar Rp70 triliun. Ini kan uang yang sangat besar tentu kita mendukung vaksin merah-putih supaya segera bisa diproduksi Pak, nah ini kan tantangannya sekarang bahwa yang terjadi di masyarakat ini adalah takut divaksin Pak Menteri mungkin juga sudah sering mendengar.

Saya kira mungkin harus ada sebuah pola Pak pola komunikasi yang lebih detail dan lebih menjelaskan agar masyarakat ini mau divaksin sehingga anggaran yang begitu besar yang dikeluarkan oleh pemerintah itu bisa

terserap dengan bisa sukses maksud saya. Contoh misalkan Pak, kemarin kan awal-awal takut dengan Sinovac, kemudian terjadilah ada masalah di Pfizer kan di beberapa negara itu ada yang meninggal meskipun itu usianya 80 tahun lebih.

Nah, ini saya dengar kabar bahwa sekarang orang lebih percaya lagi dengan Sinovac takut dengan Pfizer Pak, nah ini kan jadi masalah lagi gitu. Nah artinya saya juga tadi benar kata Bang Deddy kenapa kita begitu banyak pilihan vaksin yang harus diambil meskipun waktu itu sudah dijelaskan bahwa kita cepet-cepetan dari negara lain, tapi ternyata timbul sebuah tantangan di sini nah ini harus dijelaskan kembali Pak Menteri bahwa sekarang mohon maaf ini ada beredar di beberapa daerah nakes itu sekarang mereka maunya di vaksin Sinovac daripada Pfizer, mereka takut kalau nanti dapatnya belakangan mereka yang dapat malah vaksinnya itu nah ini harus ditanggulangi hal-hal yang seperti ini.

Meskipun ini adalah tugas Kementerian Kesehatan, tapi paling tidak Bio Farma bisa membantu dalam memberikan klarifikasi tentang masalah ini. Ini tantangan kita Pak memang di setiap vaksinasi nasional itu dari dulu sampai sekarang itu mendapatkan sebuah tantangan yang sangat tidak mudah dari mulai polio, dari mulai KB, dan lain sebagainya. Saya kira ini adalah tugas bersama kami juga membantu Pak di dapil ke konstituen bahkan saya sampai bilang kalau nggak percaya ini diproduksi di Bandung, silakan datang di Bandung bisa lihat produksinya dan lain sebagainya, beberapa percaya tapi beberapa masih banyak yang masih takut. Nah saya kira ini tugas kita bersama bukan hanya Menteri BUMN bukan hanya Bio Farma, Menteri Kesehatan, tapi kita juga sebagai Anggota Dewan kita harus mendukung vaksinasi nasional ini supaya bisa sukses.

Terima kasih saya kira itu Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Silakan Ibu Sondang Tampubolon.

F-PDIP (SONDANG TIAR DEBORA TAMPUBOLON):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Pak Menteri yang saya hormati.

Pak Wamen I, Pak Wamen II Pak Tiko, dan Bang Arya, serta Dirut Bio Farma.

Pertama-tama saya mengucapkan selamat Pak Pahala menjadi oh ya senior saya soalnya. Ya selamat atas menjadi jabatan yang baru walaupun sebenarnya orang baru tapi stok lama begitu Pak Pahala. Saya mungkin langsung saja karena sudah beberapa banyak yang tadi disampaikan oleh teman-teman tetapi karena memang ada dalam *list* pertama saya saya tadi

sudah disampaikan oleh Bang Deddy juga ini 2021 masa jabatan kita 2019-2024 Pak Menteri, artinya *roadmap* yang harusnya menjadi pegangan kita bersama selama masa jabatan kita ini itu harusnya sudah selesai sebelum 2021 ini tetapi ini sudah Januari 2021 sampai dengan sekarang itu belum *firm* belum di-*freeze*-kan bersama-sama supaya kita bisa bersama-sama untuk mengawal daripada program sampai dengan 2024 karena terus terang memang sama seperti teman-teman kita di Komisi VI yang lain bahwa kita mendapatkan banyak *update-update* dari korporasi BUMN dari Kementerian itu dari media Pak.

Jadi kami sempat ada *jokes* ini kita mengawasi Kementerian BUMN beserta dengan korporasinya atau kita mengawasi media begitu ya seperti misalnya ada apa namanya *project* yang akan dilakukan pengembangan pabrik baterai kita sangat mendukung sebetulnya, tetapi kan artinya kalau tidak ada dikomunikasikan dengan kita secara komprehensif ya seperti apa begitu, itu yang pertama.

Kemudian mengenai tadi dividen yang turun dan lain sebagainya kita memang menghadapi satu tekanan tidak hanya korporasi BUMN hampir semua korporasi tetapi kami menekankan bahwa jangan karena Covid-19 akhirnya perusahaan-perusahaan yang sebenarnya tidak terdampak oleh Covid-19 itu ikut-ikutan turun ya. Itu harus kita kita ingatkan karena banyak juga apa namanya korporasi-korporasi yang sejatinya dengan adanya Covid-19 ini malah justru *performance*-nya harus semakin tinggi.

Misal Telkom karena semua orang sekarang ini adalah menggunakan Teknologi Informasi, kemudian apalagi *health industry* dan lain sebagainya termasuk pangan dan pupuk. Pangan kita *nggak* berhenti makan Pak, Pupuk perusahaan-perusahaan perkebunan itu tidak berhenti juga memupuk walaupun mereka memang memangkas atau melakukan efisiensi-efisiensi. Artinya jangan karena Covid-19 semua dipukul rata perusahaan BUMN mengalami penurunan *performance* ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan.

Kemudian mengenai vaksin kami seluruh Anggota DPR sangat mendukung program pemerintah dalam hal bagaimana mempercepat penyelesaian dari pandemi Covid-19 ini baik itu pelaksanaan proses 3M beserta juga dengan program vaksinasi yang sekarang ini sudah dimulai. Walaupun mungkin ini harus diapa namanya harus dipercepat mengenai uji klinis tahap ketiga karena itu akan menjadi satu apa namanya keyakinan tambahan terhadap seluruh masyarakat Indonesia terhadap vaksin-vaksin ini terutama saat ini yang sudah dilakukan adalah vaksin Sinovac karena tanpa rilis daripada mungkin Bio Farma dalam hal ini sebagai apa namanya lembaga yang mengeluarkan nanti uji klinis itu apa namanya ya keyakinan itu tidak tidak semakin *firm* gitu Pak, jadi kami harapkan itu bisa segera di rilis mengenai uji klinis tahap ketiga.

Nah kemudian yang berikutnya mengenai vaksin. Jadi kalau saya bisa apa namanya mengambil kesimpulan bahwa vaksin yang saat ini ditangani oleh Bio Farma itu ada 3. Pertama adalah yang diimpor langsung dari vaksin dari perusahaan-perusahaan vaksin di seluruh dunia, apakah Sinovac dan lain sebagainya. Kedua adalah yang diproduksi dan yang di *bulk* bahan

bakunya. Dan yang ketiga ini adalah tahap vaksin merah-putih begitu ya kalau saya nggak salah saya saya biar bisa ambil kesimpulan.

Nah yang mau saya tanyakan adalah kalau vaksin impor oke, nah *what the benefit* apa keuntungannya dari Bio Farma sendiri untuk bagaimana melakukan produksi apa namanya bahan baku yang diimpor dari Sinovac, apa benefit yang didapat begitu? kalau tidak ada benefitnya *why* kenapa harus capek-capek melakukan penjahitan di Bio Farma karena kan kalau tidak ada benefit ya kita SDM habis untuk menjahit dan lain sebagainya ya impor aja begitu, apa benefitnya? Apakah di sini di sana ada efisiensi harga dan lain sebagainya dan lain sebagainya mohon dijelaskan kepada kami.

Nah, kemudian harus sangat hati-hati nanti Pak kami ini sebagai fungsi dari pengawasan kami dalam hal karena ini sama-sama bahannya adalah Sinovac jangan sampai tumpang tindih apa namanya produksi yang barang jadi yang diimpor dengan yang tadi diproduksi oleh produksi Bio Farma. Nah, kemudian terkait ini korporasi ya karena kemudian ini ada pembelian jadi kemudian ada pembelian dalam *bulk*, ini mekanisme sistem pembayaran seperti apa? karena ini masih masih apa namanya uji klinisnya belum ini belum keluar sampai tahap 3 kalau *ones* ada *failed* apa apakah ada satu jaminan dari yang dalam *agreement* atau apapun juga yang dari Sinovac karena kalau misalnya kan kalau dari Pfizer kita sudah tahu ada beberapa banyak yang *failed*. Nah, apa jaminannya yang yang diberikan oleh pada atau *guarantee or something*-lah seperti itu yang bisa disampaikan.

Nah, kemudian terkait vaksin merah-putih. Kita mengadakan kerja sama kalau saya melihat tadi jumlah daripada vaksin yang di-*order* baik itu pun *bulk* maupun produksi yang jadi Sinovac itu paling besar dan memang kita melakukan kerja sama pertama awal duluan. Nah, saya berpikir bahwa tadinya vaksin merah-putih ini kita bisa ada satu kerja sama *transfer of knowledge, transfer of technology* karena jumlahnya cukup besar kalau di sini tadi ada 122 juta *binding from order* benar kan, tapi ini masih ada lagi nanti yang berikutnya.

Kenapa *ndak ndak* dilakukan itu sehingga tadi kalau Bang Deddy bilang harus mengulang uji dari awal sampai akhir loh keuntungan sedangkan Sinovac itu melakukan uji uji klinis tahap 1, 2 dan itu di Indonesia harusnya ada *benefit* yang kita dapatkan dari sana. Nah itu coba dijelaskan kepada kami apakah kalau memang belum ada apakah itu harus didorong supaya apa namanya *transfer of knowledge and transfer of technology* dalam pembuatan vaksin tersebut bisa dilakukan tidak hanya langsung tidak melalui tidak perlu saya pikir melalui apa namanya *University* atau apa langsung ke Bio Farma *that's ok* gitu begitu. Nah, kemudian tadi vaksin gratis vaksin mandiri saya setuju sekali itu saya apa namanya kalau memang ada mandiri kita sangat mendukung sekali karena kalau keadilan bukan harus semuanya gratis, tetapi kalau yang mampu bisa membayar itu jauh lebih adil dan sosial seperti itu.

Kemudian yang terakhir Pak Menteri dan para beserta jajarannya. Covid-19 yang terjadi kasusnya adalah banyak di Pulau Jawa, kami harapkan adalah vaksinasi program vaksinasi ini diutamakan di Pulau Jawa bukan berarti mengenyampingkan kepada pulau-pulau yang lain tetapi karena memang kasusnya yang paling banyak di sini dan kita harapkan juga nanti

apa namanya ya ini kan namanya kita dapat bukan UEA apa *Emergency Use Authorization* ya gitu kan. Jadi artinya kalau dilakukan di tempat di kasus yang jauh lebih banyak itu bisa lebih apa ya efikasi atau apanya bisa lebih maksimal begitu, jadi bisa proporsional apa namanya dengan jumlah penduduk tetapi harus dibandingkan juga dengan jumlah kasus untuk distribusi vaksinasi.

Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Terima kasih Pak Menteri beserta seluruh jajarannya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pak Herman Khaeron silakan Pak.

F-PD (DR. Ir. E. HERMAN KHAERON, M.Si.):

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang saya hormati Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi VI,

Pak Erick Menteri BUMN, Pak Wamen II selamat untuk Wamen I sini Pak Pahala, kemudian para Eselon I, staf khusus merangkap Wamen III. kemudian Dirut Bio Farma Pak Honesti.

Bapak Ibu sekalian yang saya hormati.

Pertama tentu saya ingin menyampaikan Pak Erick karena Pak Erick ditunjuk sebagai bagian penting didalam manajemen penanganan Covid saya kira masyarakat sampai saat ini mulai tergeliat rasa ketakutannya. Jadi kalau saya kemarin di tahun 2020 pertengahan sampai akhir rasanya biasa-biasa saja sekarang mereka menyatakan takut dengan Covid ini karena kan *public figure* banyak yang menjadi korban dari Covid termasuk para Habib terakhir saya kira ini juga menjadi ketakutan masyarakat. Oleh karenanya fokus terhadap vaksin ini penting tetapi juga jauh lebih penting bagaimana untuk bisa memagari agar kenaikan atau tingkat atau positif *rate*-nya bisa diturunkan, Amerika Serikat sudah turun sekarang sejalan dengan turunnya Donald Trump, Covid-nya juga turun, betul Pak.

Saya tidak ingin membandingkan Amerika dengan Indonesia tentu tapi ini ada upaya-upaya yang bisa dijadikan contoh, bukan berarti harus turun bukan Pak ini tapi ada upaya-upaya yang dilakukan oleh rezim peralihan yang tentu ini bisa menurunkan tingkat positif *rate* yang menurut saya menjadi semangat baru untuk bisa juga terus menekan tingkat pertumbuhan Covid-19. Itu yang paling utama ingin saya sampaikan pada hari ini.

Yang kedua terkait dengan anggaran yang tadi disampaikan saya mengikuti via virtual tadi dari awal Pak Erick bahwa anggaran yang *dua ratus*

sekian miliar Rp240 Miliar ini menurut saya tidak perlu menjadi pembahasan pentinglah di Komisi, yang penting akuntabel itu dilaporkan kepada Komisi ini selesai bagi saya menganggap selesai, termasuk program kerja yang akan dilaksanakan dengan uang sebesar itu pada tahun 2021.

Tetapi jauh lebih penting bagi kami terkait dengan Kementerian BUMN adalah bagaimana merawat terhadap BUMN yang 90% berdampak oleh Covid ini, belum selesai Jiwasraya, Asabri dan kalau mengukur kepada tingkat kemampuan keuangan BUMN PTPN sebetulnya sudah sudah agak sulit gitu ya. Bahkan kalau tadi dari pemaparan Pak Erick akan dilakukan *scheme* restrukturisasi hutang masih menyisakan pertanyaan di ujungnya gitu terhadap PTPN, terhadap BUMN karya-karya masih menyisakan pertanyaan, apakah ini akan diberlakukan aksi korporasi atau masuk kepada PEN betul ya Pak Erick ya.

Nah, ini tentu jangan pula pada situasi seperti ini semuanya di generalisir menjadi kepentingan dari penanganan ekonomi akibat dampak Covid karena PTPN bukan terdampak Covid ini udah rusak dari lama gitu, karya-karya rusak ketika mereka diberikan target menjadi pengembang mungkin kalau karya-karya dia tetap difungsikan sebagai kontraktor selesai nggak ada masalah sampai sekarang. Tapi ketika mereka diberikan tugas tambahan untuk bisa mengembangkan menjadi perusahaan pengembang ini yang kemudian menjadi rusak mereka karena *habit* mereka adalah kontraktor.

Ini yang apakah dikembalikan kepada apa namanya kepada asal-usulnya atau memang akan dibuatkan restrukturisasi secara total termasuk apakah tetap menggabungkan pengembangnya di dalam atau dikeluarkan, menurut saya kalau objektifnya tidak ada, lah Bank yang mau membiayai karya-karya sekarang betul ya Pak Pak Tiko? berat ya kalau melihat beban.

Bahkan pada waktu kami rapat dengan PPA ya Pak Ketua, waktu rapat dengan PPA saya kira kami senang sekali bahwa dalam 1 tahun PPA bisa merawat Waskita Karya yang kemudian bisa dikembalikan kembali bisa jalan sendiri, tapi kalau melihat situasi kondisi keuangan Waskita sepertinya harus masuk ICU kembali gitu loh, ini yang menurut saya ya coba yang begini-begini di rawat gitu. Jangan karena Covid-19 lantas fokus fokusnya divaksin bahkan 90% BUMN malah kemudian tidak terawat, ditutup, dikemas oleh bisa setor dividen 50%, menurut saya ini politik kebijakan gitu loh akhirnya politik kebijakan. Unsur profesionalitas untuk *me-manage* yang 90% terkena dampak ini tidak tampak, barangkali 50% dari 90% justru ini adalah penyakit akut bawaan sebelum adanya Covid gitu.

Bahkan saya ingin sekali mungkin nanti Pak Erick menyampaikan pemaparan gitu melalui Pak Tiko ataukah melalui Pak Pahala memaparkan ini loh plat merah yang betul-betul zona merah, ini plat merah yang zona hijau, kemudian ini zona yang tentu mereka sudah bisa *on going* gitu. Jangan juga kemudian cara-cara *financial engineering* kemudian menutupi terhadap sesuatu yang secara jangka panjang ini akan bermasalah.

Kemudian masih terkait dengan BUMN Pak Ketua. Ada hal PR yang saya kira ini perlu didalami yang pernah disampaikan oleh janjinya Pak Erick yaitu membahas kita akan fokus, kemudian membahas secara seksama secara detail terkait dengan *roadmap cluster-cluster* yang sudah dibentuk itu.

Bisa juga mungkin di-*benchmark* sebelum jadi *cluster* setelah menjadi *cluster* apa untung ruginya kan bisa dilihat di situ.

Masuk kepada vaksin, saya mungkin seperti halnya teman-teman yang lain bahwa ada jejak digital yang saya catat, di awal Menteri Kesehatan Pak Budi Sadikin menyampaikan bahwa penanganan vaksinasi ini akan diselesaikan dalam tiga setengah tahun, kemudian diralat oleh juru bicara satu setengah tahun, tadi Pak Jokowi memberikan direktif 1 tahun, ini ini jelas ini jejak digital ini jelas. Dan kalau saya melihat bagaimana *roadmap* dari Bio Farma dalam persoalan vaksin untuk memenuhi 181 juta vaksin yang berlaku selama 6 bulan Pak ya dia efektif 6 bulan kan vaksin itu berarti kalau mengejar waktu kita taruhlah kalau melihat *timing* ini *timeline* ini saya yakin satu tahun setengah ini bisa dikejar ya meskipun barangkali ada kesulitan kalau *delivery*-nya harus berada dalam suhu 2 sampai 8 derajat ini juga tidak mudah gitu dengan *delivery quantity* yang begitu besar, mungkin kalau yang kecil pakai tabung yang itu sudah, tapi ini kan besar Pak ini agak sulit.

Nah, oleh karenanya, dalam pandangan saya kalau Amerika Serikat Biden mentargetkan dalam 100 hari kerja dia akan mencapai 100 juta vaksin dan dikomentari oleh seluruh ahli-ahli target Biden ini akan tercapai 100 juta vaksin dalam 100 hari kerja. Nah, pertanyaan saya ini mana yang benar yang 1 tahun direktif Presiden, yang satu setengah tahun Jubir Presiden, atau tiga setengah tahun yang kemudian juga semua diralat karena harus menyesuaikan terhadap direktifnya Presiden, supaya apa? supaya harapan masyarakat bisa kemudian menuju kepada kehidupan yang normal melalui vaksinasi, *herd immunity* tentu bukan hanya sekedar harapan, tapi ada kebenaran bukan ada pembenaran sehingga kalau memang 1 tahun ya memang 1 tahun bisa dicapai.

Kemudian bagaimana mencapainya jika kemudian sampai bulan Juni saja baru 144.700.000 padahal berlaku hanya 6 bulan divaksin harus dua kali, saya juga mencermati bahwa bukan hanya 181 juta ampul tetapi harus kali 2 harus 300 berapa 362 juta, terus kalau sudah 6 bulan kan berarti harus ada vaksin lagi berikutnya bagaimana untuk memenuhi lagi kebutuhan vaksin berikutnya? terus bagaimana membentuk *herd immunity* yang 70% dari seluruh warga masyarakat. Saya kira ini pertanyaan-pertanyaan besar yang tentu tidak terlepas dari pertanyaan teman-teman sebelumnya.

Mengakhiri pertanyaan saya, bagaimana sistem bisnisnya Bio Farma dengan vaksin ini karena tidak mungkin Bio Farma tiba-tiba menyebar 144.700.000 ampul vaksin, kan harus ada uangnya dari mana ini kan harus terbuka di sini uangnya dari mana, berapa Bio Farma mendapatkan keuntungan dari ini? kalau kemudian Bio Farma yang ditugaskan tidak boleh untung dari mana biaya operasionalnya, harus terbuka Pak. Dan tentu saya sebagai Warga Negara Indonesia yang baik mendukung terhadap vaksinasi agar bisa segera terwujud *herd immunity* dan tentu menuju kepada kehidupan masyarakat yang normal.

Terima kasih Pak Ketua dengan sabar sudah lama sekali memang belum ketemu, jadi kesempatan baik ini saya sampaikan. Mudah-mudahan Pak Erick selalu diberi kesehatan semuanya dan bisa menjalankan tugas dengan baik tetapi tetap pertanyaan saya mohon di jawab. Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam Warahmatullah Wabarakatuh.

Karena pertanyaan Pak Herman pertanyaan-pertanyaan besar, tolong Pak Erick siapkan jawaban-jawaban besar.

Silakan Pak Hendrik Lewerissa.

F-P.GERINDRA (HENDRIK LEWERISSA, S.H., LL.M.):

Ketua dan Pimpinan Komisi VI yang saya hormati.

Rekan-rekan Anggota Komisi VI yang saya hormati.

Pak Menteri BUMN, Pak Wamen I, Pak Wamen II, dan seluruh jajaran Kementerian BUMN yang saya hormati.

Terima kasih untuk kesempatan ini Ketua. Saya sebenarnya bersyukur sekali karena apa yang ingin saya tanyakan telah disentuh oleh rekan saya Pak Herman Khaeron tadi ya artinya soal kalau soal penyerapan anggaran kita seperti Bang Deddy katakan tadi ya *nggak* ada masalahlah memang kerjanya konkret dan kebetulan anggarannya juga *nggak* besar kecil sekali.

Tapi yang mau saya katakan begini Pak Menteri, saya termasuk salah satu Warga Negara Indonesia yang sangat optimis dan menaruh harapan yang sangat besar ketika Pak Presiden Jokowi menunjuk Pak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN. Saya menyampaikan dari kejujuran hati saya yang paling dalam Pak Menteri karena saya percaya memang Bapak punya kompetensi yang luar biasa, Bapak ini menurut istilah Ibu Evita itu sangat inovator, Bapak menurut saya Bapak adalah seorang Menteri yang visioner sekali Pak. Nah, kebijakan-kebijakan *mengklasterisasi* dan *holdingisasi* ya nanti orang boleh memiliki persepsi yang berbeda-beda tapi menurut saya berikan kesempatan untuk kebijakan itu bisa terimplementasi dan kita akan lihat hasilnya.

Tetapi catatan saya yang paling penting Bapak Menteri adalah Pak kalau kita lihat laporan keuangan atau *financial report* dari BUMN-BUMN yang ada ini kan kita harus jujur mengatakan banyak sekali yang buruk rupanya Pak banyak sekali yang buruk rupanya, nah yang kita lakukan selama ini adalah terapi solusi yang sifatnya sangat *hilirisasi* sekali. Tapi ada isu di hulu yang sangat *Principal* yaitu soal saya harus berani mengatakan ini tidak populer secara politik Pak, tapi kenapa kita tidak bisa membuka wacana soal privatisasi BUMN ya. Perusahaan-perusahaan PTPN yang perusahaan-perusahaan karya PTPN ya memang buruk rupanya terutama PTPN ya, Jiwasraya lupakanlah kita udah lewatin masa itu tapi PTPN Pak ini bukan 1 tahun, bertahun-tahun wajah ini buruk Pak.

Kalau kita mau mempertahankan itu hanya karena *national pride* kita karena negara punya saham di perusahaan-perusahaan itu buat apa kalau kita harus rugi dari tahun ke tahun Pak, lagipula kalau itu diprivatisasi kita tidak melanggar konstitusi *anyway*. Konstitusi mewajibkan negara menguasai

cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menyangkut hajat hidup orang banyak, jadi kalau yang tidak menyangkut hajat hidup orang banyak ya diprivatisasi sajalah.

Saya kira kalau kita lihat *best practices* negara-negara demokrasi yang modern juga kan negara-negara itu tidak memiliki BUMN di bidang-bidang yang pertanian, karya dan sebagainya. Saya kira ini harus menjadi percikan permenungan bagi kita semua, saya usul konkret kepada Pimpinan Komisi VI barangkali dalam semangat untuk melakukan revisi Undang-undang BUMN yang sekarang telah masuk dalam program legislasi nasional dan masuk dalam program legislasi prioritas tahun 2021. Saya kira barangkali Kementerian BUMN yang diberikan kewenangan, kewenangan regulatif untuk memikirkan kalau bisa Pak langkah-langkah privatisasi itu dipikirkan untuk bisa dilakukan.

Usulan ini saya sampaikan karena kecintaan saya terhadap BUMN Pak dan kecintaan saya untuk melihat Bapak menjadi mahkota yang sangat berhasil menangani Kementerian BUMN.

Terima kasih Pak.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam Warahmatullah Wabarakatuh.

Selanjutnya Bapak Nusron Wahid.

F-PG (NUSRON WAHID):

Terima kasih Pak.

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Pertama saya tanya kecil aja Pak karena saya ini orang bodoh saya tidak doktor, saya ini politisi murni berbasis aktivis yang ya dikit-dikit belajar dagang begitu aja. Pertama angka 70% manusia Indonesia kalau sudah divaksin kemudian menjadi normal itu rumus dari mana karena saya ini orang bodoh saya bukan dokter, beda sama Pak Deddy Sitorus yang kalau bicara kan kayaknya semuanya bisa begitu. Nah, iya gitu.

Yang kedua Pak karena saya ini lagi-lagi saya orang bodoh tanya sama Pak Hones saya ini, Pak coba nggak bisa Pak karena kita ini Komisi VI kan membidangi korporasinya dikasih tahu kepada kita COGS-nya kalau COGS-nya impor itu berapa, kalau COGS-nya hanya beli bahan baku kemudian diproduksi di sini tuh berapa, jangan-jangan lebih mahal bikin di sini daripada diimpor supaya kita tahu benar-benar ada nilai tambahnya.

Kalau memang itu ternyata lebih murah impor ya sudah impor semua, mau Sinovac mau apa mau Novax apa yang penting ada itu barang itu yang penting kita tahu COGS-nya, jadi kita *nggak* usah dalam situasi yang jangka pendek ini kalau saya boleh usul *nggak* usah terlalu ambisius pingin sehat iya, pingin merah-putih iya, pingin nasionalis iya yang penting kita ini barangnya ada sehat kita hidup menjadi normal iya kan *nggak* usah

dipaksakan harus produksi sendiri kalau memang itu ternyata produksi lebih mahal daripada impor, itu yang kedua.

Yang ketiga tidak kaitan dengan vaksin. Saya nyambung apa yang disampaikan oleh Pak Amin sama yang disampaikan oleh Pak Hendrikus tadi tentang rencana tahun-tahun ini Pak. Saya ini Anggota DPR sungguh saya mau curhat kepada Pak Erick maupun Pak Pahala yang sudah diangkat jadi Pak Wamen I moga-moga tambah pahala begitu Pak, mungkin selama dulu dari Direktur Bank Mandiri, jadi Dirut di Garuda, jadi Direktur Keuangan Pertamina, jadi Dirut mungkin pahalanya kurang gitu Pak sehingga sekarang jadi Wamen I tambah pahala begitu. Jadi setiap ada aksi korporasi yang sifatnya tanda petik ya Pak ya "dadakan" yang dilakukan oleh Meneg BUMN, satu kasus misal kasus BRI, Pegadaian, dan PNM selalu menimbulkan gejolak, kemudian ngelayaplah atas nama Serikat Pekerja PNM-lah, menemui siapa, nemuin Pak Amin-lah, nemuin saya-lah, nemuin Pak Andre-lah untuk membangun opini yang bukan-bukan seakan-akan nanti akan begini akan begitu dan sebagainya.

Ini lebih kenapa? Karena saya lebih melihat *roadmap* daripada aksi korporasinya itu tidak pernah disusun selama tahunan, coba kalau kami usulkan selama tahun 2021 ini aksi korporasinya yang mau diaksi apa saja dan bentuk aksinya kayak apa dan di bulan apa di kuartal berapa, sehingga untuk apa? Kalau ada gejolak internal kemudian bermain manuver politik ke DPR kita pun udah tahu bagaimana cara meng*handle*-nya cara menghadapinya udah punya *site* dan teman-teman di Meneg BUMN pun sudah bisa cara meng*handle*-nya ada waktunya udah bisa meng*handle* seperti itu sehingga tidak tiba-tiba muncul muncul aksi BRI, nanti tiba muncul aksi apa ini selama tahun ini kita mau ngapain. Ada IPO anak perusahaan Pertamina 2 misal, kilang sama Patra Niaga misal, iya kan ada IPO Mitratel misal, ada aksi korporasi lagi *right issue* BNI misal tahun ini kita petakan dari sekarang supaya kita tahu cara meng*handle*-nya bagaimana.

Saya kira itu aja Pak ya, saya *nggak* mau panjang-panjang karena saya bukan ahli di bidang vaksin Pak.

Terima kasih Pak.

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam Warahmatullah Wabarakatuh.

Selanjutnya secara virtual Pak Sonny Danaparamita.

F-P.GOLKAR (Drs. MUKHTARUDIN):

Ketua, Ketua. Saya daftar Ketua.

KETUA RAPAT:

Nggak, tadi sudah dipanggil Pak soalnya.

F-P.GOLKAR (Drs. MUKHTARUDIN):

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Mukhtar.

F-P.GOLKAR (Drs. MUKHTARUDIN):

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan dan Anggota Komisi VI yang saya hormati.

Pak Menteri dan seluruh jajaran.

Saya singkat saja saya tidak menyoroti tentang masalah bagaimana kinerja BUMN baik hari ini dan akan datang, tapi saya lebih fokus kepada masalah vaksin ini karena memang tema kita hari ini terkait dengan vaksin. Tapi saya tidak juga bicara soal vaksin soal teknis vaksinnya, tapi saya lebih bicara soal korporasi dari karena Bio Farma ini adalah BUMN dan ini adalah korporasi dan merupakan ruang lingkup tugas kami Komisi VI sebagai pengawasan terhadap BUMN terutama yang ada yang bermitra dengan Komisi VI.

Terkait dengan masalah ini apakah penugasan atau bisnis korporasi dalam vaksin ini? Kalau dia penugasan tentu ada uang, ada uangnya dari APBN, apakah ini betul hanya murni bisnis daripada daripada Bio Farma? Nah kalau dia ini kan pengadaan ini kan bukan soal kecil ini duitnya Rp71 triliun, bagaimana kontrak dengan Sinovac, bagaimana proses pembayaran.

Apakah duitnya dari *cash flow* Bio Farma atau bagaimana karena uangnya uang besar ini. Nah apakah pengadaan ini mengganggu *cash flow* atau seperti apa, PMN yang *1,5 triliun* yang kemarin tadi dijelaskan hanya untuk sekedar penambahan ada apa infrastruktur yang ada di Bio Farma dalam rangka produksi vaksin ini. Nah ini yang ini yang jangan sampai nanti pengadaan ini membebani ya *cash flow* Bio Farma sehingga membuat Bio Farma yang sudah sehat menjadi BUMN yang tidak sehat dan akan menjadi beban bagi Kementerian BUMN dan juga negara dalam konteks bagaimana *me-recovery* dari pada BUMN yang sekarang.

Nah ini yang perlu kita dalam betul-betul dari segi korporasi daripada Bio Farma ini, jangan sampai membuat ini apalagi nanti setahun ke depan suntik lagi duit lagi kan gitu, apakah PMN lagi, nah ini yang betul-betul harus kita dalam sehingga tidak memberi membebani kepada Bio Farma dan mengganggu bisnis-bisnis Bio Farma yang lain karena bagaimana pun Bio Farma adalah perseroan yang dituntut untuk untung dan memberikan benefit yang besar kepada negara.

Nah kemudian saran saya ke depan tentu karena ini vaksin ini adalah terus menerus harus dilakukan ya kita buka aja selebar-lebarnya untuk vaksin mandiri supaya ini tidak membebani kepada Bio Farma, jadi bahkan Bio Farma bisa bisnis gitu dalam konteks bisnis yang betul-betul ya profesional

gitu ya tidak juga sebagai monopoli yang bisa merugikan rakyat ya tetapi betul-betul bisnis yang profesional, yang rasional. Buka saja sebanyak-banyaknya mau mau Sinovac, mau Pfizer, mau apa dan sebagainya sejauh sudah ada dikeluarkan sertifikat halalnya oleh MUI dan udah oleh BPOM saya kira kan bebas sehingga ini bisa mengurangi dan dan bisa menjadi apa tidak membebani terus-menerus kepada negara dan Bio Farma khususnya dalam konteks korporasinya.

Saya kira ini aja yang yang perlu kita alami betul-betul karena saya tidak ingin BUMN ini sudah banyak BUMN kita yang merugi Bio Farma yang sehat dengan anak-anak perusahaannya yang sehat ini nanti sampai waktunya juga akan hancur Pak, nah itu yang saya perlu *warning* dari hari ini agar betul-betul kita punya *grand design* untuk mempersiapkan karya itu.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

F-PKS (Hj. NEVI ZUAIRINA):

Satu detik boleh *nggak*?

KETUA RAPAT:

Tolong tolong sebentar, silakan. Oh mau ke toilet, nah ini *nggak* boleh diwakilkan.

Baik Bapak Ibu sekalian.

Kita karena waktu sudah pendek jadi saya kasih kesempatan virtual kepada Bapak Sonny Danaparamita, silakan Pak Sonny.

F-PDIP (SONNY T. DANAPARAMITA):

Terima kasih.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang terhormat Ketua beserta Pimpinan dan segenap Anggota Komisi VI.

Yang saya hormati Pak Menteri, Pak Wamen beserta jajaran.

Pertama karena singkat saya merasa mengapresiasi terhadap siapapun yang hadir di ruangan itu karena di tengah tantangan pandemi kayak gini kalau saya agak-agak ngeri, tapi yang jelas saya siap vaksin cuma vaksinnya sepertinya belum siap. Dan kenapa kalau saya sedikit pengantar banyak yang tanya tidak pada korporasinya dan sebagainya saya kira semua

punya argumentasi yuridis. Pertama tanggal 20 Juli 2020 yang lalu Presiden menetapkan Perpres 82 tentang pembentukan KPCPEN.

Dalam Perpres tersebut yang kemudian juga diubah itu menyebutkan Menteri BUMN adalah Ketua Pelaksana dari KPC dan PEN, kemudian Wamennya pada 5 atau 10 November itu diangkat menjadi Menteri Kesehatan dan dalam Perpres juga disebutkan bahwa Bio Farma ditunjuk sebagai penyedia vaksin. Artinya sebenarnya persoalan vaksinasi dan sebagainya ini sangat tergantung kepada Kementerian BUMN. Oleh karena itu, kita sangat berharap banyak agar dalam rapat ini semua bisa menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat.

Terkait dengan itu pertama sebagaimana disampaikan Bang Deddy, kemudian Bu Sondang saya juga ataupun mungkin yang lain terkait dengan *roadmap* Pak. Jadi kita kapan ini diberi *roadmap* yang sampai saat ini belum kita terima, apakah *roadmap* itu ada perubahan yang saya yakin itu ada perubahan dengan situasi seperti ini. Kita ingin memastikan kalau saya pribadi apakah *roadmap* ini sudah sesuai dengan visi misi Presiden terpilih atau jangan-jangan kalau lama-lama *nggak* ada *roadmap* ini tadi sebagai uji publik visi misi calon Presiden, jadi semoga saja tidak ada pertanyaan seperti itu.

Yang kedua, Bio Farma sebagai penyedia vaksin kira-kira mampu berapa persen dari total kebutuhan vaksin yang ada. Saya kira Pak Dirut atau Pak Menteri dapat menyampaikan kisarannya pada rapat kali ini, kenapa demikian? karena meskipun dalam aturannya Menteri Kesehatan yang menentukan tapi tentu saja harus berkoordinasi dalam mendapatkan pertimbangan dari Komite Penanganan Virus yang dalam hal ini juga dijabat oleh Pak Menteri BUMN, jadi perlu ada kejelasan sehingga bisa kita bisa tahu ekspektasi kita juga jelas.

Yang ketiga dalam penanganan pandemi ini tentu bukan saja vaksin semata sebetulnya kebutuhannya dalam Perpres 19 sudah disebutkan termasuk sarana pendukung. Nah terkait dengan itu untuk memenuhi sarana pendukung seperti *genset*, pengiriman barang, dan sebagainya sejauh mana Menteri BUMN melibatkan BUMN-BUMN yang ada termasuk anak perusahaannya. Saya kira kalau *genset* misalkan itu bisa melibatkan PLN, kemudian pengiriman barang ada banyak BUMN kita yang bisa melakukan itu, termasuk juga tadi misalkan suntik dan sebagainya masa semuanya harus impor tentu saja saya kira sangat naif kalau semuanya harus kita impor meskipun saya setuju juga keselamatan adalah hukum tertinggi dalam masa pandemi ini.

Yang keempat adalah koordinasi yang dilakukan oleh Kementerian BUMN terhadap seluruh BUMN terkait, salah satunya adalah misalkan *problem* kita saat ini adalah banyaknya *hoax* dan lemahnya sosialisasi atas berbagai hal terkait dengan vaksin dan vaksinasi. Bisa *nggak* kira-kira misalkan BUMN-BUMN yang ada ini semua juga ada tambahan penuh penugasan atau mungkin intruksi dari kementerian untuk melakukan sosialisasi secara masif.

Saya sendiri merasa terhormat, saya sendiri merasa siap misalkan kalau BUMN yang ada di daerah saya di Dapil Jawa Timur 3 untuk bekerja

sama melakukan sosialisasi bareng langsung ke masyarakat, misalkan bisa saja ditumpangi kalau PLN sekarang sedang melakukan sosialisasi terhadap PLN *mobile* di sela-sela acara menyampaikan sosialisasi tentang vaksin dan vaksinasi saya kira itu akan jauh lebih efektif dibanding kebanyakan masyarakat kita yang termakan oleh *hoax-hoax* yang menyesatkan.

Berikutnya saya mengucapkan konfirmasi terkait dengan apa yang disampaikan Kepala Dinas Kesehatan *digital* Bio Farma yang belum menyampaikan ada tiga alternatif untuk mendapatkan vaksin tersebut, yaitu mulai aplikasi, situs, juga datang secara langsung. Nah ini skenarionya konsepnya seperti apa selaras dengan yang ditanyakan oleh teman-teman anggota yang lain, apakah ada yang model vaksin mandiri ataukah ini yang dimaksud adalah model gratis tapi alternatif mendapatkannya bisa mendaftar, situs, atau datang langsung.

Yang keenam tadi menyampaikan Pak Menteri bahwa untuk ke depan akan ada vaksin hasil teknologi yang lebih maju dibanding yang telah ada sekarang. Ini apa berarti misalkan vaksin yang disuntikkan ke masyarakat nanti itu justru lebih maju atau paling tidak teknologinya lebih baik dengan vaksin yang disuntikkan kepada Presiden dan pejabat negara yang lain serta Wakil-wakil dari masyarakat kecuali Anggota DPR karena setahu saya sampai saat ini belum ada satupun Anggota DPR yang divaksin dalam gelombang kemarin meskipun banyak Anggota DPR, staf, maupun karyawan di Senayan yang terpapar, syukur alhamdulillah masih banyak yang selamat dan kembali sehat wal'afiat.

Berikutnya karena sama juga saya hanya menegaskan pertanyaan yang lain. Kalau berdasar Perpres maka Bio Farma itu mungkin sebagai penyedia vaksin itu konteksnya penugasan, tapi apakah benar penugasan murni ataukah ada hal-hal yang bisa didapatkan dari Bio Farma kita semua berharap semoga tidak ada dusta di antara kita.

Dan terakhir karena saya tidak mau lama *dua jam setengah* kita semua selesai, ini diluar vaksin Pak Menteri.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA):

Sudah lama Pak, mohon dipercepat.

F-PDIP (SONNY T. DANAPARAMITA):

Ya terakhir Mas Bimo.

Terkait dengan Banpres BPOM, meskipun ini *domain*-nya Kementerian Koperasi saya titip kepada Pak Menteri agar menertibkan Bank Himbara. Kalau saya mau sebut misalkan BRI, ada 1 nasabah yang tidak pernah mengajukan usul Banpres tapi tiba-tiba dapat, sementara banyak pelaku UMKM yang harusnya mendapatkan tapi tercoret. Nah, saya kira ini penting untuk dilakukan jangan sampai Himbara hanya untuk kepentingan merawat nasabah, kepentingan memperbanyak nasabah melakukan hal-hal yang sebetulnya jauh dari kepentingan Banpres.

Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA):

Wa'alaikumsalam.

Terima kasih Pak Sonny. Selanjutnya kita akan selesai sementara pukul 17.00 WIB ya.

(RAPAT:SETUJU)

Kami persilakan Bu Siti Mukaromah sama Ibu Melani mohon waktunya dipersingkat saja 2 menit. Kami persilakan Bu Melani.

F-PDIP (ST. ANANTA WAHANA, S.H., M.H.):

Saya juga daftar loh Pak Ketua.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA):

Oh Pak Ananta?

F-PDIP (ST. ANANTA WAHANA, S.H., M.H.):

Iya, habis Pak Sonny tadi saya daftar.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA):

Silakan Pak Ananta. Bu Siti Mukaromah nanti dulu.

F-PD (Hj. MELANI LEIMENA SUHARLI):

Saya atau Pak Ananta nih?

KETUA RAPAT (ARIA BIMA):

Iya Bu Melani dulu.

F-PD (Hj. MELANI LEIMENA SUHARLI):

Sebentar saya cuman nggak banyak kok.

F-PKB (SITI MUKAROMAH, S.Ag., M.AP.):

Saya daftar Ketua, sedikit saja.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA):

Bu Melani.

F-PD (Hj. MELANI LEIMENA SUHARLI):

Iya, terima kasih Pimpinan.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi VI.

Yang terhormat Pak Menteri dan Pak Wamen, juga Dirut Bio Farma.

Saya sudah banyak yang ditanyakan oleh teman-teman tapi saya mau menanyakan tentang apa namanya vaksinasi yang katanya nanti kalau berakhir semuanya terus suntik itu mungkin baru bulan Maret 2022, sedangkan ini banyak jamaah haji itu kan bulan Juni udah berangkat sedangkan negara Arab sendiri memohon kalau yang mau pergi haji harus semuanya membawa apa namanya sertifikat sudah divaksin. Nah saya mau menanyakan apakah ada kebijakan karena kalau tidak yang daftar tunggu haji itu lebih lama lagi ya.

Jadi mungkin ada kebijakan apa pakai vaksin mandiri yang tidak gratis atau ada kebijakan yang lain untuk supaya agar jamaah haji tahun ini dari mulai bulan Juni mungkin akan bisa berangkat mendapatkan prioritas mungkin untuk divaksin lebih dahulu. Saya *nggak* tahu vaksin yang mana, tetapi saya juga mungkin menjadi wakil dari para lansia nih karena seminggu lagi saya umurnya udah 70 tahun. Jadi saya mau menanyakan karena dari tadi tidak ada yang menanyakan yang aman yang mana untuk para lansia karena saya tahunya Sinovac tidak boleh umur 58 ke atas tidak bisa disuntik dengan Sinovac, tetapi yang saya tahu bahwa Pfizer dan Moderna itu bagus cuman katanya ada dari segi hukum yang belum selesai karena vaksin Sinovac dan Moderna itu tidak mau bertanggung jawab kalau ada apa-apa terjadi sesudah disuntik vaksin Pfizer dan Moderna, ini juga mungkin *hoax* atau benar saya juga minta apa namanya bagaimana caranya.

Kemudian satu lagi, kalau misalnya vaksin ini tadi Pak Menteri katakan bahwa tiap tahun akan divaksin, nah karena berlakunya 1 tahun. Sedangkan seperti apakah nanti seperti meningitis, jadi kalau kita setiap mau naik haji atau umroh harus ada disuntik meningitis selama paling dia berlakunya selama 2 tahun, nah ini bagaimana berlakunya nanti vaksin yang Pfizer, Moderna ataupun Sinovac.

Mungkin saya itu saja.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA):

Wa'alaikumsalam.

Itu Bu Melani di belakangnya bunga-bunga kayak bidadari ya tadi gambar.

F-PD (Hj. MELANI LEIMENA SUHARLI):

Iya dong biar muda.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA):

Oh ya biar bisa disuntik vaksin Bu ya.

F-PD (Hj. MELANI LEIMENA SUHARLI):

Iya.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA):

Silakan sebelum Pak Ananta Bu Siti. Bu Siti Mukaromah apakah masih bisa komunikasi?

F-PKB (SITI MUKAROMAH, S.Ag., M.AP.):

Masih Pak.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA):

Monggo.

F-PKB (SITI MUKAROMAH, S.Ag., M.AP.):

Iya. Tadinya sebenarnya saya sudah mau meng-*cancel*, tapi terima kasih Pak Bimo sudah memberikan kesempatan kepada saya. Terima kasih.

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang kami hormati Pimpinan Komisi VI dan seluruh Anggota Komisi VI.

Pak Menteri dan juga Pak Wamen Wamen I, Wamen II dan seluruh jajarannya.

Pertama, selamat Pak Wamen Pak Pahala sudah menjadi Wakil Menteri mudah-mudahan Kementerian BUMN menjadi semakin lebih kuat, lebih baik dan lebih memberikan nilai kemanfaatan buat masyarakat untuk seluruh Indonesia.

Yang kedua, Pak Menteri terima kasih. Kami mengapresiasi apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Menteri tadi tentang penggunaan anggaran, betul apa yang disampaikan oleh teman-teman bahwa anggaran tidak besar tentunya akan sangat tidak bagus kalau anggaran tidak besar tapi pemanfaatannya juga tidak maksimal. Namun mungkin juga ikut mengingatkan mudah-mudahan dengan anggaran yang tidak besar tapi akan mampu mengelola dan juga menjadi *leader* buat seluruh BUMN yang ada di Indonesia seluruh BUMN sehingga bisa memberikan nilai-nilai *profit* yang lebih tinggi dan memberikan dividen yang lebih tinggi lagi, kalau tadi apa namanya bertarget 50% dari yang diharapkan oleh Kementerian Keuangan mudah-mudahan lebih dari itu.

Satu hal lagi Pak Menteri dari apa yang sudah dilakukan dan juga hari ini menjadi konsep apa yang dikerjakan oleh Kementerian BUMN tentunya sekali lagi juga kami pegang dari apa yang menjadi slogan Pak Menteri di Kementerian BUMN yaitu berakhlak, maka kami juga berharap bagaimana bahwa komitmen seluruh Kementerian BUMN, seluruh karyawannya, seluruh BUMN, dan seluruh karyawannya juga bagaimana berkomitmen tentang berkebangsaan yang lebih baik lagi dan harapannya adalah bagaimana bahwa di dalam pemahaman-pemahaman ke Indonesia-an kita semuanya puna termasuk di teman-teman di Kementerian BUMN baik jajaran direksi maupun karyawannya.

Kalau mungkin bagaimana tentang Indonesia bernegara perlu di-*refresh* dan sebagainya saya pikir kementerian bisa melibatkan apa namanya pihak dari apa namanya lembaga-lembaga yang ada di kita di Indonesia untuk bisa menguatkan kembali ke NKRI dan sebagainya sehingga di dalamnya tidak berkembang dalam konsep keberagaman yang mungkin kurang pas ketika kita berbicara tentang Indonesia sebagai negara Pancasila dan lain sebagainya. Itu masukkan sedikit Pak Menteri mudah-mudahan bisa menjadi Pak Menteri untuk apa lebih konsep berakhlak itu bisa lebih meng-Indonesia meng-NKRI untuk kita semuanya.

Selanjutnya berkaitan dengan tentang apa hari ini dan lain sebagainya satu hal yang mungkin ingin kami sampaikan Pak Menteri bahwa banyak hal tadi yang sudah disampaikan oleh sahabat-sahabat dari Anggota DPR yang ada baik secara langsung maupun yang dari virtual bahwa hari ini memang kita butuh menguatkan kepada masyarakat, kita butuh memberikan penjelasan yang puna kepada masyarakat dan ini menjadi kewajiban kita bersama agar persoalan vaksin ini bisa menjadi suatu hal yang tidak menjadi fobia buat masyarakat, tidak menjadi persoalan yang menambah pada persoalan-persoalan yang sudah ada, dan juga bisa masyarakat mempunyai rasa keyakinan dan kepastian dari apa yang sudah dikonsepsikan oleh pemerintah oleh negara. Termasuk bahwa tadi juga sudah disampaikan di beberapa tentang sebenarnya vaksin mana sih yang tepat untuk dipakai, vaksin mana sih yang pas untuk mereka karena masyarakat kecil selalu bertanya-tanya itu, kemudian amankah itu gitu. Termasuk bahwa apakah mereka mampu menjangkau ketika bahwa mereka juga berpikir ya sudahlah belajar untuk mandiri gitu kan, apakah mereka juga mampu menjangkau dan mana yang bisa untuk mereka bisa jangkau dengan angka atau kemampuan yang mereka miliki.

Demikian juga dengan masalah keamanan, seperti tadi Ibu Melani sampaikan bahwa vaksin ini apakah aman kalau untuk seperti mereka yang usianya adalah di atas 58 atau mereka yang punya penyakit seperti gula, kemudian juga kolesterol, dan sebagainya. Ini juga menjadi pertanyaan dan bagaimana solusinya ketika mereka untuk memastikan bahwa dirinya adalah tidak kena gula, tidak bagian dari yang apa namanya kolesterol, sementara untuk cek itu juga mereka membutuhkan biaya. Nah artinya Pak Menteri karena juga kalau tadi Pak Marwan menyampaikan konstituen ada di pesantren dan sebagainya.

Kita juga para ibu-ibu muslimat yang usianya juga sudah apa namanya sudah di atas 50 dan sebagainya ini juga membutuhkan apa ya namanya

kekuatan atau di ditenangkan dan dinyamankan oleh kita sebagai bagian dari pemangku kebijakan di negara kita ini agar mereka juga tidak merasa resah dan gundah karena sering sampai hari ini juga Pak Menteri meskipun sudah ada Pak Jokowi yang melakukan vaksin kemarin tapi juga masyarakat masih mau tanyakan itu. Iya Pak?

KETUA RAPAT (ARIA BIMA):

Cukup-cukup Bu kepanjangan Bu, sudah pada kedinginan di sini.

F-PKB (SITI MUKAROMAH, S.Ag., M.AP.):

Siap, siap, siap, siap oke. Iya Pak Menteri, Pak Wamen, dan Pak Pimpinan saya pikir itu. Terima kasih, mohon maaf kalau waktunya berlebihan.

Wallahul Muwafiq Illa Aqwamith Thariq.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA):

Wa'alaikumsalam.

Terima kasih dari Bu Siti Mukaromah.

Selanjutnya persingkat Pak Ananta.

F-PDIP (ST. ANANTA WAHANA, S.H., M.H.):

Iya, terima kasih Pak Ario Bimo mohon maaf dan Pak Menteri beserta jajarannya saya langsung saja, nanti takutnya kalau dipotong Pak Ario Bimo.

Iya tadi Pak Menteri Pak Menteri kemudian Pak Idrus tadi Idrus Laena menyampaikan kebutuhan vaksin itu kira-kira Rp70 triliun, kemudian Pak Tommy bilang Rp80 triliun, tapi kalau secara kasar saya catat kalau ini semua rakyat mendapatkan vaksin secara gratis maka dana yang dibutuhkan kira-kira Rp100 triliun. Sebagai partai PDIP Perjuangan yang yang dekat dengan wong cilik tentunya kami menghargai dan mendukung kalau ini benar-benar diberikan secara gratis kepada rakyat dan tentunya ketika ini diberikan akan mendapatkan prestasi yang gemilang yang akan dicatat sepanjang sejarah.

Kemudian kami juga mengapresiasi Pak Menteri dan Bio Farma yang berhasil rebutan vaksin dan Indonesia mendapatkan itu. Nah kemudian saya pertanyaan saya pertama, itu vaksin Sinovac itu kalau *nggak* salah di Brazil itu mengenai kemanjurannya itu kira-kira hanya 50% tidak sampai 70 sampai 90% dan efektivitasnya itu katanya setelah 10 bulan.

Nah saya ingin menanyakan kira-kira kalau itu benar saya pikir skenarionya Pak Menteri itu kayak bagaimana ya, jadi apa ada rencana lapis kedua itu itu yang pertama yang perlu kami sampaikan, kemudian apakah ini juga ada kaitannya dengan memperbanyak ragam vaksin-vaksin dan jenis dan tentunya itu yang yang pertama. Kemudian yang kedua saya sebetulnya

juga siap untuk divaksin tetapi karena 12 penyakit ini apakah bisa divaksin saya tidak tahu nah ini kaitannya dengan orang yang sudah terpapar atau sudah kena apa namanya Covid itu katanya tidak bisa divaksin oleh Sinovac iya kan kalau ini divaksin membuat menjadi kondisinya lebih parah. Nah kaitannya dengan Bio Farma apakah Bio Farma ini sudah koordinasi dengan Kemenkes maupun BNPB kaitannya karena ini banyak ya supaya ini tidak terjadi tumpang tindih.

Kemudian tadi Pak Menteri mengatakan bahwa ekonomi kita berat dan sebagainya, nah kaitannya dengan dengan vaksin merah-putih. Jadi meskipun tadi sudah dijelaskan tapi kalau kita bisa dorong mengenai vaksin kita genjot vaksin merah-putih ini kalau kita bisa berdagang di saat sekarang ini tentunya kita akan mendapatkan keuntungan di saat banyak negara membutuhkan vaksin, jadi mestinya vaksin merah-putih itu juga didorong.

Kemudian yang terakhir mengenai pupuk. Saya pernah dengar bahwa Presiden juga marah terhadap apa namanya subsidi pupuk yang tidak tepat sasaran iya kan, nah karena Pak Menteri ini juga komandannya dari BUMN pupuk saya ingin tahu sebetulnya supaya kita tahu. Jadi ketika seperti itu apa yang dilakukan Pak Menteri kaitannya dengan Pupuk Indonesia, apakah mengevaluasi, apakah menyambungkan kemarahan itu karena ini merugikan petani di saat situasi yang susah.

Kira-kira itu Pak Ario Bimo yang bisa kami sampaikan.

Terima kasih atas perhatiannya.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA):

Terima kasih Pak Ananta.

Selanjutnya dari meja Pimpinan Pak Demer.

F-P.GOLKAR (GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.A.P.):

Terima kasih Pak Aria Bima.

Pak Menteri beserta jajaran yang saya hormati, dan Rekan-rekan sekalian yang saya hormati pula.

Kalau tadi bicara vaksin saya juga mau bicara vaksin, tapi vaksinnya tentang ekonominya Pak. Yang pertama adalah mengenai relaksasi, relaksasi daripada teman-teman karena ini juga akan berbahaya ke depan kalau ini tidak diselesaikan kita coba selesaikan paling tidak me-*minimize* daripada kondisi-kondisi yang berada di negeri kita ini tentang keekonomian.

Tidak hanya relaksasi dalam perbankan saya juga minta nanti teman-teman di BUMN selama masih punya *cash flow* untuk membayar hutang-hutang kepada *supplier*, kepada kontraktornya sama masih punya apa *cash flow*-nya tolong ini juga diminta untuk mereka membayar karena ini untuk menggerakkan ekonomi juga.

Dan saya melihat usaha-usaha dari Pak Erick sudah cukup bagus karena saya lihat SWF mudah-mudahan berhasil SWF-nya nanti menghasilkan banyak investasi masuk gitu sehingga ini menjadi semacam

inovasi barulah untuk menyelesaikan persoalan perekonomian kita. Nah di samping itu yang ke dalam itu saya bilang masalah kebijakan-kebijakan tidak hanya masalah utang-utang masyarakat tapi kebijakan-kebijakan juga mungkin ada yang sewa dan sebagainya ke ke BUMN yang masih bisa di ya *cut* sedikit mungkin sebagian karena kondisinya sedang tidak juga dia menghasilkan jangan sampai nanti sudah jatuh tertimpa tangga juga gitu.

Itu saja Pak Menteri mungkin ini menjadi suatu saran dan mengingatkan Pak Menteri untuk fokusnya ke orang juga ke korporasi ke perekonomian kita.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA):

Terima kasih Pak Demer.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Mas Bimo boleh 20 detik *nggak* masyarakat, tanya doang.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA):

Oh sudah terlalu banyak Pak.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

20 detik saja Mas.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA):

Ndak usah Pak nanti dulu Pak, sebentar. Nanti kalau mau ditambahkan di kesimpulan saja Pak ya.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Ya *nggak*, saya mau nanya dikit aja. Pak Menteri 20 detik saja nih, mohon maaf Pak soal *big data*-nya Pak ini kan Bapak memvaksin seluruh orang di Indonesia tolong manfaatkan data itu untuk *big data* supaya besok tidak ada lagi seperti yang di Kemensos nih 16,7 juta orang gak punya NIK dapat bantuan, pemilu bermasalah, BLT bermasalah. Jadi tolong benar data vaksin ini dipakai untuk kepentingan bangsa dan negara dan dikelola dengan baik Pak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA):

Nggih. Saya kira itu kawan-kawan kita mau kesimpulan tambahan saja untuk Bio Farma kalau dari saya karena tugasnya adalah memastikan ketersediaan pasokan vaksin tentunya sesuai dengan agenda vaksin nasional yang yang penting tadi banyak disampaikan kawan-kawan setelah distribusikan apakah ruang penyimpanannya memadai.

Selanjutnya hal yang penting Pak Menteri karena semua urusan vaksin itu identik dengan Menteri BUMN yang dalam ini Pak Erick, maka perlu ada satu dukungan politik yang sangat kuat kita Komisi VI tetap akan berikan satu dukungan. Maka untuk itu tadi seperti Pak Rosiade bilang ya kan data yang akurat berkaitan dengan penyebaran pandemi ini Pak ini kita lihat terus berjalan infeksi ini tidak mengalami penurunan tapi justru mengalami satu peningkatan peningkatan dan tentunya penyebaran pandemi inilah harus *interconnect* dengan yang namanya vaksinasi itu ini yang yang yang kita ingin data akuratnya seperti apa seperti orang yang meninggal saat ini yang murni Covid itu yang seperti apa sih sebenarnya kita juga belum ngerti karena antara yang murni Covid meninggal atau orang yang meninggal karena Covid disertai riwayat penyakit, ini kan nanti akan terlihat vaksin yang 3 juta mau ke mana dulu gitu ada hipertensi, ada jantung, ada diabetes dan lain-lain juga jumlah orang yang sembuh dari Covid.

Ini yang saya kira penting karena kita akan tahu *placement* yang diutamakan secara bertahap tadi Pak Idris Laena bilang baru September 2021 kita mencapai 142 juta. Nah juga data jumlah yang terinfeksi saat ini apakah di kota atau di daerah, kemudian objektifnya yang seperti apa apakah di ruang tertutup ya. Ini yang saya kira perlu ada data yang akurat sehingga berdasarkan itulah kebijakan atau langkah-langkah penanggulangan Covid kita bisa terukur untuk upaya penghambatan penyebaran pandemi ini dan kemudian dapat menentukan prioritas dari distribusi dan jumlah vaksin yang pengadaannya sangat terbatas kepada kelompok-kelompok mana dan daerah-daerah mana yang rentan terhadap penularan Covid-19 ini, antara yang di ruang AC atau yang di ruang ber-AC seperti perkantoran atau fasilitas publik seperti transportasi umum.

Nah ini supaya nanti ada argumentasi-argumentasi karena apa distribusi yang diprioritaskan ini adalah kelompok-kelompok yang rentan terhadap adanya penularan-penularan ini sehingga kemudian tidak asal distribusikan yang tentunya akan menuai kritik, ini yang saya kira perlu kami sampaikan.

Kemudian mengenai hal yang menyangkut vaksin mandiri kita akan *support* karena jelas akan mengurangi beban APBN, kemudian vaksin mandiri juga tentu akan menyelamatkan ekonomi nasional, mempercepat proses *herd immunity*, dan tentunya perusahaan yang selama ini *cash flow*-nya kacau juga akan ikut menangani persoalan dengan vaksin mandiri ini dapat membantu proses pemulihan kondisi perusahaannya dan yang penting datanya satu yang sudah divaksin mandiri dan yang gratis ini jangan terjadi *overlapping* sehingga nanti akan menimbulkan kecurigaan-kecurigaan.

Demikian yang bisa kami sampaikan beberapa hal yang terkait dengan pendalaman, karena begitu banyaknya pertanyaan sebagai komitmen kawan-kawan Komisi VI yang tentunya merekam dari berbagai persoalan yang ada di masyarakat terutama terkait dengan berbagai persoalan-persoalan dampak

Covid yang Komisi VI sangat berharap dari berbagai rapat-rapat yang ada kementerian atau mitra Komisi VI ada tiga hal.

Yang pertama adalah penanganan virusnya, itu sudah kita lakukan dengan berbagai rapat-rapat dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi. Kemudian penanganan penularannya dan penularan dampaknya, ini luar biasa dan kita percaya dari Kementerian BUMN banyak hal menyangkut masalah penanganan virusnya, penanganan penularannya, dan dampak terutama ke ekonominya kita sangat berharap kinerja ini akan mendapatkan dukungan berbagai semua pihak. Dan tentunya kalau dari anggaran selalu yang menjadi perhatian kita adalah antara kalkulasi dari perhitungan anggaran *cost*-nya dan *benefit*-nya Pak Menteri kita sangat berharap di situ dan tentunya kalau anggaran Kementerian BUMN tidak begitu besar tapi justru kebijakan Kementerian BUMN inilah yang akan terlihat tidak hanya *benefit* korporasi tapi lebih negara yang mendapatkan keuntungan terutama dalam situasi pandemi Covid-19.

Kami akan berikan kesempatan pada Pak Menteri untuk beberapa hal saja yang kira-kira bisa direspon terutama yang berkaitan dengan publik karena rapat ini terbuka mohon bisa dijawab pertanyaan-pertanyaan kawan-kawan yang yang jawaban itu sangat ditunggu oleh masyarakat dengan berbagai apa ya *seling surup* atau berbagai hal-hal yang masih belum jelas dan pertanyaan-pertanyaan yang lain tentunya kami akan minta secara tertulis saja.

Waktu dan tempat kami persilakan Pak Menteri.

MENTERI BUMN (ERICK THOHIR):

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi VI yang hadir.

Tentu saya dari seluruh pertanyakan saya coba rangkumkan dan mudah-mudahan saya bisa coba menjawab nanti ada beberapa poin yang saya akan minta tolong Bio Farma untuk menambahkan tentunya.

Tadi kalau ada pertanyaan mengenai rasa takut saya rasa tentu ketakutan kalau kita tidak hadapi kita tidak selesaikan ya ketakutan itu tuh akan terus membayang-bayangi kita, tentu ketakutan itu kita harus jawab dengan solusi. Tentu saya juga tidak bisa menutup diri saya sendiri apakah ada ketakutan? pasti ada dan ketakutan itu apakah sekarang tetapi sebenarnya dari tahun 2020 ya ketakutan itu ada setelah kita tahu bahwa dampak daripada Covid ini sangat luar biasa. Untuk saya secara pribadi sendiri *alhamdulillah* saya terus menjaga prokes cuman bukan berarti orang terdekat saya tidak terkena, kakak saya masuk rumah sakit ya *alhamdulillah* sudah keluar, tadi malam kakak saya yang perempuan juga masuk rumah sakit ya tentu saya terus pantau. Jadi realitas itu ada dan kedekatan itu di sekitar kita makin dekat yang tadinya jauh sekarang dekat sekali dan karena itulah kalau kita lihat kenapa Bapak Presiden sejak awal membuat komite

yang namanya gas dan rem antara kesehatan dan tentu yang namanya ekonomi.

Dan tentu sesuai dengan revisi yang terbaru di mana tentu ada sebuah tingkatan daripada sistem manajemen yang dibentuk. Satu tentu pimpinan komite itu langsung yaitu Bapak Menko yang di mana tidak lain jelas di dalam keputusan itu seluruh kebijakan adalah diambil dalam rapat komite yang dipimpin Bapak Menko di bawahnya sendiri ada menko-menko lain termasuk Menkeu. Saya sendiri mendapat tugas sesuai dengan revisi yang terakhir saya menjaga administrasi yaitu kalau kita lihat kenapa di bawah saya itu ada perwakilan BPKP, LKPP, ditambah juga yaitu perwakilan TNI-Polri yang tidak lain untuk membantu kalau ada *plan B* yang harus dilakukan. Di situ juga dibantu oleh dua Satgas yaitu Satgas PEN dan juga Satgas Kesehatan, Satgas Kesehatan yang saat itu adalah Pak Doni sampai hari ini dan tentu Satgas PEN yang pada saat itu Wakil dari Kementerian BUMN.

Kalau kita lihat kebijakannya jelas bahwa pada saat kondisi Covid ini kita harus cari *game changer* karena semua formula yang seluruh dunia lakukan tidak ada yang bilang 100% tepat semua mencari formula apakah yang dinamakan *lockdown*, apakah yang bukan *lockdown*, apakah yang terbuka tertutup semua negara lakukan. Dan kesimpulannya hari ini sama semua negara mengalami peningkatan-peningkatan kita bisa lihat, Cina pun yang dibilang luar biasa kemarin terkena lagi di satu daerah.

Nah, jadi memang *game changer* hari ini ya vaksin, nah vaksin ini sendiri yang kita hadapi ini tentu ya bukan vaksin yang tadi sudah disampaikan tidak ada standar dari WHO karena itu kita datang ke WHO kita menanyakan apa yang terbaik? WHO menyampaikan 70% kalau bisa divaksin secepat-cepatnya karena dengan vaksin akan mengurangi penularan, tidak menyembuhkan ya vaksin tidak menyembuhkan, vaksin itu menjaga kita yang tidak sakit supaya tidak tertular dan OTG anak-anak muda yang biasanya ya kuat ya menularkan, nah itu yang terjadi sekarang kenapa di rumah pun sekarang sudah mulai terjangkit.

Jadi vaksin jelas bukan obat, vaksin adalah menjaga kita untuk tidak tertular dan tidak menularkan orang-orang yang kita cintai. Apakah ditanya ada obatnya? Sampai hari ini tidak ada obat daripada Covid-19, kalau ada obat Covid pasti sudah disampaikan oleh WHO. Kalau kita kembali ya apa yang dilakukan vaksin ini tentu kebijakan tupoksi dari Kemenkes bukan dari Kementerian BUMN, di komite jelas sudah ada rapat-rapat apakah vaksin itu gratis semua, gratis mayoritas, apakah mandiri, jelas sudah menjadi keputusan Bapak Presiden vaksin itu gratis harus menolong seluruh masyarakat yang tidak mampu.

Nah, tetapi kita juga terbuka di sini ada wacana yang belum menjadi keputusan walaupun di Keppres-nya ada mandiri dimungkinkan, nah itulah kenapa tentu ada pertemuan dengan Komisi VI, ada pertemuan dengan BPKP, LKPP, dan juga Pak Menkes yang baru bersama saya datang ke BPK dan KPK untuk menyampaikan apakah vaksin mandiri ini salah? Tanggapan secara administrasi secara administrasi bukan kebijakan secara politis. Administrasi menyatakan:

Satu, kalau vaksin ini mereknya berbeda secara administrasi bisa dipertanggungjawabkan.

Yang kedua, vaksin sebaiknya tidak disuntik saat ini yang mandiri, biarkan vaksin gratis bergulir dulu 1, 2 bulan setelah nakes, setelah TNI-Polri. Ketika nanti di satu titik dilihat ada keterlambatan karena kesediaan vaksin, toh mereknya berbeda bukan merek yang gratis kenapa tidak kita juga agresif untuk mencapai 70% karena jelas WHO membuat *statement*, Pak Menkes membuat *statement*, dunia secara bersama akan menanggulangi vaksin ini sampai 70% memakan waktu 3,5 tahun. Untuk Indonesia Pak Menkes tidak pernah salah bukan karena bekas Wamen tapi *statement* beliau adalah memakan waktu 1 tahun lebih dilihat dari data-data vaksin, barang-barang vaksin yang tadi dijabarkan. Memang kalau ditanya hari ini sulit karena semua membutuhkan vaksin, alhamdulillah juga Indonesia masih dimasukkan kategori negara yang perlu dibantu karena itu ada COVAX dan GAVI yang jumlahnya 54 juta kalau negara seperti Amerika atau yang lainnya mungkin nggak ada yang COVAX sama GAVI karena COVAX dan GAVI itu gratis, gratis bantuan dunia.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA):

Pak Menteri. Supaya kita tidak meraba-raba. Kalau toh ada vaksin mandiri harga batas bawah batas atas apakah bisa ditentukan oleh pemerintah?

MENTERI BUMN (ERICK THOHIR):

Itu yang jelas tidak mau kejadian seperti yang namanya PCR test. Di seluruh dunia hari ini vaksin terkontrol oleh pemerintah, tidak tahu tahun depan, tapi hari ini di seluruh dunia masih terkontrol, kenapa terkontrol?

F-P.GOLKAR (GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.A.P.):

Pak Pimpinan.

Apakah vaksin itu memungkinkan sekarang ini ada tersebar di swasta kalau nggak salah itu produksi semua ambil diambil oleh negara hampir semua negara.

MENTERI BUMN (ERICK THOHIR):

Iya. Hari ini produksi vaksin ada yang dibuat swasta ya dan mungkin kebanyakan dibuat swasta, tetapi dana awalnya banyak dari pemerintah. Jadi kalau kita lihat misalnya Pfizer kenapa bisa besar itu kalau dilihat dari pemerintahan sebelumnya Pemerintah Amerika memberi *downpayment* yang sangat besar supaya Pfizer bisa menemukan dan memproduksi.

F-P.GOLKAR (GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.A.P.):

Maksud saya, ada *nggak* kelebihan produksi untuk bisa dilempar ke swasta gitu.

MENTERI BUMN (ERICK THOHIR):

Kalau hari ini sulit ya. Nah jadi jadi yang yang kemarin diusulkan dari kemarin yang diusulkan sejak awal bahwa distribusi vaksin tidak mungkin dimonopoli oleh kesehatan dan BUMN kita semua bersama-sama swasta harus mendistribusikan vaksin bersama-sama. Lalu kalau ditanya apakah nantinya kita mendapatkan merek vaksin bukan yang gratis ini merek yang lain kan kalau Sinovac gratis, tadi yang namanya AstraZeneca gratis, tiba-tiba ada merek lain yang misalnya tiba-tiba *available* toh yang gratis kan sudah terukur, sudah terencana.

Tiba-tiba ada apa *availability*, nah ini bukan bisnis vaksin ya ini realita yang ada di lapangan, tiba-tiba ada merek yang hari ini contoh misalnya Sinovac yang belum ada sampai hari ini makanya di situ kita tulis juga belum ada cuman tiba-tiba dia karena kapasitas produksinya meningkat seperti tadi Bio Farma yang tadinya 0 jadi 250 juta itu mungkin saja ada kesempatan untuk diambil jumlahnya pun tidak mungkin banyak, tidak mungkin sampai ratusan.

F-PD (DR. Ir. E. HERMAN KHAERON, M.Si.):

Pak Bimo, satu menit Pak Bimo, 30 detiklah ya. Terima kasih Pak Bimo.

Pak Erick, kalau dulu pada waktu awal Covid ada bahwa diwajibkan untuk *test kit* itu harus difaskes. Sekarang kan sudah bebas kita mau PCR Antigen, mau pakai apa lagi pakai rapid test mau merek apapun sekarang bebas, artinya masyarakat secara mandiri mereka mampu untuk mendeteksi dirinya dan inilah yang kemudian bisa juga menjaga akhirnya. Nah maksudnya yang tadi disampaikan teman-teman saya kira, bisa tidak sih kemudian ada kuota ataupun ya swasta yang mampu untuk bisa mengadakan sendiri dan itu menjadi kepentingan individu yang berkemampuan misalkan, karena kan kalau ini yang digratiskan kan prioritas kepada yang tidak mampu. Nah ada yang mampu misalkan kan kita mencari ini ke mana nih harus vaksin, itu saya kira saya kira ini. Jadi jangan prosesnya diskusi tetapi *timeline*-nya itu seperti apa gitu loh.

MENTERI BUMN (ERICK THOHIR):

Jawabannya Pak Herman tergantung keberadaan vaksin, stok, karena kita bicara bicara misalnya ya Oh kita mau melakukan itu stoknya *nggak* ada kan *nggak* mungkin juga kita mengambil yang gratis seperti dari Sinovac kan *nggak* boleh, kita sepakat bahwa rakyat harus didahului. Nah, ini yang saya lihat bahwa kemungkinan itu tetap ada tetapi tentu dengan konteks tadi dan ingat bedanya PCR *test* sama vaksin ini ada bedanya kalau di sana PCR *test* tidak ada risiko kita dites kita tahu, tapi kalau vaksin ini sesuatu yang masuk

ke dalam tubuh kita dan ada risiko-risiko yang namanya tadi efek samping nah itu dan itulah yang juga harus dipastikan jadi.

Nah, kalau ditanya apakah vaksin mandiri diperlukan? Menurut saya terbuka selama tadi vaksin yang gratis harus menjadi prioritas negara vaksin mandiri mengikuti setelah ada vaksinasi gratis. Bulannya kapan tergantung keberadaan tadi stoknya dengan merek yang berbeda yang di luar yang diputuskan oleh tadi Kemenkes sebagai ini vaksin gratis misalnya kalau Kemenkes memastikan Sinovac, AstraZeneca, dan GAVI dan COVAX ya GAVI dan COVAX itu bukan merek, di bawahnya katanya ada dua jenis macam yaitu AstraZeneca dan Pfizer, nah berarti nanti bisa aja vaksin merek lain itu menjadi yang gratis.

Nah saya masih melihat kesempatan mandiri ada tetapi dengan kesepakatan *policy* yang memang mengutamakan yang gratis dulu dan mandiri mengikuti, jadi jangan kebalik karena saya yakin dan insya Allah adalah kesempatan itu. Karena itu sejak awal kita pemerintah agresif datang ke banyak negara karena tidak lain pada saat awal ini juga untuk menjawab vaksin-vaksin yang dari negara barat kita tidak mendapat respon, betul Pak Honesti? Tidak mendapat respon, yang membuka sejak awal yaitu Cina dan UAE, lalu AstraZeneca itu makanya kita datangin. Jadi kita bukan apa memilih-milih atau karena ini karena itu tidak, karena kesempatan utama pemerintah harus hadir menyelamatkan rakyatnya dan vaksin itu yang pada saat itu ada, nah itu satu.

Lalu yang kedua untuk pertanyaan mengenai *roadmap* saya rasa semuanya ada titik temu. Satu ada Wamen baru, yang kedua kita kena Covid, jadi kalau kita bicara *roadmap* yang awal dipersentasi pun *nggak* bakal jalan karena hari ini banyak perubahan yang terjadi karena itu tadi tidak sepakat bahwa kita mulai diskusi *roadmap* 1 minggu 1 *cluster* dari mulai bulan Februari sampai bulan Februari, Maret, April 3 bulan karena tidak mungkin 1 *cluster* dibahas satu hari. Jadi saya sudah tugaskan para Wamen untuk menyiapkan ini dan kebetulan juga kita sedang membahas RUU BUMN Insya Allah titiknya ketemu karena saya sepakat tadi banyak pertanyaan dan itu menjadi salah satu pembicaraan bersama Komisi VI mana penugasan, mana *corporate action*, kalau tercampur-campur akhirnya tidak sehat. Kita sangat mengharapkan yang namanya penugasan harus jelas, yang namanya *corporate action* juga titiknya harus jelas karena yang namanya *corporate action* itu kan mesti ada *return of investment* kalau yang nama penugasan kalau bisa nol tapi jangan bangkrut gitu kan, nah benefit gitu, kalau bisa nol aja tapi jangan sampai bangkrut. Nah, hal-hal ini saya rasa sangat terbuka.

Sama juga tadi pembicaraan mengenai *policy energy*. Alhamdulillah sudah ada pertemuan kami dengan Menteri ESDM dengan juga Menteri Keuangan untuk duduk bersama membuat RUPTL, RUEN untuk 10 tahun yang akan datang karena supaya jelas berapa subsidi yang diperlukan, apa rencana kerja dari Menteri ESDM mengenai energi terbarukan.

Dan tentu kami sebagai PLN harus mengikuti kesepakatan dengan transisi yang jelas, jangan sampai ganti Dirut PLN ganti kebijakan tender, ganti menteri BUMN dirubah lagi tadi kesepakatan ini. Sama juga seperti mengenai rapat terakhir yang dipimpin Bapak Presiden langsung itu hadir, bagaimana harus ada juga kesepakatan antara Menteri BUMN, Menteri

Perdagangan, Menteri Keuangan, dan Menteri Pertanian mengenai kebijakan tadi antara produksi dalam negeri, proteksi kepada petani nelayan, dan kebijakan impor. Kita tidak boleh alergi impor, tapi kita harus jelas impor yang memang sesuai dengan kebutuhan negara ini bukan impor yang **(suara tidak jelas)**.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Izin Pimpinan sedikit aja soal energi tadi di singgung.

Saya menangkap ada *reluctant* dari PLN Pak untuk yang PLTSa Pembangkit Listrik Tenaga Sampah itu dan bahkan di satu sisi KPK ikut ke dalam dan bilang bahwa ini berpotensi merugikan BUMN dan PLN sehingga semua daerah banyak yang ngopling urusan ini, padahal di sisi lain kita lihat Pertamina disuruh kasih tugas dengan BUMN satu harga nggak ada masalah tuh. Jadi ini gimana ini, bahkan jadi apa memang perlu diusulkan kepada Presiden supaya Keppres berapa sih 31 ya soal itu *renewable energy* itu supaya dicabut sekalian gitu karena daripada jadi bola-bola yang *nggak* jelas.

MENTERI BUMN (ERICK THOHIR):

Saya rasa selama duduk bersama dan terbuka detailnya saya rasa ada jalan. Yang *problem* hari ini kan sama seperti program satu data tadi, kenapa sekarang kita juga meminta vaksin itu masuk dalam satu data tidak satu untuk memproteksi yang disuntik, kan tidak mungkin hari ini Pak Nusron disuntik Sinovac besok disuntik Pfizer kan *nggak* mungkin kan. Jadi program satu data ini menjadi program yang baik, kenapa? Supaya kita juga punya *database* yang satu untuk juga mengurangi tadi program-program pemerintah yang salah sasaran. Nah, ini yang memang kemarin kenapa salah satu pembahasan juga bersama Pimpinan Komisi mendukung dan juga KPK mendukung bagaimana program satu data ini harus mulai kita jaga bersama-sama, bukan berarti tidak ada harus ada.

Untuk yang lainnya saya rasa nanti mengenai Rekind, mengenai SWF kalau berkenan kita di rapat lebih tertutup ya. Tetapi untuk mengenai penugasan Bio Farma sebaiknya dilaporin ya dan juga tadi ada pertanyaan mengenai efikasi ataupun kenapa vaksin-vaksin yang dipilih kok banyak. Silakan Pak Hones.

DIRUT PT BIO FARMA:

Terima kasih Pak Menteri, Pak Pimpinan dan Anggota Komisi VI.

Jadi mungkin pertama saya mulai dari kriteria dulu kenapa kriteria pemilihan. Di Perpres Nomor 99 tahun 2020 sudah jelas bahwa vaksin yang akan digunakan di Indonesia. Satu, masuk list WHO. Kedua, sudah menjalani uji klinis tahap 3. Yang ketiga adalah sudah mendapatkan rekomendasi dari IKG. Dan terakhir pada saat mau divaksinasi itu sudah mendapatkan *Emergency Use Authorization* dari Badan POM.

Kemudian kenapa kok Sinovac yang lebih banyak? Tadi Pak Menteri sudah menyampaikan ini memang mereka merespon lebih cepat ke kita, satu itu. Yang kedua juga ada *benefit* buat kita, kenapa? Mereka mau melakukan transfer teknologi. Kenapa ini penting bagi kita? Kita nggak tahu sifat dari virus ini berulangnya kapan, apakah akan 1 tahun sekali, akan 2 tahun sekali atau mungkin sekali suntik sumur hidup belum ada yang tahu karena memang sekarang pengembangan vaksin Covid ini adalah untuk menghentikan pandemi dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk menentukan berapa lama vaksin ini bertahan memberikan kekebalan ataupun imunitas kepada tubuh manusia, jadi memang dasar pemilihan kita seperti itu.

Kemudian bagaimana sifat bisnisnya atau pengadaannya? Karena sifatnya adalah penugasan ya di Perpres Nomor 99 tahun 2020 adalah penugasan diberikan kepada BUMN Farmasi dalam hal ini adalah Bio Farma dan anak perusahaannya, tentunya nanti pendanaannya dari APBN. Tapi karena pencarian *supply*-nya itu ada mekanisme yang berbentuk vaksin impor, vaksin jadi, dan juga ada yang bentuknya adalah *bulk* Bio Farma tentunya membutuhkan modal kerja sehingga nanti ada pencarian pendanaan di samping APBN sendiri juga ada pendanaan dari pihak ketiga yang kami dapatkan misalkan dari Himbara. Jadi memang harus ada mix antara APBN sendiri dengan pihak ketiga terutama untuk *working capital* terutama pada saat kita memberikan apa melakukan proses produksi dari vaksin itu sendiri, jadi penugasan, pendanaan dari APBN.

Kemudian kami memberikan HPP Pak kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan Harga Pokok Produksi, itu pun juga setelah mendapatkan pendampingan dari BPKP. Setelah itu baru kami berikan ke Kemenkes, Kemenkeslah nanti yang akan menentukan harga yang diberikan kepada kami. Kemudian.

F-P.GOLKAR (Ir. H.M. IDRIS LAENA, M.H.):

Mas Bimo boleh sebentar, sedikit.

Pak, ini kalau dari APBN, Pak Dirut.

DIRUT PT BIO FARMA:

Iya Pak.

F-P.GOLKAR (Ir. H.M. IDRIS LAENA, M.H.):

Kalau dari APBN bagaimana mekanismenya Pak karena apakah melalui Kementerian Kesehatan kepada Bapak atau dari APBN langsung ke Bapak, tapi kalau itu kan harus ada mekanisme. Kalau memang harus itu kan harus keputusan langsung dari Kemenkes.

DIRUT PT BIO FARMA:

Dari Kemenkes Pak.

F-P.GOLKAR (Ir. H.M. IDRIS LAENA, M.H.):

Iya. Karena begini, saya dapat informasi bahwa Bapak harus membayar 80% DP ke Sinovac, betul Pak?

DIRUT PT BIO FARMA:

Ya itu untuk yang 3 juta Pak.

F-P.GOLKAR (Ir. H.M. IDRIS LAENA, M.H.):

80%-nya? Itu besar sekali kan.

DIRUT PT BIO FARMA:

Ya karena memang ada pengecualian Pak karena *supply* ini kan terbatas, kemudian juga karena kita butuh prioritas untuk para nakes kita. Pada saat itu kita diminta untuk pembelian dipercepat untuk vaksin jadi ini sehingga pada saat itu kita memang diskusi dan mereka memang mau memberikan tapi kan rebutan *supply* Pak, jadi kalau mau memberikan 80% DP ya kita akan dapat *supply* sehingga memang waktu itu kita meminta perlakuan khusus kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan untuk mendapatkan DP yang sama dengan DP yang harus kita berikan kepada Sinovac begitu Pak.

Kemudian juga pertanyaan terkait rencana *supply, timeline*, segala macam. Ini memang tadi sudah disampaikan juga apakah kita akan sanggup 500.000 sebulan? Ya kalau semua *supply*-nya sesuai dengan rencana Insha Allah kita bisa 500.000 sebulan. Tapi memang dalam vaksin ini memang banyak sekali yang yang kita harus *manage* ketidakpastian, sebagai contoh di Amerika tuh targetnya Desember itu adalah 20 juta vaksinasi kenyataannya hanya 2,3 juta, permasalahannya banyak *cold storage*, tenaga vaksinator, ada yang segala macam dan segala macam. Jadi tapi kita berharap kita akan mencoba untuk *manage supply*-nya sendiri dan juga nanti kesiapan infrastruktur untuk melakukan vaksinasi sehingga kita bisa melakukan 15 bulan.

Kemudian kenapa 70% tadi Pak Menteri sudah menjawab. Kenapa kita harus bikin sendiri, apa harga lebih murah? Lebih murah kita bikin sendiri, kenapa? Kita sudah punya fasilitas produksinya ya kita sudah punya fasilitas produksinya. Jadi kalau seandainya kami impor ya kemudian kita langsung itu harganya kami sudah bandingkan kita lebih murah membeli bahan baku ya. Baik Pak, seperti contohnya Pak, Sinovac yang nggak apa-apa saya karena udah ada saya kirim ke Kemenkes, mohon izin ya Pak Menteri ya sebagai perbandingan saja. Sinovac yang vaksin jadi itu harganya \$17 Pak ya untuk satu dosis *one dose* ya \$17, tapi karena kita negosiasinya bagus ya dibantu oleh kementerian kita memang harga dasar \$17 tapi kita minta gratisan sehingga *weighted average*-nya menjadi \$13,3, iya, iya. Tapi kalau kita

produksi sendiri Pak kita beli bahan bakunya hanya \$6 Pak kalau kita produksi ya itu hanya sekitar 11 sampai 12 dollar Pak, bandingkan dengan \$17 kalau kita impor langsung, iya Pak oke.

Jadi jadi memang lebih dan juga seperti disampaikan tadi Pak kita memang harus memiliki kemampuan untuk produksi sendiri karena kita *nggak* tahu pandemi ini dan ini juga latihan bagi kita karena nanti ada vaksin merah-putih Pak iya kan. Jadi tidak hanya masalah harga tapi juga benefit jangka panjang yang kita dapatkan kalau kita memiliki kemampuan sendiri untuk produksi. Iya Pak, terima kasih. Singkat kata Pak.

F-PG (NUSRON WAHID):

Pak sebentar Pak. Tapi masalah konsen waktu Pak, rakyat kan ini butuh cepat kalau impor kan bisa cepat semua langsung suntik semua *nggak* butuh waktu 15 bulan, bukan kan cuma 3 juta.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA):

Nggak ada barangnya.

DIRUT PT BIO FARMA:

Tiga juta yang vaksin jadi, ada bahan baku yang kita produksi. Sampai Q1 Pak itu hanya Sinovac Pak, tapi Q2 karena memang puncaknya produksi dari semua perusahaan vaksin itu adalah mulai Q2 karena mereka baru menyelesaikan uji klinis tahap 3-nya Pak.

F-PG (NUSRON WAHID):

Bukan Pak maksud saya begini mohon izin Pak.

Kalau tadi impor kan 13,3, kalau bikin sendiri 11 ada *lag* sekitar 2,3 tapi *lag* waktunya kan panjang, kalau impor ini kan kita *lag* waktunya bisa cepat.

DIRUT PT BIO FARMA:

Tapi kapasitas impornya terbatas Pak.

F-PG (NUSRON WAHID):

Oh sama di situ ya oke. Oke terima kasih kalau gitu.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA):

Cukup Pak Menteri?

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):

Pak saya mau tanya aja Pak vaksin influenza itu mereknya sama yang berada di Indonesia atau 1 merek Pak, vaksin influenza.

DIRUT PT BIO FARMA:

Ada 2 merek Bu.

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):

2 merek. Soalnya kan kita *nggak* tahu yang disuntikkan oleh ke kita merek apa pokoknya kita vaksin influenza, berarti mungkin aja saya suntik merek yang satu besok yang lain tapi bisa, apakah ini Sinovac kemudian besoknya Pfizer *nggak* bisa?

DIRUT PT BIO FARMA:

Nggak bisa Bu.

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):

Oke.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA):

Saya kira untuk vaksin nanti kita ada rapat khusus lagi sama Bio Farma ya teman-teman. Nah, kemudian terima kasih kita akan masuk ke *draft* kesimpulan.

ANGGOTA:

Mas Bimo sebentar, satu, satu. Mas Bimo sebentar.

Pak Dirut dengan Pfizer ini kan ada *note* Bapak di sini penandatanganan di Januari sudah tanda tangan dengan Pfizer Pak?

DIRUT PT BIO FARMA:

Ya kita masih negosiasi.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA):

Jangan dulu Pak, jangan jangan, ini semua terbuka, TV Parlemen juga masih *live* kita.

Bapak Ibu dan Saudara-saudara sekalian,

Saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang telah memberikan pendalaman dalam rapat kali ini dan terima kasih kepada Pak Menteri beserta jajarannya, Pak Wamen maupun dari Bio Farma yang telah

memberikan berbagai respon. Maka kita akan masuk ke Kesimpulan Rapat Kerja Komisi VI dengan Menteri BUMN dan Direktur PT Bio Farma Persero Masa Sidang III Tahun Sidang 2020/2021 Rabu 20 Januari 2021. Untuk kesimpulan pertama dan kesimpulan kedua masih cenderung normatif dari apa yang sudah kita bahas dalam hal terkait dengan pelaksanaan anggaran 2020 dan rencana anggaran 2021 :

1. Komisi VI DPR RI mengapresiasi realisasi anggaran Kementerian BUMN per 31 Desember 2020 sebesar Rp260.130.543.993,- atau sebesar 97,65% dari Pagu Anggaran 2020 sebesar Rp266.392.551.000,-.

(RAPAT:SETUJU)

2. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan sesuai dengan DIPA Kementerian BUMN nomor SP DIPA-042.01.1.6065538/2020 tanggal 23 November 2020 dan sebagaimana diubah dengan Surat Menteri Keuangan nomor S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2020 perihal *Refocusing* dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2020 terhadap Anggaran awal Kementerian BUMN tahun 2021 sebesar Rp244.827.483.000,- dilakukan penghematan menjadi Rp228.591.256.000,- yang terdiri atas:

A. Pengelompokan berdasarkan Program :

1. Program Dukungan Manajemen Rp153.931.844.000,-;
2. Program Pengembangan dan Pengawasan Rp74.659.412.000,-.

B. Pengelompokan berdasarkan Jenis Belanja :

1. Belanja Pegawai Rp63.174.744.000,-;
2. Belanja Barang Rp145.905.291.000,-;
3. Belanja Modal Rp19.519.221.000,-

Pengelompokan jenis belanja tersebut menunggu proses revisi anggaran untuk penghematan. Setuju?

(RAPAT:SETUJU)

3. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian BUMN untuk merealisasi pelaksanaan anggaran secara transparan, tepat sasaran dan tepat guna sesuai prinsip *Good Corporate Governance* dan perundang-undangan yang berlaku.

Setuju?

(RAPAT:SETUJU)

Prinsip *Good Corporate, Good Governance* ya. Sesuai dengan prinsip *Good Governance*, coret *Corporate*-nya. Setuju?

(RAPAT:SETUJU)

4. Komisi VI DPR RI meminta kepada Menteri BUMN untuk memberi arahan dan kebijakan kepada perusahaan-perusahaan BUMN yang masih memiliki *cash flow* yang baik agar menyelesaikan kewajiban kepada pihak swasta sehingga dapat mengurangi dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Jadi perlu kami sampaikan juga kepada Pak Menteri beberapa tagihan-tagihan itu juga banyak yang nyampe ke Komisi VI. Setuju ya?

(RAPAT:SETUJU)

5. Komisi VI DPR RI meminta kepada Menteri BUMN dan PT Bio Farma untuk melaksanakan proses pendistribusian vaksin Covid-19 dengan tetap menjaga mutu dan keamanan berdasarkan standar protokol yang berlaku.

(RAPAT:SETUJU)

6. Komisi VI DPR RI meminta kepada Menteri BUMN berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan berbagai pihak terkait terkait pihak lain terkait pihak lain agar memiliki data yang akurat terkait Covid-19 sehingga proses vaksinasi dapat berjalan secara efektif, tepat sasaran dan meminimalisasi risiko penyebaran ataupun imunitas penduduk seluruh warga Indonesia termasuk mengupayakan percepatan vaksinasi bagi jamaah haji dan lingkungan pesantren sebagai langkah penekanan penyebaran virus.

Komisi VI DPR RI meminta kepada Menteri BUMN berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, tadi terkait dengan klaster-klaster pertumbuhan, dan berbagai pihak terkait pihak lain agar memiliki data yang akurat, ini **(suara tidak jelas)** Pak, data yang akurat terkait covid-19 sehingga proses vaksinasi dapat berjalan secara efektif, tepat sasaran dan meminimalisasi resiko penyebaran maupun imunitas penduduk seluruh warga negara Indonesia termasuk mengupayakan percepatan vaksin bagi jamaah haji dan lingkungan pesantren sebagai langkah menekan penyebaran virus.

F-P.GOLKAR (GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.A.P.):

Saya rasa yang berisiko mungkin.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA):

Yang berisiko aja tadi. Ini ada usulan, ada usulan masalah yang sejenis pesantren tadi kan juga hal yang perlu dicermati sejauh mana peningkatan penyebaran yang akhir-akhir ini cukup tinggi itu bisa kita ketahui hal-hal yang menyangkut kepastian, kepastian tentang objektif penyebaran itu seperti apa, ini yang tidak kita miliki.

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):

(suara tidak jelas) harus dibuat. Industri juga, manufaktur juga apa namanya juga, iya nggak usah pakai **(suara tidak jelas)**.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA):

Yang berisiko ya? di lingkungan yang berisiko tinggi dalam penyebaran virus Pak, iya.

F-PD (DR. Ir. E. HERMAN KHAERON, M.Si.):

Mungkin ditambah misalnya saja.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA):

Misalnya seperti pesantren.

F-PD (DR. Ir. E. HERMAN KHAERON, M.Si.):

Iya gitu, Jamaah haji. Jadi tetap risiko tapi misal.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA):

Antara lain atau seperti, pesantren.

ANGGOTA:

Jamaah Haji Pak harus vaksin sebelum berangkat Pak.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA):

Kalau jamaah haji memang di prioritaskan.

ANGGOTA:

Harus harus vaksin.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA):

Iya. Jadi ini bagi vaksin bagi para jamaah haji dan lingkungan yang berisiko tinggi seperti pesantren, tempat kerja yang ber-AC dan lain-lain, kasih contoh ya. Substansi setuju ya, substansi setuju lah.

(RAPAT:SETUJU)

Redaksi diperbaiki. Pak, setuju Pak Menteri ya. Oke.

7. Untuk mengakselerasi cakupan jumlah orang yang diberi vaksin, Komisi VI DPR RI memahami adanya opsi untuk dilakukan vaksin mandiri dengan catatan data seluruh orang yang diberi vaksin terintegrasi secara valid, memastikan bahwa pihak yang memberikan vaksin tidak *profit oriented* tetapi lebih mengutamakan pada upaya peningkatan keselamatan masyarakat serta meminta pemerintah untuk menetapkan batas tarif tertinggi vaksin mandiri disertai dengan pengawasan yang ketat atas pelaksanaan impor.

Nah ini yang lebih tahu teknis Pak Menteri dan Bio Farma, silakan.

ANGGOTA:

Pak Bimo, jangan memahami dong mendorong saja langsung Pak.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA):

Oh mendorong.

ANGGOTA:

Mendorong dong, memahami itu bahasa yang ini.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA):

Bisa mendorong, bisa memahami, bisa menyetujui, bisa mendukung.

ANGGOTA:

Iya, saya kira kita dalam posisi mendorong. Terutama begini Pak, mendukung.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA):

Mendukung saja ya, mendukungi mendukung, oke. Substansi-substansi yang terkait isi.

F-PG (NUSRON WAHID):

Pak, Pak Bimo.

Ini kan masalah vaksin mandiri kan bebas-bebas saja *wong* duit-duit masyarakat sendiri, kenapa harus dibatasi tidak boleh *profit oriented*? itu ada tulisannya.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA):

Ada.

F-PG (NUSRON WAHID):

Tidak *profit oriented*.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA):

Iya.

F-PG (NUSRON WAHID):

Sebetulnya itu nggak dicantumin yang penting mengutamakan aspek keselamatan, namanya juga mandiri gitu loh, iya.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA):

Ya kalau untung jangan diputuskan di sini.

F-PG (NUSRON WAHID):

Tapi artinya begini. Nggak, tetap diputuskan supaya tidak menambah beban pemerintah untuk si kaya-kaya itu kan perlu ada opsi vaksin mandiri supaya yang vaksin gratis ini untuk yang kalangan tertentu yang dianggap kurang mampu, nah tapi si kaya-kaya itu seperti Anggota DPR iya kan, Wamen I. Kalau saya LC Lulusan Covid *nggak* perlu vaksin Pak.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA):

Kita pahami, kami serahkan mengenai masalah *profit* ini nanti ada batas bawah batas atas.

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):

Ketua. Saya rasa *nggak* usah profit deh.

F-PG (NUSRON WAHID):

Perkara nanti ada *selling price*, ada *full price* itu biarkan kebijakan pemerintah sesuai dengan masalah daya beli.

F-PD (DR. Ir. E. HERMAN KHAERON, M.Si.):

Mas Bimo. Kalau pun penerapan kan sudah ada batas harga, iya batas tertingginya kan sudah ada.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA):

Mana?

F-PD (DR. Ir. E. HERMAN KHAERON, M.Si.):

Di bawahnya kan ada itu.

MENTERI BUMN (ERICK THOHIR):

Dari rapat sama BPKP LKPP itu mereka menyarankan kan merek-merek vaksin itu harganya berbeda-beda, nah mereka akan udah ada itunya ya menentukan sekian persen dari harga gitu, jadi ada batas itunya batas.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA):

Oh ya udah, nah ini cukup dengan penetapan batas tarif tertinggi tadi ya? Tarif tertinggi aja ya berarti ya Pak karena sudah ada batasan tadi ya. Oke, diubah. Pemerintah untuk menetapkan batas tertinggi vaksin tapi *profit*-nya hilang sudah, begitu ya. Nah ini masalah *profit* tadi kita hilangkan tapi penentuan pemerintah untuk menetapkan batas tarif tertinggi vaksin karena sudah ada kesepakatan 6% tadi Pak ya. Oke?

F-PG (NUSRON WAHID):

Pak yang kedua Pak. Kalau kita sudah mendorong vaksin mandiri, harus pelakunya itu dikasih kesempatan. Pertama, kalau toh pakai nanti kuota-kuota terbanyak itu tetap orang atau perusahaan yang sudah melakukan vaksin gratis karena vaksin gratis ini untungnya tipis iya kan, *sharing the pain*, coba kasih kompensasi begitu kira-kira. Bukan, baru yang lain dikasih jangan kemudian pihak swasta berlomba-lomba lobi-lobi kanan-kiri dikasih kesempatan dapat yang lebih banyak, sementara kita terhadap yang si miskin ini tidak terlibat.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA):

Saya kira itu catatan masukan dari Pak Nusron sebagai seorang Ustadz menyampaikan.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Izin Pimpinan, izin Pimpinan.

Saya kira di ini aja bahwa mendukung opsi vaksin mandiri di bawah pengawasan ketat pemerintah, gitu aja itu lebih sederhana. Termasuk soal harga, soal pendataan.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA):

Kita mengambil keputusan politik ini harus juga ada 1 dasar-dasar yang yang bisa diterima ke publik lewat forum ini Pak ya, maka di situ catatan kita. Misalnya bahwa data itu harus terintegrasi, jangan sampai nanti yang dapat vaksin mandiri juga dimasukkan sebagai vaksin gratis misalnya, ini bangunan-bangunan argumentasi kita Pak.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Justru itu saya malah berpikir bahwa nanti kan itu yang akan menentukan adalah Kementerian Kesehatan ujungnya bukan Kementerian BUMN. Jadi bahwa perlu dikatakan di situ bahwa komisi ini mau karena alasan-alasan tersebut di atas mendukung adanya vaksin mandiri dengan catatan di bawah pengawasan pemerintah baik dalam hal harga maupun pelaksanaan dan pendataan gitu kira-kira.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA):

Sudah sudah jangan, itu di kesimpulan itu yang mau dicoret yang mana Pak menurut Pak Deddy?

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Loh saya kira itu yang mengutamakan upaya peningkatan keselamatan masyarakat dan seterusnya dan pengawasan serta.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA):

Masalahnya?

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Kenapa?

KETUA RAPAT (ARIA BIMA):

Ini keputusan politik.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Yang saya sampaikan tadi kan politik juga.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA):

Nggak, mengutamakan pada upaya peningkatan keselamatan masyarakat serta meminta pemerintah, apa salahnya?

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Itu bisa taruh di atas Mas, saya kira itu udah *redundant* kalau taruh di bawah lagi ya. Misalnya begini, ini kan mendukung dilakukannya vaksin mandiri.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA):

Segitu aja, titik.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Saya kan tadi udah sampaikan sebagian ya, vaksin mandiri dengan catatan di bawah apa namanya di bawah pengawasan pemerintah baik dalam hal pendataan, harga. Iya kalau sudah harga nggak perlu lagi soal impor kan? Harga kan berarti mengawasi impor. Pengawasan iya, baik data, harga dan pelaksanaan.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA):

Waduh malah lebih detail ini. Oke, setuju ya?

(RAPAT:SETUJU)

8. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian BUMN dan PT Bio Farma untuk bekerja sama dengan Kementerian dan *stakeholder* terkait untuk mempercepat riset dan produksi vaksin Merah-Putih.

Cocok ya?

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Pimpinan.

Saya kira untuk menjadi *leading actor* saja dalam hal pengadaan vaksin Merah Putih. Meminta Kementerian BUMN dan PT Bio Farma untuk menjadi *leading actor* dalam rangka produksi vaksin Merah Putih. Gitu aja.

F-PD (DR. Ir. E. HERMAN KHAERON, M.Si.):

Nggak ada kesimpulan ini juga sudah jalan, sudah jalan Pak *nggak* usah ada kesimpulan ini juga. Menteri Kesehatannya kan Wamen II eh Wamen I. *Nggak* usah ada kesimpulan ini juga udah jalan ini Pak.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA):

Udah jalan kok.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Ya buang saja, saya kan cuma memperbaiki.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA):

8. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian BUMN untuk segera menyelesaikan *roadmap*.

Oke ya?

MENTERI BUMN (ERICK THOHIR):

Tapi sebaiknya kalau ada mandiri, Merah Putih-nya mesti ditulis.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA):

Oh. Oh ini substansinya adalah vaksin mandiri, vaksin Merah Putih.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Tadi kan juga kita mendengarkan penjelasan bahwa saat ini ada beberapa pihak dan perguruan tinggi misalnya yang sedang bekerja untuk vaksin Merah Putih. Jadi supaya jangan *redundant* kita minta jadi *leading actor* gitu loh.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA):

Sudah benar, 8 sudah benar.

(RAPAT:SETUJU)

9. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian BUMN untuk segera menyelesaikan *roadmap* BUMN 2020-2024 dan pembagian kluster BUMN.

Setuju Pak Menteri? Tahunnya itu 2021 itu karena ada perubahan Covid itu ya.

(RAPAT:SETUJU)

10. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian BUMN dan PT Bio Farma untuk memberikan jawaban secara tertulis yang belum terjawab ya dalam waktu paling lama 10 hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.

(RAPAT:SETUJU)

Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Menteri BUMN dan Direktur Utama PT Bio Farma beserta seluruh jajarannya.

Atas nama Pimpinan Komisi VI DPR RI kami juga mengucapkan kepada seluruh kawan-kawan Anggota Komisi VI yang telah mengikuti rapat sampai sore hari ini dalam Rapat Kerja hari ini. Apakah masih ada hal yang perlu disampaikan Pak Menteri sebagai *closing*? Saya kira cukup, terima kasih.

Dengan demikian rapat saya tutup.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 17.37 WIB)

Jakarta, 20 Januari 2021

a.n Ketua Rapat
SEKRETARIS RAPAT,

Ttd.

DEWI RESMINI, S.E., M.Si
NIP.197104071992032001